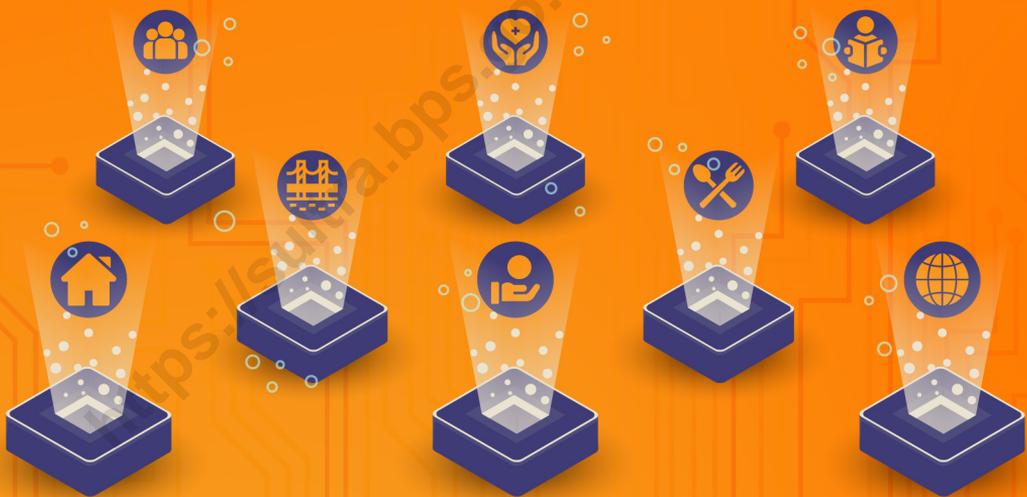


INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2023

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Volume 8, 2023

Kajian Tematik: Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Katalog: 4102004.74

ISSN 2614-0721

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2023

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Volume 8, 2023

Kajian Tematik: Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2023

Volume 8, 2023

Katalog : 4102004.74
ISSN : 2614-0721
Nomor Publikasi : 74000.2355

Ukuran Buku : 17,6 x 25,0 cm
Jumlah Halaman : xvi+103 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Dicetak oleh:
CV. Metro Graphia Kendari

Sumber Ilustrasi:
freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Sulawesi Tenggara 2023

Pengarah

Agnes Widiastuti, S.Si., ME

Penanggung Jawab

Nike Roso Wulandari, S.ST., M.E

Penyunting

Nike Roso Wulandari, S.ST., M.E

Penulis Naskah

Amrin Barata, SST

Evi Eriany, S.E

Burit Retnowati, S.ST

Dhea Prawidia S.Tr.Stat.

Pembuat Kover

Damara Utama, S.Tr.Stat.

Penata Letak

Damara Utama, S.Tr.Stat.

<https://suara.kem.go.id>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan beberapa kementerian/lembaga terkait tema yang disajikan. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Potensi Desa (Podes), Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk Indonesia Interim 2020-2023.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Disamping indikator kesejahteraan rakyat yang rutin disajikan, publikasi ini menambahkan penyajian satu tema khusus. Tahun ini publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 mengambil tema 'Kajian Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Dampaknya terhadap Ketimpangan Pendapatan' di Sulawesi Tenggara. Tema ini memberikan gambaran tentang perkembangan TIK di Sulawesi Tenggara dan perbandingannya antar wilayah/regional Pulau Sulawesi maupun antar karakteristik sosio-demografis. Selain itu, dipaparkan juga hasil kajian dampak dari pembangunan TIK terhadap kondisi ketimpangan pendapatan.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kendari, November 2023
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara. The stamp contains the text 'BADAN PUSAT STATISTIK' at the top and 'PROVINSI SULAWESI TENGGARA' at the bottom, with a central logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AGNES WIDIASTUTI, S.Si., ME.

DAFTAR ISI

Indikator Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Sulawesi Tenggara 2023

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. Kajian Tematik: Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara	1
1. Pendahuluan	3
2. Perkembangan Pembangunan TIK (<i>ICT Development Progress</i>)	8
3. Kesenjangan Digital	27
4. Daftar Isian yang Digunakan	39
II. Perkembangan Kesejahteraan Rakyat	47
1. Kependudukan	49
2. Kesehatan Gizi	53
3. Pendidikan	63
4. Ketenagakerjaan	70
5. Taraf dan Pola Konsumsi	79
6. Perumahan	84
7. Kemiskinan	89
8. Sosial Lainnya	93
III. Daftar Pustaka	99

DAFTAR TABEL

Halaman

I. Kajian Tematik: Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara	1
Tabel 3.1. Sub Indeks dan Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK), 2022	28
Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal di Pulau Sulawesi, 2020-2022	35
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Pulau Sulawesi, 2020-2022	36
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi dan Kelompok Umur, 2022	37
Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022	38
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel-Variabel yang Digunakan	41
Tabel 4.2. Tahapan Pengujian Regresi Data Panel Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022	42
Tabel 4.3. Hasil Estimasi Regresi Panel Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022	42
Tabel 4.4. Tahapan Pengujian Regresi Data Panel Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Pendapatan Perkapita Tinggi, 2018-2022	43
Tabel 4.5. Tahapan Pengujian Regresi Data Panel Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Pendapatan Perkapita Rendah, 2018-2022	44
Tabel 4.6. Hasil Estimasi Regresi Panel Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Daerah Pendapatan Perkapita Tertinggi dan Terendah, 2018-2022	44

II. Perkembangan Kesejahteraan Rakyat	47
Tabel 1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Sulawesi Tenggara, 2020 dan 2022	49
Tabel 2. Perkembangan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Anak di Sulawesi Tenggara (per 1.000 Kelahiran), 1997-2022	54
Tabel 3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (E_0), 2018-2022 .	56
Tabel 4. Balita yang mendapatkan ASI dan Imunisasi (persen), 2021 dan 2022	58
Tabel 5. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2021 dan 2022	60
Tabel 6. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat, 2021 dan 2022	61
Tabel 7. Beberapa Indikator Pendidikan (persen), 2021-2022	65
Tabel 8. Perkembangan Angka Putus Sekolah, Mengulang, Angka Kelulusan, Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah, dan Murid-Rombel Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2019/2020- 2021/2022	67
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2020-2023	71
Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2021-2023	73
Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (Persen), 2021-2023	74
Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Formal dan Informal dan Jenis Kelamin (Persen), 2021-2023	76
Tabel 13. Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan /Pegawai Menurut Jenis Kelamin (rupiah), 2020-2023	77
Tabel 14. Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Daerah Tempat Tinggal (rupiah), 2020-2023	77
Tabel 15. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021-2023	78
Tabel 16. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis	

	Pengeluaran di Sulawesi Tenggara, 2021-2022	81
Tabel 17.	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2021-2022	81
Tabel 18.	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini di Sulawesi Tenggara, 2020-2022	82
Tabel 19.	Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2020-2022	83
Tabel 20.	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Sulawesi Tenggara, 2021 dan 2022	85
Tabel 21.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Sulawesi Tenggara (persen), 2021 dan 2022	86
Tabel 22.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Sulawesi Tenggara (persen), 2021 dan 2022	87
Tabel 23.	Perkembangan Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023	89
Tabel 24.	Garis Kemiskinan di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023	90
Tabel 25.	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023	91
Tabel 26.	Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023	91
Tabel 27.	Indikator Sosial lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2021-2022	95
Tabel 28.	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Selama 3 Bulan Terakhir, 2021-2022 ...	97

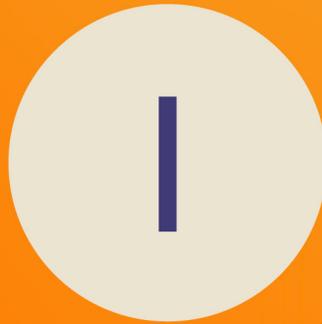
DAFTAR GAMBAR

Halaman

I. Kajian Tematik: Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara	1
Gambar 2.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah di Sulawesi Tenggara, 2018-2022	10
Gambar 2.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2018-2022 ..	11
Gambar 2.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2022	12
Gambar 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop dan Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir di Sulawesi Tenggara, 2018-2022	13
Gambar 2.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2018-2022	14
Gambar 2.6. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tenggara, 2018-2022	15
Gambar 2.7. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2022	16
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2018-2022	17
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tenggara, 2018-2022	18

Gambar 2.10. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2022	19
Gambar 2.11. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Media untuk Mengakses Internet di Sulawesi Tenggara, 2022 ..	21
Gambar 2.12. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tempat Mengakses Internet di Sulawesi Tenggara, 2019-2022 .	21
Gambar 2.13. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Mengakses Internet di Sulawesi Tenggara, 2020-2022 ..	22
Gambar 2.14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder, dan APK Tersier, 2019-2021 di Sulawesi Tenggara, 2021-2022	24
Gambar 2.15. Indeks Literasi Digital dan Indikator Pilarnya di Sulawesi Tenggara, 2022	25
Gambar 2.16. Indeks Literasi Digital Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022	26
Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan TIK Sulawesi Tenggara, 2017-2022	29
Gambar 3.2. Indeks Pembangunan TIK Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi dan Indonesia, 2022	30
Gambar 3.3. Perkembangan dan Selisih Nilai Indeks Pembangunan TIK Provinsi Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta (IP-TIK Tertinggi), dan Papua (IP-TIK Terendah), 2017-2022	31
Gambar 3.4. Subindeks Akses dan Infrastruktur Tertinggi dan Terendah (Provinsi di Indonesia) serta Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022	32
Gambar 3.5. Subindeks Penggunaan Tertinggi dan Terendah (Provinsi di Indonesia) serta Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022	33
Gambar 3.6. Subindeks Keahlian Tertinggi dan Terendah (Provinsi di Indonesia) serta Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022	34
II. Perkembangan Kesejahteraan Rakyat	47
Gambar 1. Rasio Jenis Kelamin Indonesia dan Pulau-Pulau di Sulawesi, 2022	50
Gambar 2. Angka Kelahiran Hasil Long Form SP2020 Menurut Kelompok Umur Ibu, Tahun 2022	51

Gambar 3.	Persentase Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup (sejak 1 Januari 2021) oleh Perempuan Pernah Kawin Berumur 10-54 Tahun (Persen) di Sulawesi Tenggara, 2022	52
Gambar 4.	Angka Kematian bayi, Angka Kematian Anak, dan Angka Kematian Balita (2017-2022)	52
Gambar 5.	Angka Kematian Bayi, Tahun 1997, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012, 2017, 2022	54
Gambar 6.	Angka Kesakitan (dalam persen), 2021-2022	55
Gambar 7.	Persentase Balita Menurut status Gizi 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia	59
Gambar 8.	Proporsi Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran (000 Rp), 2018-2022	80
Gambar 9.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018, 2019, dan 2020 ...	93
Gambar 10.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2019, 2020, dan 2021	94



Kajian Tematik:
Pembangunan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya
Terhadap Ketimpangan Pendapatan di
Sulawesi Tenggara

1. Pendahuluan

Peran Penting TIK dalam Pembangunan di Indonesia, Termasuk Sulawesi Tenggara

Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information Communication Technology* atau ICT merupakan teknologi yang dalam arti luas berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Namun secara sederhana fokus utama TIK mengacu pada teknologi komunikasi, seperti internet, jaringan nirkabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya. TIK merupakan katalis dalam perkembangan sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus berperan sebagai *game changer* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah melakukan investasi di bidang TIK yang cukup besar. Pemerintah menyadari Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dengan luas wilayah yang sangat besar sehingga memerlukan TIK sebagai sarana mempersatukan sekaligus mengurangi jarak tersebut.

Peran TIK terhadap pembangunan sangat bervariasi tergantung perspektif atau paradigma dari pembangunan itu sendiri. Secara umum, pemahaman mengenai konsep pembangunan dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu modernisasi, *dependency* atau ketergantungan dan pembangunan manusia. Pada perspektif yang pertama yaitu perspektif modernisasi, pada perspektif modernisasi menganggap bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses modernisasi. Pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang adalah dengan mencontoh negara-negara maju seperti memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan ketersediaan modal dan tenaga kerja terampil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pada perspektif pembangunan ini Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) tidak hanya berperan sebagai katalis, melainkan memainkan peran utama dalam membantu negara-negara dalam mengakselerasikan pembangunan di negaranya masing-masing.

Perspektif pembangunan berikutnya adalah perspektif *dependency* atau ketergantungan. Pada perspektif ini menganggap bahwa pembangunan di suatu negara kurang berkembang sangat bergantung pada negara maju. Pada negara kurang berkembang akan "dipaksa" untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki dan mengarahkan perekonomian negaranya ke arah yang lebih menguntungkan negara maju tersebut. Pada perspektif pembangunan ini, TIK hanya dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dan demi keuntungan negara maju itu sendiri tanpa melihat apakah menguntungkan negara kurang berkembang tersebut.

Perspektif pembangunan yang ketiga adalah perspektif pembangunan manusia. Pada perspektif pembangunan ini lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Pembangunan manusia juga memandang bagaimana manusia dapat memperluas pilihan-pilihan pada hidupnya (*enlarging people's choices*). Dalam hal ini, TIK dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan manusia dalam memperluas pilihan-pilihan tersebut.

Dari berbagai perspektif pembangunan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pergeseran paradigma mengenai TIK. Pada awalnya TIK dianggap hanya sebagai pendukung (*support*) dan kini TIK dianggap sebagai pemungkin (*enabler*) dalam pembangunan. Hal ini semakin menegaskan TIK memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan TIK di Indonesia, Termasuk Sulawesi Tenggara

Indonesia memiliki luas lautan lebih besar daripada daratan menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dimana Indonesia memiliki begitu banyak pulau yang terbentang mulai dari Sabang diujung utara Pulau Sumatera hingga Merauke di Papua. Masing-masing pulau di Indonesia memiliki karakteristik dan topografinya yang berbeda-beda (termasuk Pulau Sulawesi), dari wilayah perkotaan, perdesaan, hutan, pegunungan, lembah, perbukitan sampai dengan daerah yang terpencil atau yang dikenal dengan istilah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Karakteristik tersebut membuat pembangunan infrastruktur terkait TIK menjadi sangat mahal dan menantang.

Inisiasi awal dimulai sejak tahun 1997, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membangun infrastruktur TIK yang dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah yang belum tercakup operator atau provider swasta. Pada awalnya, proyek pembangunan TIK diberi nama Nusantara 21. Nusantara 21 merupakan integrasi infrastruktur jaringan di Indonesia dengan menggunakan satelit, kabel fiber optik, kabel televisi, seluler dan teknologi penyiaran untuk meningkatkan cakupan telekomunikasi di 300 kecamatan seluruh Indonesia. Akan tetapi proyek tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya krisis moneter. Kemudian pada even *Infrastructure Summit I* pada tahun 2015, wacana pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut kembali dibahas dan didengungkan berupa Cincin Serat Optik Nasional (CSON). CSON merupakan sebuah proyek pembangunan infrastruktur TIK yang berfungsi sebagai tulang punggung atau *backbone* bagi sistem pertelekomunikasian nasional. Jaringan ini merupakan kabel serat optik atau *fibre optic* yang menghubungkan seluruh kepulauan di Nusantara dan berbentuk cincin terintegrasi atau *integrated ring shape*. Jaringan ini juga kerap disebut dengan Jaringan Palapa Ring.

Jaringan Palapa Ring terbentang di Kepulauan Indonesia yang mengelilingi dari mulai Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku sampai dengan Papua, serta memiliki sebuah *backhaul* yang menghubungkan semua cincin di tiap Pulau. Menurut data Kemenkominfo, panjang jaringan Palapa Ring ini pada tahun 2019 telah mencapai 117.786 km untuk kabel bawah laut atau *undersea* dan 224.453 km untuk kabel di daratan atau *inland*. Jaringan ini juga akan terhubung dengan negara tetangga seperti Australia, Filipina, dan Malaysia.

Dengan keberadaan Palapa Ring, jaringan ini diharapkan akan menjadi tumpuan bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia serta terintegrasi dengan jaringan yang telah ada. “Kedaulatan Negara” dan “Ketahanan Nasional” diharapkan bisa terwujud melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi ini. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu diharapkan bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, pemerintah juga menyelaraskannya dengan program pelatihan SDM digital (*Digital Talent*) untuk meningkatkan kompetensi SDM digital, Program 1000 *Startup* Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Program UMKM *Go Online* yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri *onboard* ke *marketplace*, dan Program Petani Nelayan *Go Online* yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi.

Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, pemerintah juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Momentum Pandemi Covid-19 Terhadap Adopsi TIK di Indonesia, Termasuk Sulawesi Tenggara

Merebaknya pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 telah mendorong adopsi TIK yang cepat dan masif sehingga transformasi digital secara nasional menjadi semakin tidak terelakan. Pada saat masyarakat melakukan adaptasi pola kebiasaan baru atau *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang handal menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pada saat itu potensi untuk terjadinya resesi ekonomi sudah nampak di depan mata mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan

ekonomi akibat dampak pandemi. Hal ini akan berimbas pada para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi yang dipaksa untuk mengadopsi TIK dan bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi.

Transformasi digital tersebut sangat memengaruhi gaya berjualan yang dilakukan pelaku usaha yang tadinya berjualan secara konvensional hingga menimbulkan strategi baru dalam berbisnis. Pada akhirnya terbentuk kebiasaan baru dalam melakukan transaksi bisnis, seperti berbelanja secara *online*, pembayaran menggunakan dompet digital, mengiklankan produk di media sosial dan lain sebagainya. Perubahan masyarakat ke arah digitalisasi tersebut menimbulkan kebiasaan baru sehingga menjadi budaya digital (*digital culture*). *Digital culture* merupakan prasyarat menuju transformasi digital karena menerapkan budaya digital berarti mengubah pola pikir (*mindset*) supaya dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus dapat memanfaatkan momentum pandemi *COVID-19* dan melakukan terobosan sebagai upaya nyata untuk mengakselerasi perekonomian dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu:

- Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
- Mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis;
- Mempercepat integrasi pusat data nasional;
- Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital;
- Serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Lima langkah percepatan agenda transformasi digital nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut menjadi dasar bagi pemerintah mengembangkan *roadmap* Indonesia Digital. Untuk mewujudkan transformasi digital nasional tersebut, dibutuhkan peran nyata baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/ lembaga terkait maupun seluruh lapisan masyarakat yang secara holistik untuk mendukung mewujudkan agenda transformasi digital nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tersebut.

Tujuan

Analisis Inkesra Tematik “Kajian Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketenagakerjaan dan Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara” ditujukan untuk mengetahui gambaran tentang kondisi pembangunan TIK dan kesenjangannya antar wilayah di Indonesia. Selain itu, Kajian Inkesra Tematik juga bertujuan untuk melihat dampak pembangunan TIK

terhadap ketenagakerjaan dan ketimpangan pendapatan. Berkaitan dengan situasi pandemi *Covid-19* saat ini, maka kajian ini juga menambahkan pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap tingkat adopsi masyarakat terhadap TIK.

Ruang Lingkup

Analisis Inkesra Tematik “Kajian Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara” ini menyajikan data dan informasi tahun 2022, kecuali uji formal regresi terhadap dampak pembangunan TIK terhadap ketimpangan pendapatan yang menggunakan rentang waktu tahun 2018-2022. Penyajian data dan informasi analisis digambarkan kondisi regional (Pulau Sulawesi), Sulawesi Tenggara, dan disagregasi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat regional dan Sulawesi Tenggara, disajikan secara series dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Namun ada beberapa yang tidak seragam seriesnya, disesuaikan dengan kondisi ketersediaan dari sumber datanya, terutama data yang berasal dari luar BPS.

Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk mendukung analisis Inkesra Tematik “Kajian Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara” bersumber dari hasil survei internal BPS dan luar BPS. Sumber data dari BPS menggunakan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Sebagian besar datanya dikutip dari publikasi yang telah diterbitkan BPS. Sementara data dan informasi dari luar BPS bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta sumber-sumber lain seperti studi literatur hasil kajian, penelitian terkait TIK, dan lain-lain.

2. Perkembangan Pembangunan TIK (*ICT Development Progress*)

Perkembangan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut perkembangan pada berbagai bidang, salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu bidang yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi atau dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Tanpa adanya teknologi informasi yang mumpuni, kemungkinan perkembangan yang terjadi tidak akan semaju saat ini. Teknologi informasi yang merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dapat merubah sesuatu dengan cepat. Gabungan aspek teknologi informasi dengan aspek teknologi komunikasi menjadi teknologi informasi dan komunikasi (Darmawan, 2013). Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini semakin memudahkan penyelesaian dalam berbagai permasalahan. TIK memungkinkan penduduk untuk saling terhubung dan berkomunikasi serta menawarkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien jika mampu memanfaatkan TIK secara optimal.

Berdasarkan temuan pada *White Book Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation* yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Desember 2019, pemanfaatan TIK secara optimal dapat membantu suatu negara mengakselerasi pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals/SDGs*). Penguasaan teknologi digital berpengaruh sebesar 89 persen pada kinerja sebuah negara dalam memenuhi target SDGs. Sebaliknya, negara yang belum memiliki penguasaan teknologi digital yang mumpuni akan kesulitan mencapai poin-poin dalam SDGs (ekonomi.bisnis.com, 2019). Untuk mewujudkan SDGs, saat ini pemerintah tengah membangun tiga layer infrastruktur, aplikasi dan literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (www.kominfo.go.id, 2020).

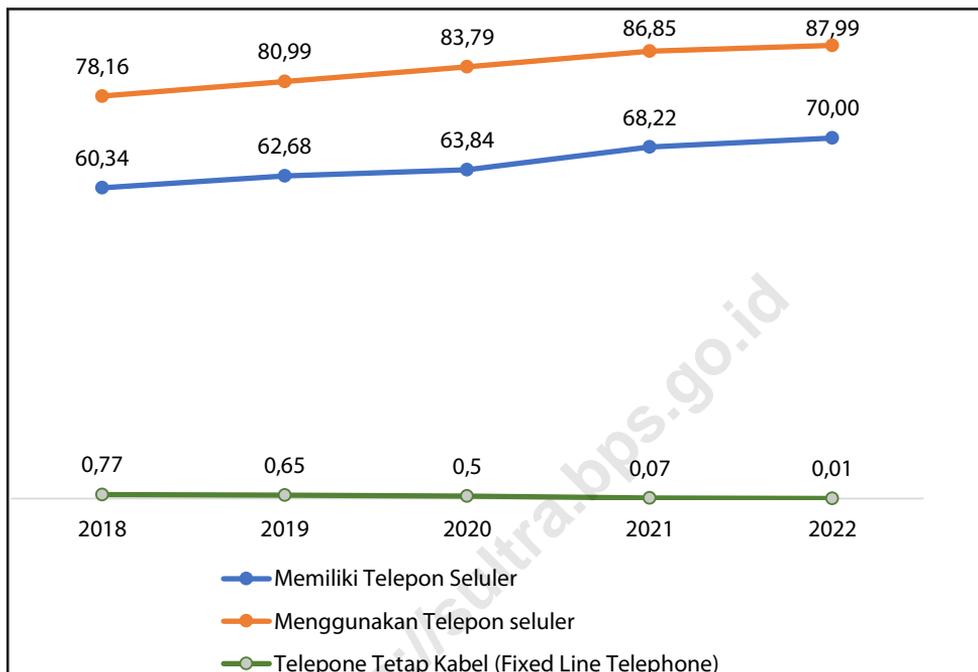
Pandemi *Covid-19* yang mewabah di seluruh dunia sejak 2020 telah mengubah tatanan segala aspek kehidupan terutama penggunaan TIK. Kondisi pandemi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk melakukan langkah adaptasi. Pandemi *Covid-19* telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif menggunakan teknologi digital. Penduduk yang terbiasa bersosialisasi fisik jarak dekat berubah menjadi komunikasi jarak jauh dengan menggunakan TIK. Sektor TIK juga sangat membantu banyak sektor lain dalam menjalankan kegiatannya selama pandemi. Hal ini yang menjadikan alasan sektor industri teknologi informasi dan komunikasi tetap eksis di tengah pandemi, sementara sektor lain sempat mengalami keterpurukan. Bahkan, di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor ekonomi, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Penggunaan Telepon Seluler Menggeser Telepon Rumah

Perkembangan TIK di Sulawesi Tenggara khususnya industri telekomunikasi selama beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan terjadinya pergeseran dari penggunaan telepon tetap kabel (telepon rumah) menjadi penggunaan telepon seluler. Kebutuhan akan perangkat TIK seperti telepon genggam (HP) dan komputer (PC/Laptop/Notebook/ Tablet) serta internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Salah satu perkembangan teknologi yang pesat perkembangannya adalah perkembangan piranti telekomunikasi nirkabel atau telepon seluler (HP). Menurut data Susenas, penduduk yang memiliki telepon seluler mengalami peningkatan dari 60,34 persen pada tahun 2018 menjadi 70 persen pada tahun 2022. Seiring peningkatan kepemilikan telepon seluler, penduduk yang menggunakan telepon seluler juga meningkat signifikan dari 78,16 persen pada tahun 2018 menjadi 87,99 persen pada tahun 2022. Peningkatan pengguna telepon seluler tersebut berkaitan dengan semakin canggih manfaat telepon seluler, sehingga menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di era modern seperti sekarang ini. Saat ini telepon seluler bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi memiliki fungsi yang lebih kompleks. Telepon seluler dapat digunakan untuk mengabadikan foto, email, berbelanja online, sarana bekerja, dompet digital, transaksi perbankan, dan lain-lain. Sehingga tidak mengherankan jika kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar sangat bergantung pada telepon seluler. Bertambahnya pengguna telepon seluler juga tidak terlepas dari meluasnya cakupan sinyal dan jaringan seluler (lokadata. id, 2022).

Berbanding terbalik dengan perkembangan kepemilikan telepon seluler yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kepemilikan telepon rumah justru mengalami tren yang semakin menurun. Pada tahun 2022, rumah tangga yang memiliki telepon rumah tercatat hanya 0,01 persen, menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 0,77 persen. Penggunaan internet, pertumbuhan warung internet, serta penetrasi teknologi digital telah memengaruhi masyarakat secara signifikan. Jumlah sambungan telepon wartel banyak ditinggalkan dan berkurang karena perkembangan zaman. Hal inilah yang mempengaruhi pergeseran teknologi dari telepon kabel (telepon rumah) menjadi telepon tanpa kabel (telepon seluler).

Gambar 2.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah di Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Catatan:

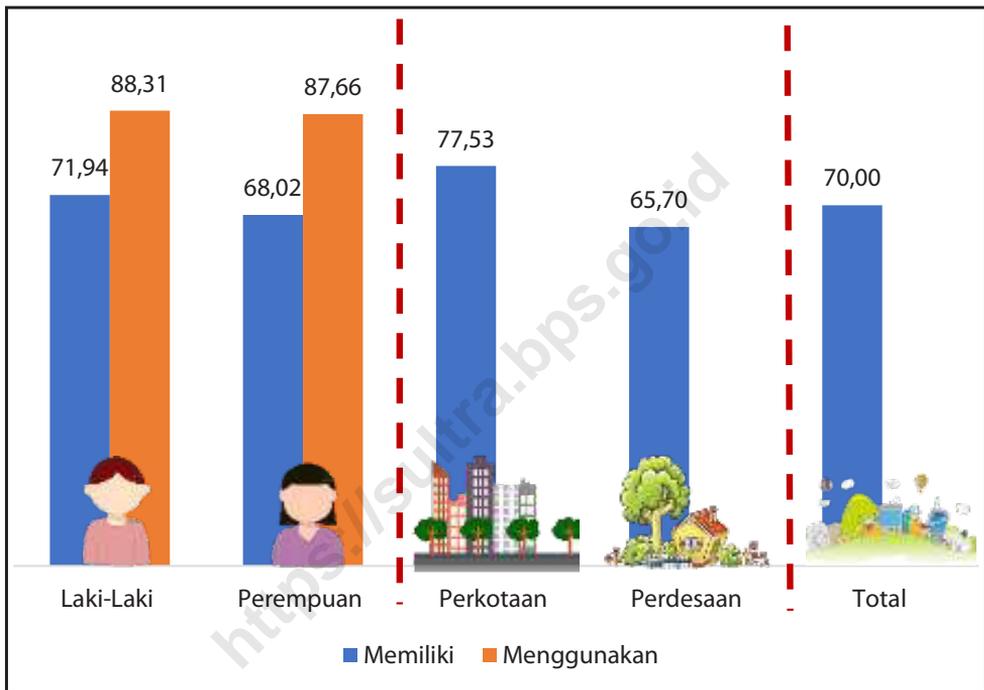
1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir
2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir
3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah/PSTN

Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2022, penduduk yang merupakan pemilik telepon seluler yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 77,53 persen (pemilik). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilik (65,70 persen) telepon seluler di daerah perdesaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kesiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung telepon seluler antara daerah perkotaan dan perdesaan dimana daerah perkotaan memiliki fasilitas infrastruktur pendukung yang lebih lengkap. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak yang memiliki telepon seluler dibandingkan perempuan. Sekitar 71,94 persen penduduk laki-laki di Sulawesi Tenggara sudah memiliki telepon seluler, sementara penduduk perempuan hanya 68,02 persen, terpaut sekitar 3,92 persen poin.

Demikian juga dengan yang menggunakan, penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler mencapai sekitar 88,31 persen, sedangkan penduduk perempuan sekitar 87,66 persen.

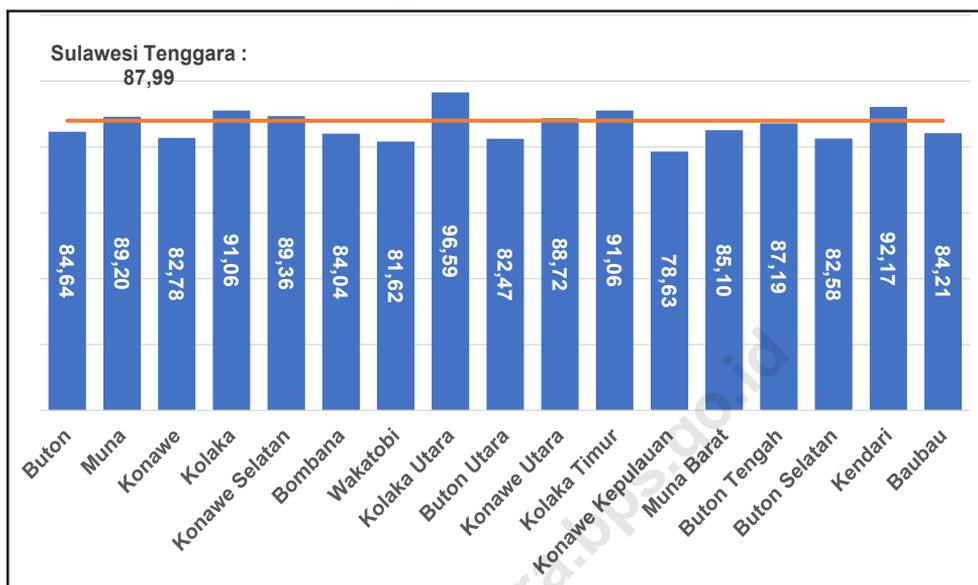
Gambar 2.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tahun 2022, penduduk yang menggunakan telepon seluler di seluruh kabupaten/kota rata-rata sudah di atas 80 persen kecuali Kabupaten Konawe Kepulauan. Penduduk yang menggunakan telepon seluler di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya sebesar 78,63 persen, sehingga Konawe Kepulauan menjadi kabupaten dengan persentase yang menggunakan telepon seluler terendah. Masih rendahnya pengguna telepon seluler di kabupaten tersebut disebabkan masih kurangnya infrastruktur untuk mendukung penggunaan telepon seluler, misalnya ketersediaan *Base Transceiver Station* (BTS) yang belum merata di tiap-tiap daerah. Sementara Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka merupakan kabupaten/kota dengan jumlah pengguna telepon seluler tertinggi, masing-masing sudah lebih dari 90 persen.

Gambar 2.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

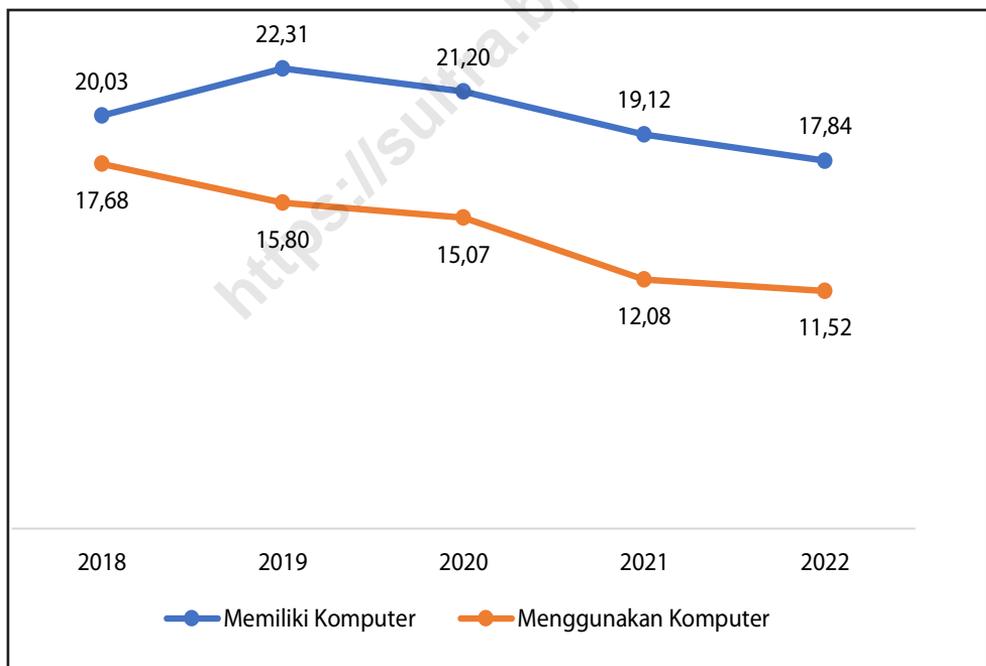
Masih Terjadi Kesenjangan Penggunaan Komputer/Laptop antara Penduduk di Daerah Perkotaan Maupun Perdesaan

Perkembangan teknologi informasi berawal dari penemuan komputer, kemudian berkembang lebih maju lagi menjadi laptop bahkan tablet. Penggunaan komputer pada awalnya hanya sekedar untuk menulis, membuat grafik dan gambar, serta alat menyimpan data. Penemuan internet menjadikan pemanfaatan dan penggunaan komputer semakin berkembang lagi menjadi alat komunikasi dengan jaringan yang lunak dan bisa menjangkau lapisan masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer/laptop, terutama ketika pandemi Covid-19 terjadi, seluruh aktivitas beralih menjadi serba online dan memerlukan perangkat komputer/ laptop.

Perangkat komputer/laptop yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Namun, sejak tahun 2018 kepemilikan komputer/laptop dalam rumah tangga cenderung menurun dari tahun ke tahun, meskipun penurunannya hanya sekitar satu persen poin. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memiliki komputer/laptop sekitar 20,03 persen, kemudian turun menjadi sekitar 17,84 persen pada tahun 2022 (Gambar 2.4). Pada tahun 2019 kepemilikan komputer sempat meningkat sekitar 2,28 persen poin, menjadi 22,31 persen. Pada

periode yang sama, penurunan kepemilikan rumah tangga terhadap komputer/laptop diiringi oleh penurunan penduduk yang menggunakan komputer/laptop, bahkan lebih signifikan. Pada tahun 2018 penduduk yang menggunakan komputer/laptop masih sekitar 17,68 persen, tetapi pada tahun 2022 turun drastis menjadi 11,52 persen, atau turun sekitar 6,16 persen poin. Pengguna komputer/laptop semakin berkurang karena tergeser oleh perangkat canggih telepon seluler (telepon genggam) terutama yg berupa ponsel pintar (smartphone). Sesuatu yg biasanya hanya dapat dilakukan di depan komputer/laptop, sekarang dapat dilakukan di telepon seluler. Kemudahan akses dan sifatnya yg mobile menjadi daya tarik bagi pengguna untuk melakukan kegiatan yang diinginkan dengan menggunakan telepon seluler. Semakin mudahnya akses internet melalui berbagai media, seperti penggunaan teknologi wireless fidelity (wifi) atau hotspot melalui fasilitas di kantor dan sekolah, serta akses internet melalui telepon seluler juga menjadi penyebab penurunan penggunaan komputer/laptop.

Gambar 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop dan Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir di Sulawesi Tenggara, 2018-2022

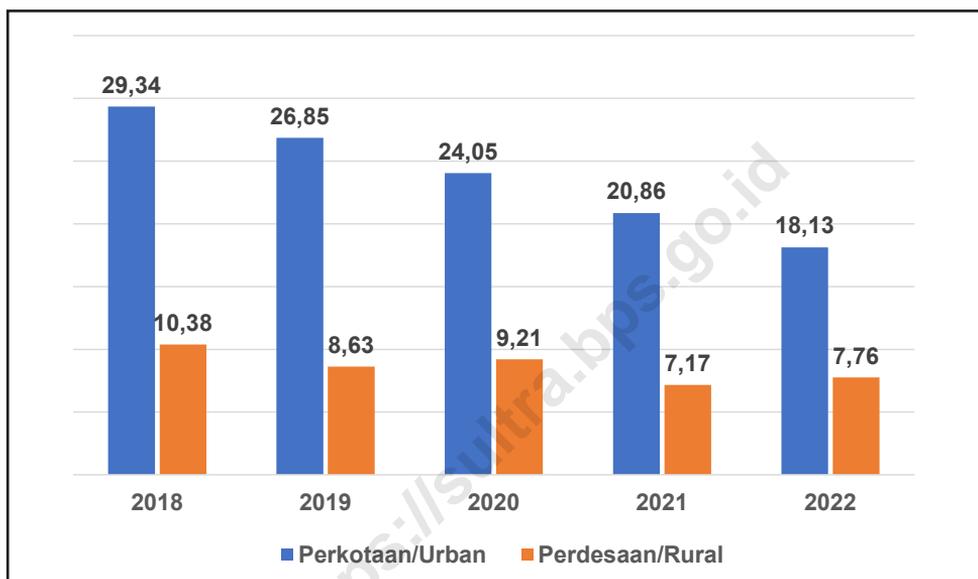


Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Penggunaan komputer/laptop merupakan salah satu bagian dari TIK dan sudah digunakan oleh masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Masih terjadi kesenjangan penggunaan komputer/laptop antara penduduk di daerah perkotaan maupun perdesaan, di mana penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi persentasenya

dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Namun, selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 kesenjangan antara penduduk pengguna komputer/laptop yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan menurun dari 18,96 persen poin menjadi 10,37 persen poin (Gambar 2.5).

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2018-2022

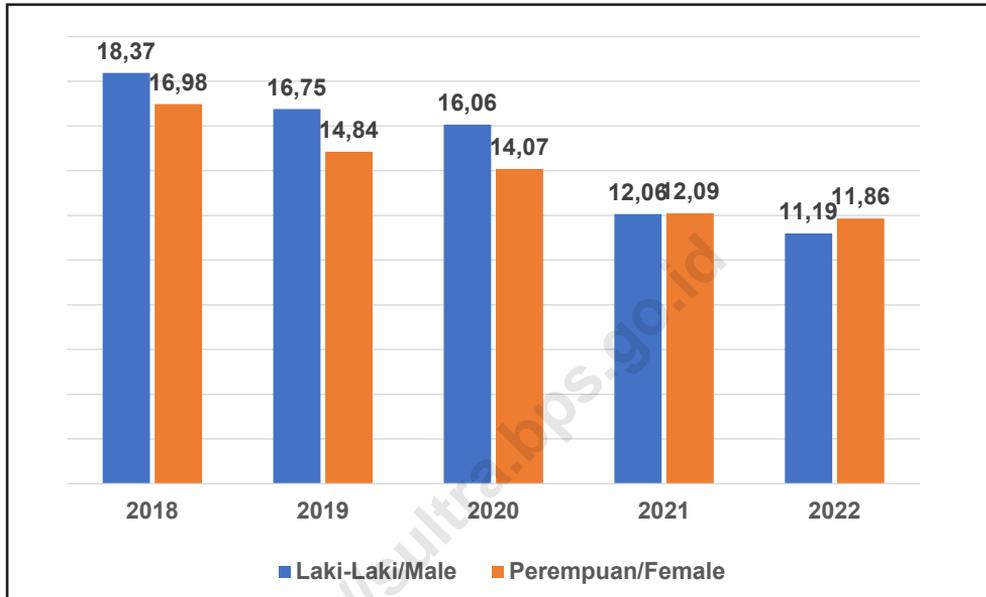


Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara persentase tidak terlihat perbedaan yang nyata antara pengguna komputer/laptop penduduk laki-laki dan perempuan. Pada gambar 2.6, tampak bahwa pada tahun 2018 perbedaan pengguna komputer/laptop antara laki-laki dan perempuan sebesar 1,39 persen poin, kondisi ini berbanding terbalik pada tahun 2022 dimana pengguna perempuan lebih besar daripada laki-laki dengan selisih 0,67 persen poin. Menurut Daniel (2005), perbedaan yang tidak nyata antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam hal penggunaan komputer tersebut karena antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kompetensi dalam hal penggunaan komputer, namun yang membedakan antara keduanya adalah tujuan

dari penggunaan komputer tersebut.

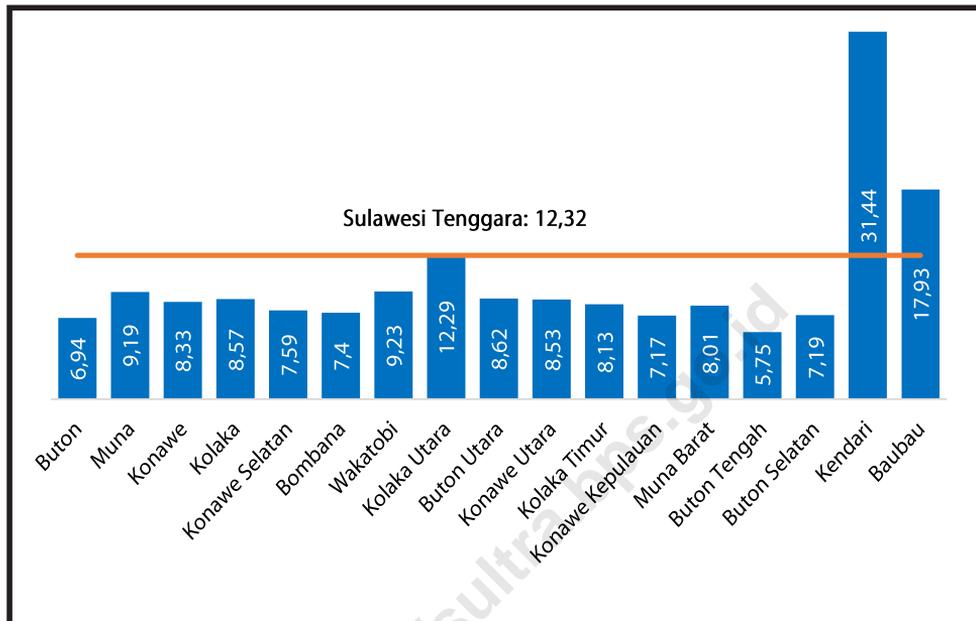
Gambar 2.6. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota (Gambar 2.7), tiga terbesar penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 yang menggunakan komputer/laptop masing-masing tinggal di Kota Kendari sebesar 31,44 persen, Kabupaten Baubau sebesar 17,93 persen, dan Kabupaten Kolaka Utara 12,29 persen. Persentase Kota Kendari dan Kabupaten Baubau lebih besar jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang menggunakan komputer/laptop secara umum di Sulawesi Tenggara, hanya sebesar 12,32 persen. Sementara itu, wilayah dengan persentase penduduk yang menggunakan komputer/laptop paling rendah adalah Buton Tengah, yakni 5,75 persen.

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer/Laptop dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

Media Sosial/Jejaring Sosial Menjadi Tujuan Utama Masyarakat Indonesia Mengakses Internet

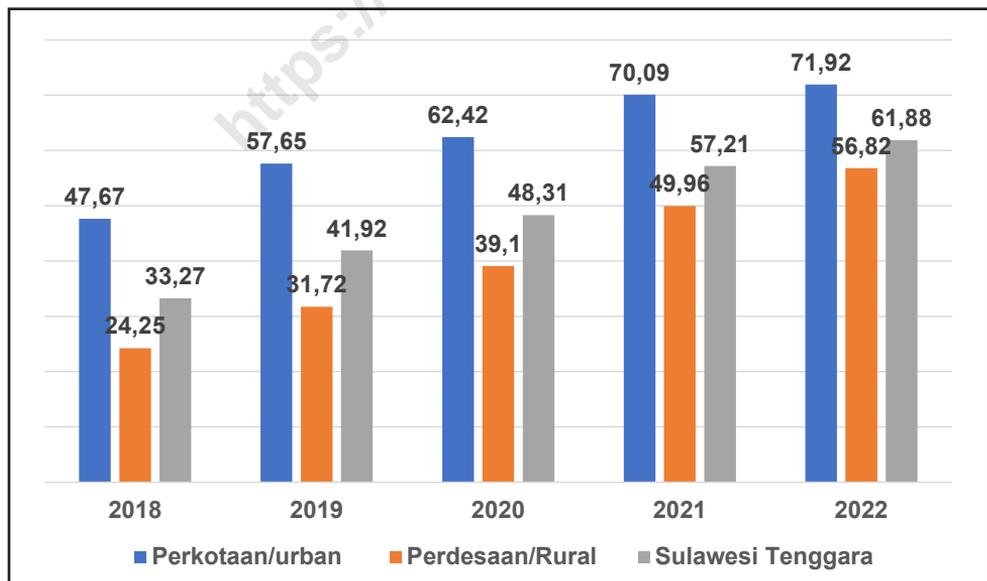
Kehidupan manusia modern di era serba digital seperti sekarang ini sudah sangat lekat dengan internet. Hampir seluruh penduduk di dunia dari berbagai kalangan usia sangat akrab dengan internet. Internet mampu menghubungkan manusia di seluruh dunia tanpa harus saling berkunjung. Manusia juga mendapatkan bermacam informasi dari seluruh dunia hanya dengan bermodalkan internet. Internet memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja.

Internet berasal dari kata *interconnection-networking*, merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite (TCP/IP)* untuk melayani penggunaanya di seluruh dunia. Dari sisi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Sementara dari sisi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam lingkungan perkantoran, tempat pendidikan, ataupun instansi terkait (Siti & Nurizzati, 2018). Menurut Mc Keown (2010), internet adalah

sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia. Sehingga teknologi internet adalah suatu teknologi untuk mengolah data yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan lebih informasi atau data baik berupa grafik audio dalam bentuk media elektronik yang dapat diinformasikan sebagai sumber belajar untuk proses belajar.

Pertama kali internet muncul di Indonesia pada tahun 1994 dengan nama Paguyuban Network (cnbcindonesia.com, 2022). Saat ini internet sudah berkembang pesat, banyak negara berlomba-lomba untuk memenuhi dan memperluas jangkauan internet menggunakan satelit. Banyak manfaat yang bisa diambil dari keberadaan internet, di antaranya : sebagai sumber berbagai informasi, sarana edukasi dan budaya, mendapatkan hiburan (*game online*, film, youtube, konten-konten di media sosial), dan sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Sebaliknya disamping manfaat, dampak negatif kehadiran internet juga ada, misalnya *screen time*. *Screen time* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan waktu yang digunakan untuk menatap layar elektronik, baik itu televisi, komputer, ponsel pintar, tablet digital, hingga permainan video. *Screen time* melanda masyarakat pada semua usia. Masyarakat sekarang lebih banyak berinteraksi dengan gadget dibandingkan dengan keluarga.

Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2018-2022



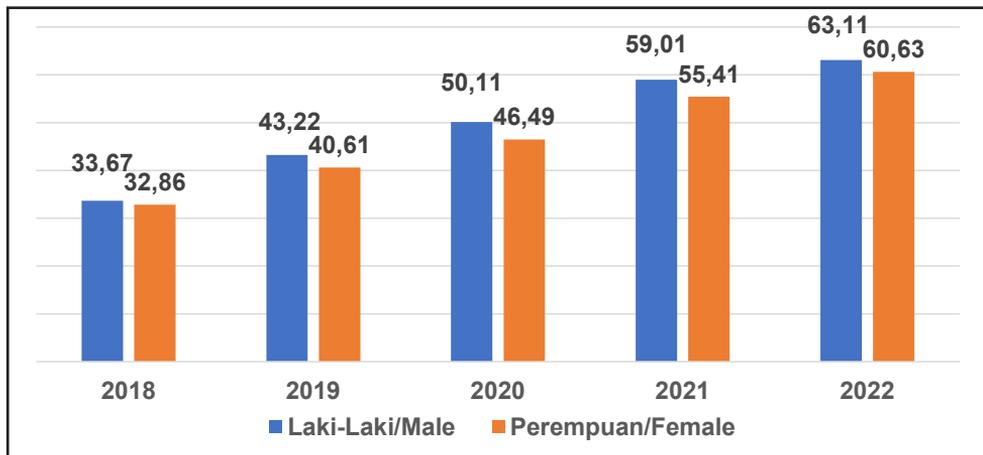
Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Perkembangan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengakses internet mengalami peningkatan setiap tahun secara signifikan (Gambar 2.8). Hal ini

karena keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 penduduk yang mengakses internet sebesar 33,27 persen. Pada tahun-tahun berikutnya persentasenya selalu meningkat hingga mencapai 61,88 persen pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022 tersebut rata-rata penduduk yang mengakses internet tumbuh sekitar 7,15 persen poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 8,90 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi *Covid-19* menjadi penyebab tingginya penduduk yang mengakses internet pada tahun 2021. Pandemi *Covid-19* telah mengubah pola hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat dipaksa beradaptasi dengan teknologi digital dalam berkomunikasi secara *online*. Dampak positifnya, Sektor Industri TIK tetap eksis menjaga pertumbuhan ekonomi selama pandemi berlangsung di saat sektor-sektor lain terpuruk.

Perkembangan TIK di Indonesia tidak saja merambah di daerah perkotaan, namun juga sudah merambah ke daerah pedesaan. TIK telah menghilangkan batas-batas jarak, perbedaan waktu, lokasi, serta kemajemukan karakteristik penduduk. Meskipun kesenjangan antara penduduk yang mengakses internet di daerah perkotaan dan penduduk yang tinggal di pedesaan masih cukup tinggi yaitu sekitar 15,10 persen poin pada tahun 2022, namun kecepatan pertumbuhannya hampir sama. Penduduk yang mengakses internet di perkotaan meningkat dari 47,67 persen pada tahun 2018 menjadi 71,92 persen pada tahun 2022, demikian juga dengan penduduk di pedesaan meningkat dari 24,25 persen menjadi 56,82 persen pada periode yang sama. Kesenjangan akses internet antara penduduk perkotaan dengan penduduk pedesaan umumnya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur. Penduduk pedesaan juga biasanya memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan lebih rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses produk teknologi (Global Connectivity Report 2022).

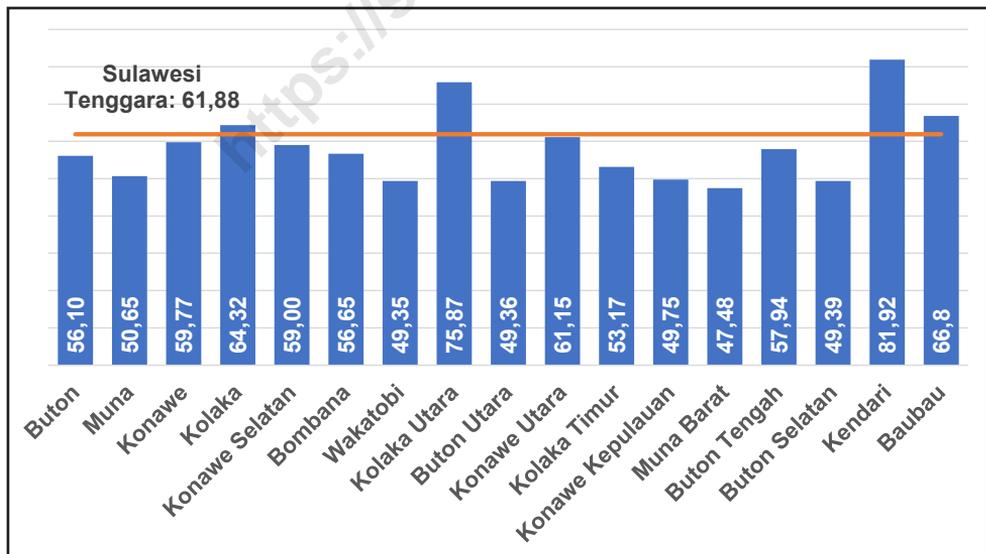
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengakses internet sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Namun dalam perkembangannya, baik penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan yang hampir sama dalam mengakses internet setiap tahunnya selama tahun 2018-2022. Menurut riset yang dilakukan Google tahun 2019 pada beberapa negara (termasuk Indonesia), dengan bertajuk *Toward Gender Equity Online*, ada 4 alasan pengguna internet laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu pertama; karena tanggung jawab perempuan lebih banyak, maka waktu mengakses internet menjadi lebih sedikit. Kedua; kesempatan perempuan dalam menemukan, membuat, dan membagikan konten yang relevan. Meskipun ada banyak konten dan komunitas seperti blog, video, audio, media sosial, tetapi perempuan kesulitan menemukan konten yang relevan. Ketiga; privasi, apakah perempuan dapat mengendalikan identitas *online* dan *offline* mereka. Keempat; mengenai keamanan, banyak wanita yang memberikan pernyataan mengalami atau mendengar seseorang yang melakukan pelecehan di ruang digital. Solusinya, kegiatan literasi digital yang bertujuan meningkatkan pengetahuan teknologi digital bagi perempuan sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Gambar 2.10. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

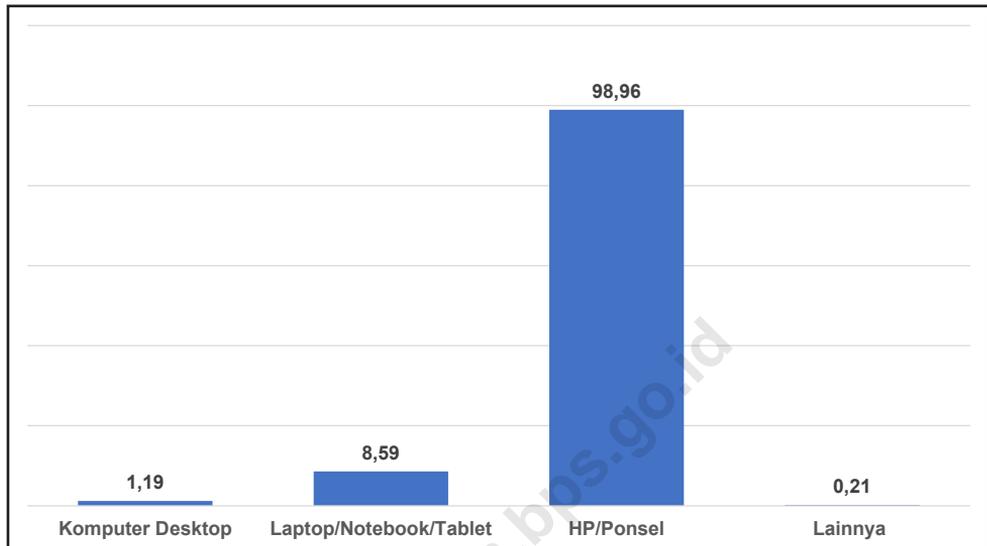
Gambar 2.10 memperlihatkan persentase penduduk yang mengakses internet menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Menurut data Susenas, penduduk yang mengakses internet terbanyak berada di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka Utara, masing-masing sebesar 81,92 persen dan 75,87 persen. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan penduduk yang mengakses internet terendah adalah Kabupaten Muna Barat (47,48 persen), Buton Utara (49,36 persen) dan Kabupaten Buton Selatan (49,39 persen). Ketersediaan infrastruktur pendukung dan letak geografis suatu wilayah merupakan faktor yang mempengaruhi penduduk dalam mengakses internet. Sebagai negara kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan infrastruktur TIK untuk interkoneksi antar pulau dan antar daerah. Namun masih banyak wilayah yang belum maksimal tersentuh infrastruktur TIK terutama Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Wilayah Timur Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat luasnya wilayah Indonesia. Ketidakmerataan infrastruktur ini dapat menimbulkan kesenjangan digital. Secara sederhana kesenjangan digital dapat dipahami sebagai perbedaan akses terhadap TIK.

Beberapa program prioritas yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2022 di antaranya adalah infrastruktur dan mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki era transformasi digital. Hampir semua program yang dimiliki Kemenkominfo merupakan prioritas, misalnya infrastruktur digital seperti satelit dan penyediaan akses internet untuk fasilitas publik masyarakat. Pada saat bersamaan harus dilakukan peningkatan kemampuan digital bagi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia mulai dari tingkat dasar hingga atas. Di tingkat dasar berupa gerakan literasi digital, tingkat menengah ada *digital talent scholarship*, dan tingkat atas ada *digital leadership academy*.

Media dan Lokasi Mengakses Internet

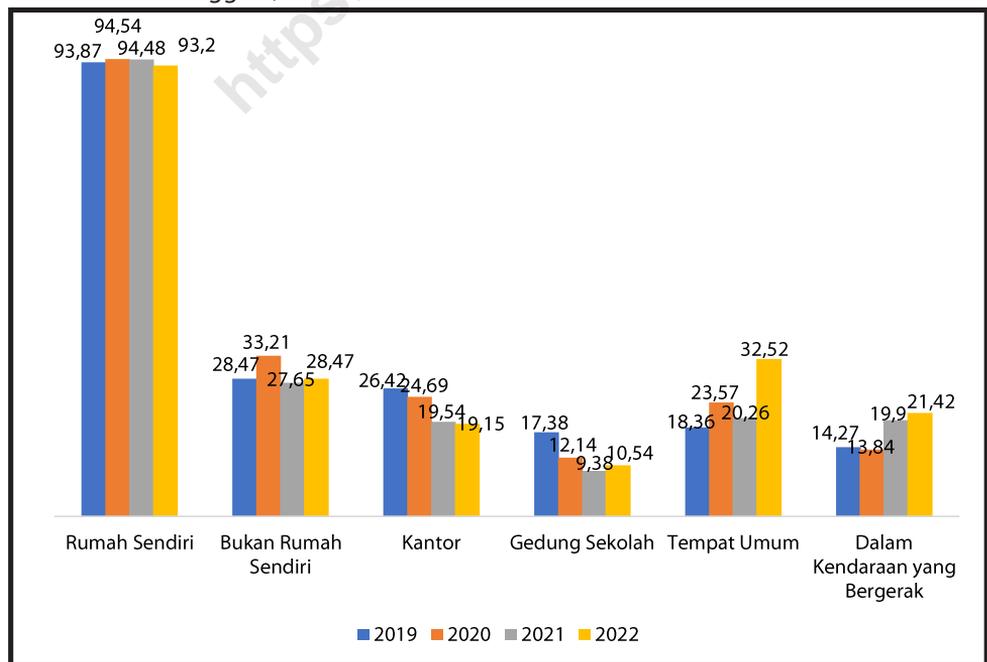
Internet saat ini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat karena kemudahan akses. Akses internet dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan. Kemajuan ini tidak terlepas dari pemanfaatan internet seluler yang semakin masif. Berdasarkan data Susenas 2022, sebesar 98,96 persen penduduk mengakses internet di mana saja menggunakan telepon seluler. Telepon seluler fleksibel digunakan baik di rumah maupun di luar rumah. Selebihnya penduduk biasa mengakses internet melalui laptop/notebook sebesar 8,59 persen dan komputer 1,19 persen (Gambar 2.11).

Gambar 2.11. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Media untuk Mengakses Internet di Sulawesi Tenggara, 2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

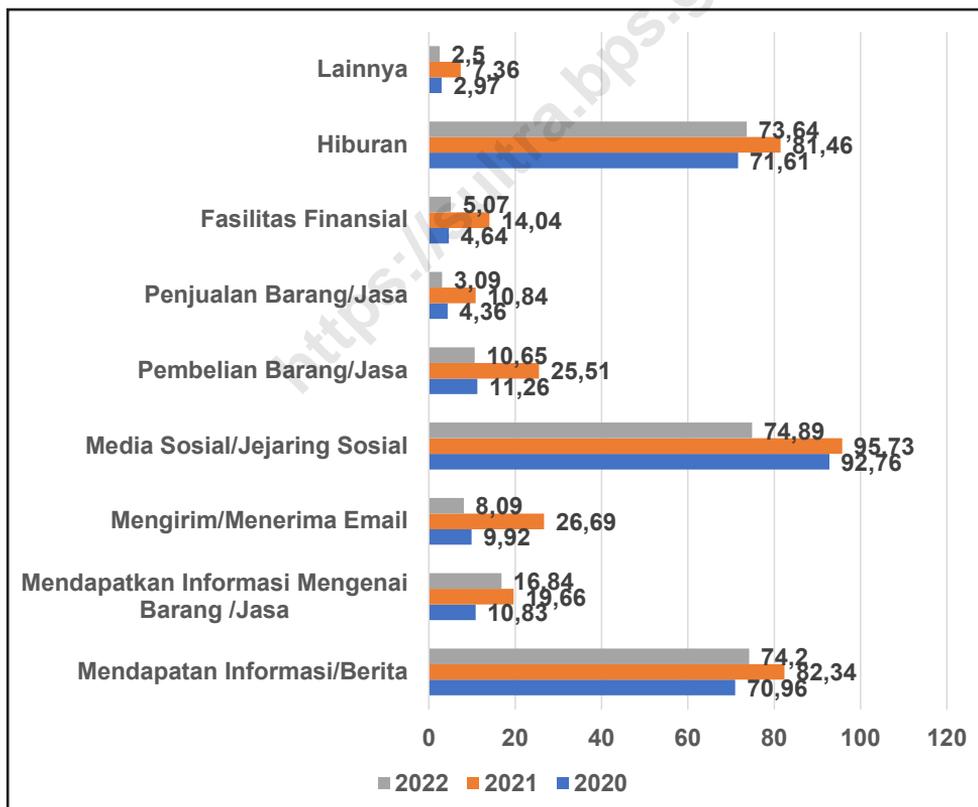
Gambar 2.12. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tempat Mengakses Internet di Sulawesi Tenggara, 2019-2022



Sumber: Susenas Maret, 2019-2022

Jika diamati berdasarkan lokasi mengakses internet, mayoritas penduduk mengakses internet dari rumah sendiri, yaitu sebanyak 93,20 persen pada tahun 2022 (Gambar 2.12). Selanjutnya sekitar 28,47 persen penduduk mengakses internet bukan rumah sendiri. Selebihnya di kantor/ tempat bekerja dan tempat umum masing-masing sekitar 19,15 persen, serta dari gedung sekolah/kampus sekitar 10,54 persen. Jika diamati perkembangan penduduk dalam mengakses internet selama tahun 2020-2021, terjadi penurunan yang signifikan pada akses di tempat umum. Penurunan tersebut disebabkan wabah pandemi *Covid-19* yang menuntut pembatasan bersosialisasi secara fisik. Penurunan juga terjadi pada akses internet di tempat kerja/kantor, gedung sekolah/ kampus, dan bukan rumah sendiri. Adapun pada tahun 2022, akses internet di tempat umum meningkat signifikan.

Gambar 2.13. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Mengakses Internet di Sulawesi Tenggara, 2020-2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

Pandemi *COVID-19* yang mewabah sejak Maret 2020 memaksa pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* untuk meminimalisir persebaran virus. Salah satu yang terkena dampaknya adalah di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon kebijakan tersebut dengan menerapkan proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran secara daring. Kebijakan pembelajaran daring ini memaksa pendidik dan siswa memanfaatkan teknologi informasi, sehingga berimbas pada peningkatan penggunaan internet. Menurut data Susenas, penduduk yang mengakses internet dengan tujuan mengirim/menerima email meningkat signifikan dari 9,92 persen pada tahun 2020 menjadi 26,69 persen pada tahun 2021. Peningkatan akses internet penduduk selama pandemi juga terjadi untuk tujuan pembelian dan penjualan barang/jasa, mendapatkan informasi/berita dan hiburan. Adapun pada tahun 2022, umumnya terjadi penurunan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (saat pencacahan) untuk semua tujuan mengakses internet.

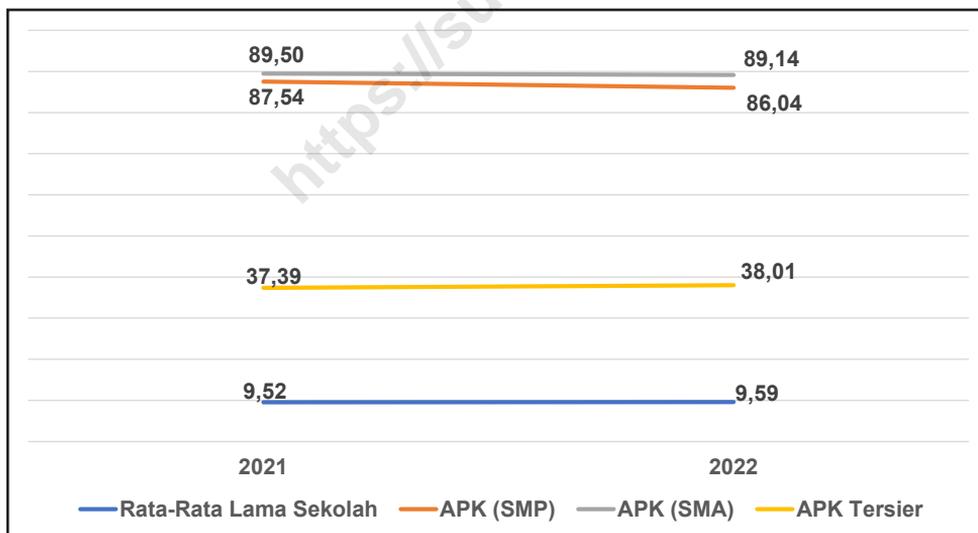
Indeks Literasi Digital di Sulawesi Tenggara 2022 Dalam Kategori Sedang, Namun Tertinggi di Pulau Sulawesi

Kehadiran internet membuka peradaban baru bagi manusia yang lebih maju, terutama di bidang TIK. Kemajuan teknologi berimplikasi pada kemudahan dan kecepatan penyampaian komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi yang baik mampu membantu mengembangkan sektor-sektor penting dalam kehidupan manusia, sehingga membawa peradaban yang lebih maju. Namun pada kenyataannya kemajuan TIK tidak sepenuhnya berdampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dampak positif diperoleh jika TIK digunakan sebagai sarana pembelajaran, inovasi, peningkatan produktivitas dan pendapatan, dan lain-lain. Sebaliknya dampak negatif apabila TIK dijadikan sebagai alat penyebar berita hoaks, sarana pembulian, dan kegiatan negatif lainnya.

Paparan bermacam informasi dari media menuntut seseorang dapat menyaring antara informasi yang bermanfaat atau tidak. Dibutuhkan kepandaian seseorang dalam memilah dan memilih informasi yang akan diakses. Pengetahuan tentang literasi digital sangat dibutuhkan sebagai modal memilah, meneliti, dan memanfaatkan informasi yang diperlukan tersebut. Literasi digital sangat dibutuhkan pada saat ini sebagai sarana edukasi dan advokasi bagi para pengguna internet, khususnya pengguna media sosial. Literasi Digital sangat berperan penting dalam menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif, sehingga seseorang tidak akan mudah tertipu dengan segala sesuatu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoaks. Penerapan literasi digital menjadikan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses teknologi.

Menurut UNESCO, literasi digital adalah kecakapan (life skills) yang tidak hanya melibatkan teknologi saja, tetapi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk kompetensi digital. Sementara Martin dalam Koltay (2011) menjelaskan bahwa literasi digital adalah kesadaran, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan menyintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, dan berkomunikasi dengan orang lain, dalam konteks situasi kehidupan tertentu, untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif; dan merenungkan rangkaian proses. Literasi digital dapat diterapkan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara umum. Di dalam dunia pendidikan, literasi digital sangat diperlukan agar tenaga pendidikan dan murid memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat komunikasi dan jaringannya. Beberapa poin penting untuk dapat memahami literasi digital antara lain; kecakapan (life skills) yang melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; kemampuan bersosialisasi; kemampuan dalam pembelajaran dan memiliki sikap; berpikir kritis-kreatif; serta inspiratif sebagai kompetensi digital.

Gambar 2.14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder, dan APK Tersier, 2019-2021 di Sulawesi Tenggara, 2021-2022



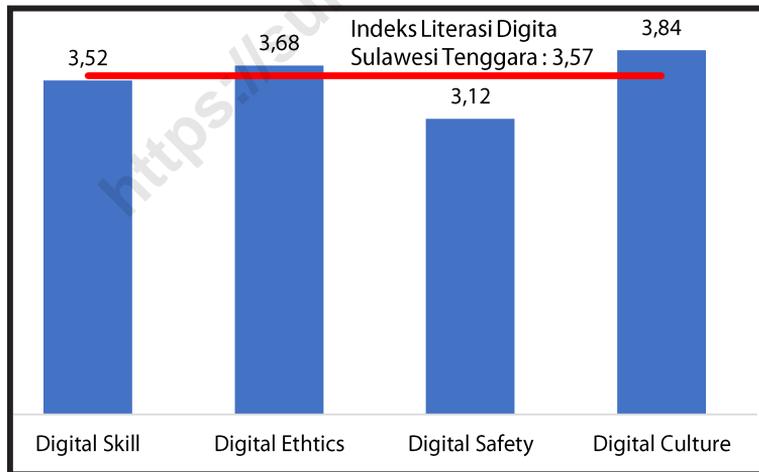
Sumber: Susenas Maret, 2022

Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan atau keahlian seseorang memahami literasi digital. Di dalam penghitungan Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) yang dilakukan oleh BPS, subindeks keahlian TIK didekati dengan indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) sekunder, dan APK tersier. APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai

dengan jenjang pendidikan tersebut. APK sekunder untuk murid SMP/ sederajat dan SMA/sederajat, sedangkan tersier untuk level D1 sampai dengan S1. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Pada Gambar 2.14, tampak bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Tenggara yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,59 tahun, artinya telah menamatkan jenjang pendidikan SMP/sederajat. APK sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan APK tersier. Selama tahun 2021-2022, sekitar 9 dari 10 penduduk usia 13-18 tahun bersekolah pada jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat, kemudian sekitar 4 dari 10 penduduk usia 19-23 tahun kuliah pada jenjang D1 sampai dengan S1 (APK tersier).

Pemerintah melalui Kemenkominfo membuat program untuk peningkatan kompetensi digital, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital. Target program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Diperlukan pemahaman dan pemetaan tentang kompetensi digital masyarakat supaya program berlangsung sesuai tepat sasaran. Pemetaan kompetensi digital masyarakat di Indonesia dilakukan dengan mengadakan survei status literasi digital dan mengukurnya menjadi Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 2.15. Indeks Literasi Digital dan Indikator Pilarnya di Sulawesi Tenggara, 2022

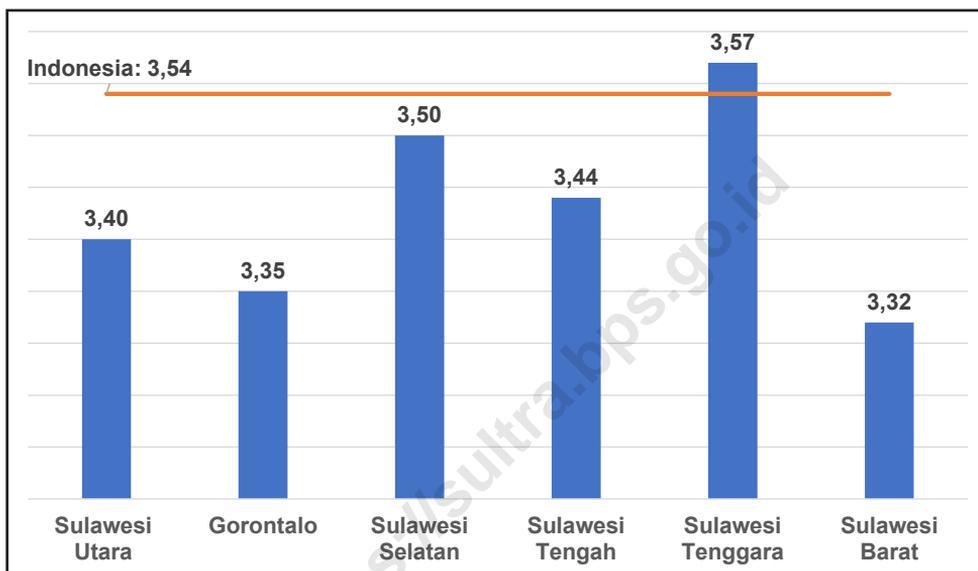


Sumber: Publikasi Status Literasi Digital di Indonesia, 2022

Berdasarkan Survei Status Literasi Digital di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Indeks Literasi Digital di Indonesia tahun 2022 berada pada level 3,54 dari angka maksimum 5,00, adapun Indeks Literasi Digital Sulawesi Tenggara ialah 3,57. Skor tersebut termasuk dalam kategori sedang. Indeks tersebut diukur mengacu pada 4 pilar, yaitu pilar Kecakapan digital (*digital skill*), Etika digital

(*digital ethics*), Keamanan digital (*digital safety*), dan Budaya digital (*digital culture*). Skor Pilar Digital Skill sebesar 3,45, Skor Pilar Digital Ethics 3,79, skor Pilar Digital Safety 3,19, dan skor Pilar *Digital Culture* 3,84. Keempat skor pilar tersebut berkategori sedang, artinya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara pada keempat aspek tersebut berada pada level sedang.

Gambar 2.16. Indeks Literasi Digital Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022



Sumber: Publikasi Status Literasi Digital di Indonesia, 2022

Jika dilihat menurut provinsi di Pulau Sulawesi, skor Indeks Literasi Digital berada pada kisaran 3,32 sampai dengan 3,57 (dari skala 1-5). Artinya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital di seluruh provinsi di Pulau Sulawesi berkategori sedang. Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Indeks Literasi Digital tertinggi dengan skor 3,57 dari 6 provinsi di Pulau Sulawesi. Sebaliknya Provinsi Sulawesi Barat memiliki skor terendah, yaitu 3,32.

3. Kesenjangan Digital

Pesatnya perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) menawarkan potensi ekonomi dan sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Integrasi TIK dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat memberikan banyak manfaat berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi kepada berbagai kelompok masyarakat. Misalnya saja, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mengadopsi teknologi untuk memperluas wilayah pemasaran dan penjualan melalui *platform marketplace* dan mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha. Teknologi juga mengubah penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan dapat diakses dari mana saja melalui internet. Para tenaga pendidik dan siswa dimungkinkan untuk tetap mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama pembatasan mobilitas akibat pandemi.

Perkembangan TIK yang semakin pesat di Indonesia juga berpotensi untuk membawa kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Sehingga, persoalan pembangunan TIK yang tidak merata akan berdampak negatif pada ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa TIK tersedia secara adil dan merata bagi semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Kesenjangan pembangunan TIK dapat menghambat masyarakat untuk meraih bonus digital, yang selanjutnya berdampak pada hilangnya potensi (*potential loss*) pada pembangunan sosial ekonomi secara keseluruhan.

Definisi kesenjangan digital mengalami beberapa tahap perkembangan. Pada awalnya, istilah kesenjangan digital hanya terkait dengan akses yakni disparitas antara masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap TIK, atau lebih spesifik ke akses internet (Srinuan & Bohlin (2011)). Sejak akhir tahun 1990-an, kesenjangan digital didefinisikan secara lebih luas yakni tidak hanya terkait dengan akses TIK, tetapi juga mencakup penggunaan TIK (OECD, 2001).

Salah satu ukuran untuk menilai perkembangan dari pembangunan TIK di Indonesia adalah Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) yang merupakan indeks komposit yang terdiri atas tiga subindeks dan sebelas indikator (tabel 3.1). Ukuran indeks ini dihitung hingga tingkat provinsi (termasuk Sulawesi Tenggara), sehingga dapat digunakan untuk menilai dan membandingkan pembangunan TIK antar provinsi di Indonesia.

Tabel 3.1. Sub Indeks dan Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK), 2022

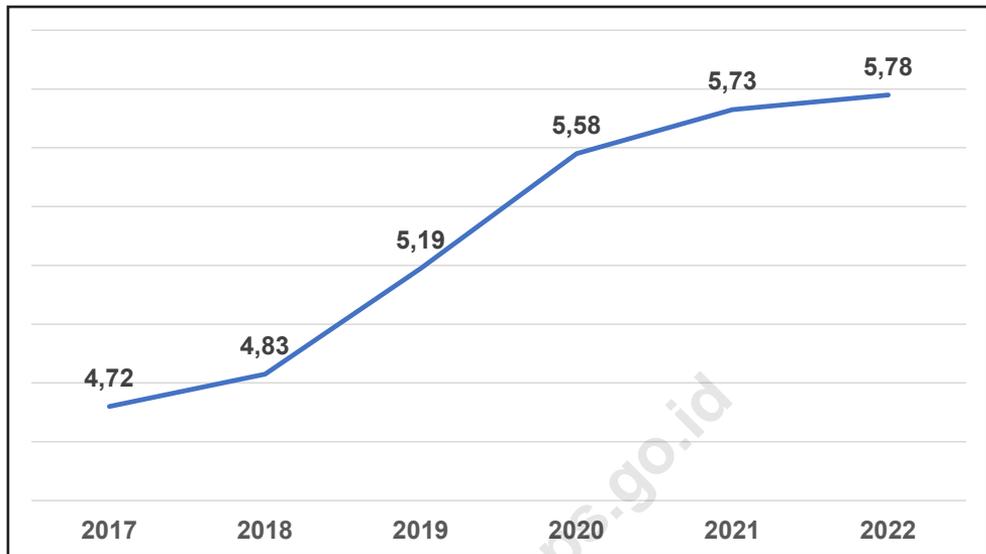
Sub Indeks	Indikator
(1)	(2)
Akses dan Infrastruktur	Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
	Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
	Persentase rumah tangga dengan komputer
	Persentase rumah tangga dengan akses internet
Penggunaan	Persentase individu yang menggunakan internet
	Pelanggan <i>fixed broadband internet</i> per 100 penduduk
	Pelanggan <i>mobile broadband internet</i> aktif per 100 penduduk
Keahlian	Rata-rata Lama Sekolah
	Angka Partisipasi Kasar Sekunder
	Angka Partisipasi Kasar Tersier

Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) 2022, BPS

Pembangunan TIK antar Provinsi di Indonesia Masih Belum Merata, Sedangkan antar Provinsi di Pulau Sulawesi Relatif Merata

Pembangunan TIK di Sulawesi Tenggara secara konsisten mengalami perbaikan selama enam tahun terakhir. Hal ini tercermin dari nilai IP-TIK yang terus meningkat dari 4,72 di tahun 2017 menjadi 5,78 di tahun 2022. Dengan nilai ini, posisi pembangunan TIK di Sulawesi Tenggara berubah dari kategori rendah menjadi sedang. Untuk melihat posisi pembangunan TIK antar provinsi, nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50).

Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan TIK Sulawesi Tenggara, 2017-2022



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2017-2022, BPS

Proses pembangunan TIK yang terus mengalami perbaikan memunculkan isu apakah kemajuan ini telah terjadi secara merata antar wilayah Indonesia. Dalam kajian ini mengkhususkan di regional Pulau Sulawesi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena adopsi TIK yang semakin pesat diharapkan dapat membantu dalam mereduksi ketimpangan antar wilayah di masyarakat, bukan malah memperdalam kesenjangan yang ada.

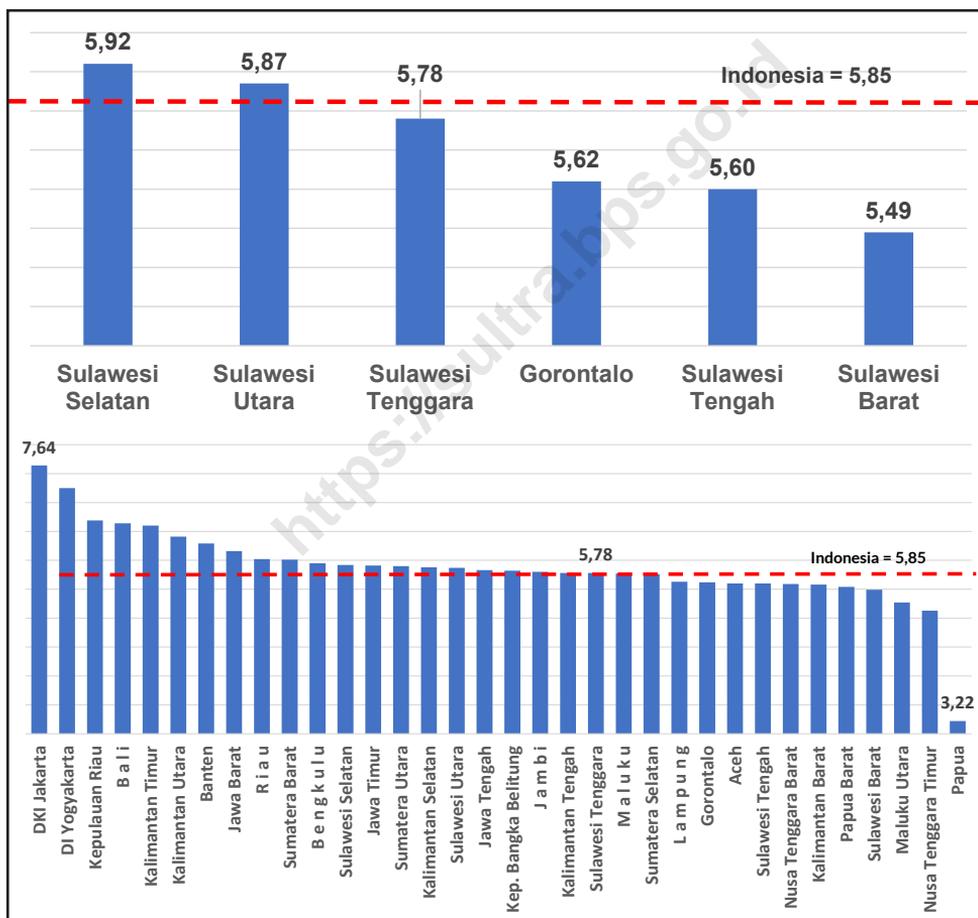
Namun, kenyataanya pembangunan TIK masih belum merata antar provinsi di Indonesia yang terlihat dari selisih nilai IP-TIK yang cukup besar antara provinsi dengan nilai IP-TIK tertinggi dan terendah. Pada tahun 2022 di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian pembangunan TIK paling pesat, yakni sebesar 7,64 , sedangkan provinsi dengan pembangunan TIK yang paling tertinggal adalah Papua dengan nilai IP-TIK sebesar 3,22 di tahun yang sama. Adapun IP-TIK di Sulawesi Tenggara sebesar 5,78 (Gambar 3.2), masih berada di bawah IP-TIK nasional (5,85) dan relatif jauh dari IP-TIK DKI Jakarta (selisih 1,86 poin pada tahun 2022).

Kondisi ini patut menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan. Kehadiran teknologi seharusnya mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Teknologi mampu menghilangkan sekat dan batasan jarak, keterbatasan ekonomi dan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kondisi pembangunan TIK yang masing belum merata pada semua wilayah di Indonesia berdampak pada timpangnya bonus digital yang dinikmati oleh

masyarakat pada wilayah yang berbeda. Hal ini berpotensi membuat ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antar wilayah melebar.

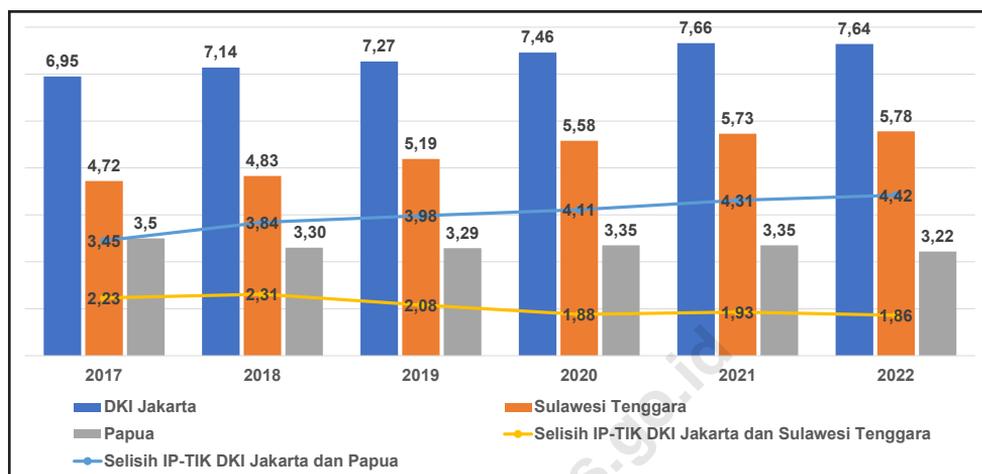
Jika dilihat menurut provinsi di Pulau Sulawesi, IP-TIK Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 menempati urutan ke tiga dari enam provinsi. IP-TIK tertinggi di Pulau Sulawesi ialah Sulawesi Selatan (5,92), sedangkan terendah ialah Sulawesi Barat (5,49), hanya selisih 0,43 poin. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kesenjangan digital yang signifikan antar provinsi di Pulau Sulawesi.

Gambar 3.2. Indeks Pembangunan TIK Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi dan Indonesia, 2022



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2022, BPS

Gambar 3.3. Perkembangan dan Selisih Nilai Indeks Pembangunan TIK Provinsi Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta (IP-TIK Tertinggi), dan Papua (IP-TIK Terendah), 2017-2022



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2022, BPS

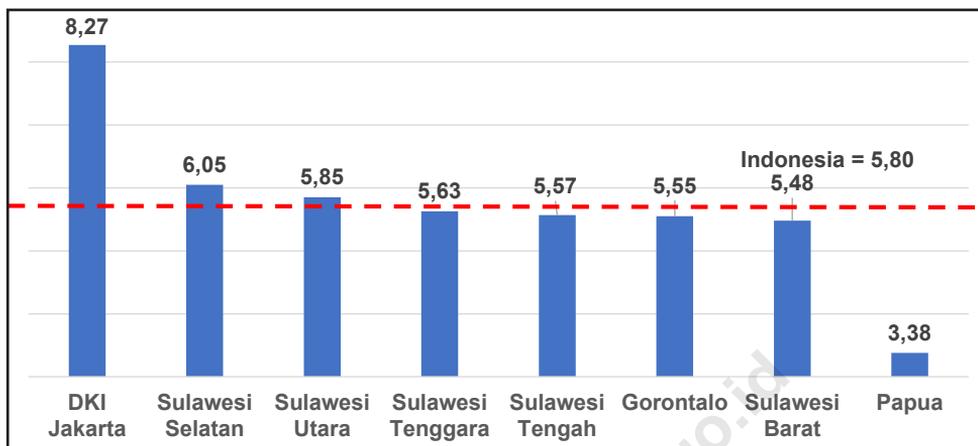
Jika ketimpangan antara IP-TIK terendah (Provinsi Papua) dan IP-TIK tertinggi (DKI Jakarta) antara tahun 2017 hingga 2022 semakin melebar, maka kondisi ini berkebalikan dengan Sulawesi Tenggara. Ketimpangan antara IP-TIK Sulawesi Tenggara dan IP-TIK tertinggi (DKI Jakarta) justru semakin mengecil, meski IP-TIK Sulawesi Tenggara masih relatif kecil dibanding IP-TIK nasional (selisih 0,07 poin).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terus berupaya untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur dan akses TIK yang kuat dan inklusif dalam meningkatkan konektivitas telekomunikasi dan menjembatani kesenjangan digital. Salah satu programnya yaitu peluncuran Satelit High-Throughput SATRIA-1 di tahun 2023 untuk menjangkau seluruh titik layanan publik Indonesia yang belum tersedia akses internet (Kominfo.go.id). Satelit ini digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang telah ada. Selain itu, pemerintah juga mendorong terciptanya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi broadband di Indonesia (kominfo.go.id).

Ketersediaan Akses dan Infrastruktur TIK antar Provinsi yang Belum Merata

Pembangunan TIK dinilai dari tiga komponen yakni akses dan infrastruktur (access), penggunaan (usage), dan keahlian (skill). Keberadaan akses dan infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk dapat mengakses TIK. Komponen ini membentuk dikotomi di masyarakat yakni antara mereka yang memiliki akses (who have) dan tidak memiliki akses (who don't have). Fajar (2021) menyebutkan bahwa kesenjangan antara dua kelompok tersebut disebut dengan kesenjangan digital tingkat pertama (first level digital divide) yakni kesenjangan yang hanya terkait dengan akses dan infrastruktur TIK.

Gambar 3.4. Subindeks Akses dan Infrastruktur Tertinggi dan Terendah (Provinsi di Indonesia) serta Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2022, BPS

Berdasarkan nilai subindeks, Papua merupakan provinsi dengan kemajuan pembangunan akses dan infrastruktur TIK paling tertinggal diantara 33 provinsi di Indonesia dengan nilai subindeks sebesar 3,38 pada tahun 2022. Hal ini sangat kontras dengan DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan nilai subindeks tertinggi yang mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan Provinsi Papua. Adapun posisi kemajuan pembangunan akses dan infrastruktur TIK di Sulawesi Tenggara berada di bawah nilai subindeks nasional (selisih 0,17 poin). Namun jika dibandingkan dengan enam provinsi di Pulau Sulawesi, nilai subindeks pembangunan akses dan infrastruktur TIK Sulawesi Tenggara berada pada posisi ke tiga (5,63). Secara umum, nilai subindeks pembangunan akses dan infrastruktur TIK di Pulau Sulawesi relatif merata, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara subindeks tertinggi (Sulawesi Selatan) dan terendah (Sulawesi Barat) di pulau ini.

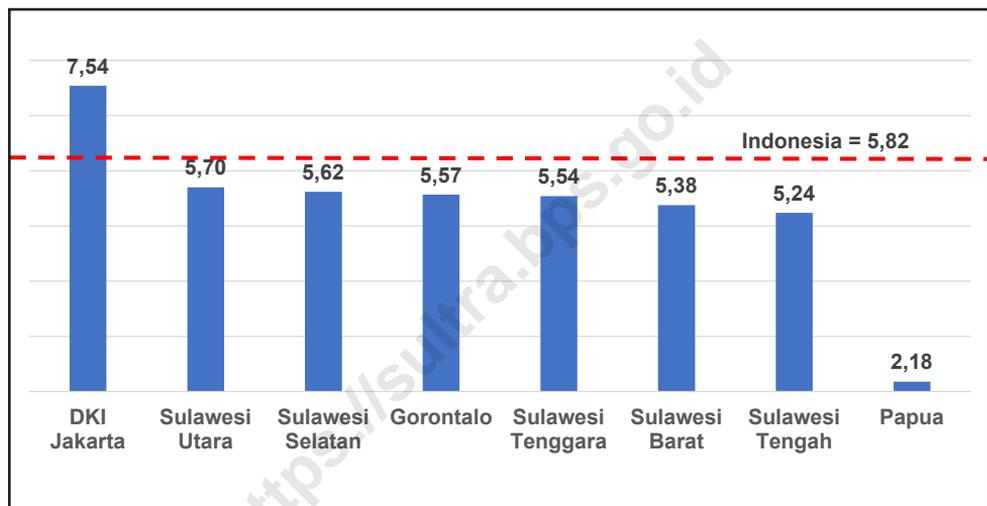
Kesenjangan Penggunaan TIK antar Provinsi yang masih Cukup Tinggi

Pembangunan TIK tidak hanya terkait dengan ketersediaan akses dan infrastruktur TIK yang memadai, tetapi juga berhubungan dengan sejauh mana masyarakat menggunakannya. Tingkat aksesibilitas masyarakat yang baik terhadap infrastruktur TIK tidak ada artinya jika tingkat penggunaan TIK dari masyarakat masih rendah. Seperti yang terlihat pada gambar 3.5, Papua merupakan provinsi dengan penggunaan TIK paling tertinggal diantara 33 provinsi di Indonesia dengan nilai subindeks sebesar 2,18 pada tahun 2022. Sangat berbeda jauh dengan DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan nilai subindeks tertinggi yang mencapai lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan Provinsi Papua. Minimnya akses dan infrastruktur TIK menjadi salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi teknologi masyarakat dengan ketersediaan

akses dan infrastruktur paling tertinggal di Indonesia.

Adapun posisi penggunaan TIK di Sulawesi Tenggara berada di bawah nilai subindeks nasional (selisih 0,28 poin). Namun jika dibandingkan dengan enam provinsi di Pulau Sulawesi, nilai subindeks penggunaan TIK Sulawesi Tenggara berada pada posisi ke empat (5,54). Secara umum, nilai subindeks penggunaan TIK di Pulau Sulawesi relatif merata, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara subindeks tertinggi (Sulawesi Utara) dan terendah (Sulawesi Tengah) di pulau ini.

Gambar 3.5. Subindeks Penggunaan Tertinggi dan Terendah (Provinsi di Indonesia) serta Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022

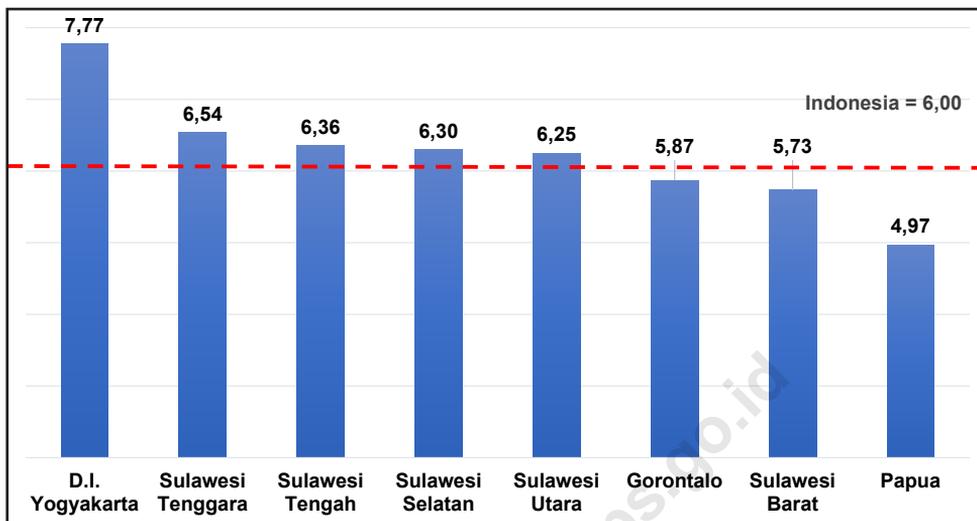


Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2022, BPS

Kesenjangan Keahlian Penduduk dalam Memanfaatkan TIK antar Provinsi

Kemajuan pembangunan TIK suatu wilayah juga dipengaruhi oleh keahlian masyarakat. Dimensi ini merupakan prasyarat agar bonus digital dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan teknologi digital yang sangat pesat akan tidak bermakna jika terjadi di tengah masyarakat yang belum memiliki keahlian mumpuni dalam memanfaatkannya. Dalam penghitungan IP-TIK, dimensi keahlian didekati dengan menggunakan tiga indikator yakni rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder (SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat), dan angka partisipasi kasar tersier (D1 sampai dengan S1).

Gambar 3.6. Subindeks Keahlian Tertinggi dan Terendah (Provinsi di Indonesia) serta Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2022, BPS

Seperti yang terlihat pada gambar 3.6, Papua merupakan provinsi dengan tingkat keahlian masyarakat memanfaatkan TIK paling tertinggal diantara 33 provinsi di Indonesia dengan nilai subindeks sebesar 4,97 pada tahun 2022. Berbeda dengan D.I. Yogyakarta yang merupakan provinsi dengan nilai subindeks tertinggi (7,77).

Adapun posisi tingkat keahlian masyarakat memanfaatkan TIK di Sulawesi Tenggara berada di atas nilai subindeks nasional (selisih 0,54 poin). Namun jika dibandingkan dengan enam provinsi di Pulau Sulawesi, nilai subindeks keahlian TIK Sulawesi Tenggara berada pada posisi pertama (6,54). Secara umum, nilai subindeks keahlian TIK di Pulau Sulawesi relatif merata, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara subindeks tertinggi (Sulawesi Tenggara) dan terendah (Sulawesi Barat) di pulau ini, hanya berbeda 0,81 poin.

Penduduk di Sulawesi Tenggara dan Wilayah Perkotaan Menunjukkan Partisipasi Teknologi Digital yang Lebih Tinggi di Pulau Sulawesi

Menurut Kominfo, tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan TIK yang merata di Indonesia adalah kondisi geografis, persebaran penduduk, dan dinamika masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai wilayah yang menghadirkan tantangan tersendiri bagi pembangunan TIK, mulai dari wilayah perkotaan, daerah terpencil seperti hutan, pegunungan, dan pesisir, hingga wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Keberagaman ini berpotensi dalam menimbulkan kesenjangan di masyarakat dalam ketersediaan dan penggunaan TIK di masyarakat.

Berdasarkan tabel 3.2, pada tahun 2022, bahwa Sulawesi Selatan merupakan provinsi di pulau Sulawesi dengan persentase pengguna internet tertinggi, dimana sebesar 88,33 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dan diikuti oleh Sulawesi Tenggara (87,60 persen), dan Gorontalo (85,52 persen). Adapun persentase pengguna terendah ialah Sulawesi Barat sebesar 82,09 persen yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

Ketimpangan penetrasi internet di Pulau Sulawesi juga terjadi antar wilayah perkotaan dan pedesaan, dimana proporsi penduduk perkotaan yang mengakses internet umumnya lebih besar daripada penduduk pedesaan. Adapun disparitas yang paling lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal di Pulau Sulawesi, 2020-2022

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sulawesi Utara	85,49	87,21	87,16	70,60	74,98	79,06	78,50	81,57	83,54
Sulawesi Tengah	89,58	88,88	90,62	60,11	70,89	78,27	68,70	76,51	82,23
Sulawesi Selatan	87,37	90,82	92,02	69,80	75,71	85,11	77,23	82,36	88,33
Sulawesi Tenggara	87,49	89,86	92,52	68,49	77,35	84,77	75,87	81,83	87,60
Gorontalo	83,21	89,61	89,85	72,26	74,22	82,05	76,98	80,89	85,52
Sulawesi Barat	81,17	85,49	89,27	61,52	72,82	80,34	66,03	75,32	82,09

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022

Kesenjangan Digital antar Karakteristik Sosio-Demografis di Pulau Sulawesi

Transformasi digital menghadirkan banyak manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Namun, intensitas adopsi teknologi digital masih belum merata tidak hanya antar wilayah (spasial) tetapi juga terjadi antar kelompok masyarakat, seperti antara jenis kelamin, kelompok umur, level pendidikan, dan status ekonomi. Kesenjangan digital antar kelompok tersebut akan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu atau kedua unsur yakni: (1) akses fisik dan (2) tingkat penggunaan dan keterampilan dalam mengakses teknologi digital. Misalnya saja, kesenjangan digital antara 'si kaya' dan 'si miskin' kemungkinan akan terkait erat dengan kemampuan dalam penyediaan akses dan infrastruktur. Sementara, kesenjangan digital antara generasi muda dan tua lebih disebabkan oleh perbedaan keahlian.

Laki-laki Memiliki Partisipasi Teknologi Digital yang Lebih Tinggi dari Perempuan

Revolusi digital memicu terjadinya polarisasi antar kelompok yang dapat memetik bonus digital dengan kelompok yang semakin 'termaginalkan'. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan. Studi empiris dari Antonio dan Tuffley (2014) mengkonfirmasi bahwa partisipasi perempuan dalam penggunaan teknologi digital lebih rendah dibandingkan laki-laki, khususnya di negara berkembang.

Ketimpangan digital antar jenis kelamin juga terjadi di Pulau Sulawesi. Meskipun pengguna internet baik laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2020 hingga 2022, proporsi laki-laki yang mengakses internet umumnya relatif lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan di setiap tahunnya. Kecuali di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Pulau Sulawesi, 2020-2022

Provinsi	Laki-Laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	50,90	59,06	60,75	52,75	60,42	62,55
Sulawesi Tengah	43,34	50,25	54,86	42,28	50,05	54,11
Sulawesi Selatan	51,30	61,60	66,03	47,97	57,88	62,29
Sulawesi Tenggara	50,11	59,01	63,11	46,49	55,41	60,63
Gorontalo	46,33	54,99	59,62	47,52	57,07	61,02
Sulawesi Barat	40,62	50,59	57,20	35,97	46,87	53,50

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022

Kesenjangan digital gender ini sejalan dengan beberapa kajian empiris seperti Hilbert (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keterbatasan yang dimiliki wanita dalam menggunakan TIK terkait dengan kesempatan kerja, pendidikan, dan pendapatan. Kesimpulan ini diperkuat oleh Antonio dan Tuffley (2014) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan digital antar laki-laki dan perempuan terkait erat dengan diskriminasi gender yang kerap terjadi di negara berkembang, seperti terkait dengan kesempatan kerja dan kesempatan mengenyam pendidikan. Beberapa alasan lain mengapa partisipasi wanita dalam penggunaan teknologi lebih rendah daripada pria yakni wanita tidak merasa membutuhkan internet, literasi digital yang lebih rendah, dan teknofobia (OECD, 2018). Dari sini dapat diketahui bahwa penyebab adanya perbedaan tingkat adopsi digital antara laki-laki dan perempuan di Pulau Sulawesi utamanya disebabkan oleh dimensi penggunaan dan keahlian TIK.

Kesenjangan Digital antar Kelompok Umur masih Cukup Dalam

Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif pada proses transformasi digital menemui kendala pada kelompok masyarakat dengan usia yang lebih tua. Seperti terlihat pada tabel 3.4, ketimpangan digital terjadi antar kelompok umur di Pulau Sulawesi, dimana persentase penduduk yang mengakses internet terendah pada kelompok umur 13-15 tahun, sedangkan persentase internet tertinggi pada kelompok umur 25 tahun ke atas. Pada tahun 2022 di Sulawesi Tenggara, 46,59 persen penduduk usia 25 tahun ke atas mengakses internet. Adapun penduduk Sulawesi Tenggara usia 13-15 tahun yang menggunakan internet hanya 8,59 persen. Hal ini dapat terjadi karena umumnya penduduk usia di bawah 18 tahun sedang bersekolah (SD-SMA), sehingga penggunaan telepon genggam juga dibatasi.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	5-12	13-15	16-18	19-24	25+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	9,64	6,99	7,82	15,05	47,19
Sulawesi Tengah	9,83	8,15	10,01	18,06	46,53
Sulawesi Selatan	11,72	7,89	8,64	16,83	45,25
Sulawesi Tenggara	11,21	8,59	9,11	17,35	46,59
Gorontalo	13,01	8,57	9,37	17,78	44,91
Sulawesi Barat	11,09	8,64	10,55	19,53	44,48

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022

Kebanyakan kajian empiris menyebutkan bahwa ketimpangan digital dilatarbelakangi oleh faktor internal dari kelompok penduduk yang berusia lebih tua, seperti rendahnya literasi digital, teknofobia, keengganan untuk menggunakan karena merasa tidak perlu, dan hambatan keahlian dan fisik (McDonough, 2016). Sementara, efikasi diri, istilah yang diperkenalkan oleh Bandura (1977) pada McDonough (2016) yang didefinisikan sebagai keyakinan pada kemampuan diri sendiri, menjadi salah satu faktor penting pada keputusan untuk mengadopsi teknologi digital, dimana seseorang dengan efikasi yang rendah memandang teknologi sesuatu hal yang baru, sulit, dan cenderung harus dihindari.

Transformasi digital membuat internet semakin terintegrasi dalam sendi kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan jual beli, akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, hingga belajar mengajar. Oleh sebab itu, kelompok yang belum memanfaatkan teknologi digital dapat dirugikan dan termaginalkan karena tidak dapat

menikmati bonus digital. McDonough (2016) mengkonfirmasi kerugian sosial dari generasi tua ini terutama di dunia kerja dan dalam hal mendapatkan pelayanan jasa kesehatan.

Pendidikan Membuat Masyarakat Semakin Melek Teknologi Digital

Teknologi digital menawarkan berbagai peluang pada komunitas karena mampu memberdayakan kelompok yang memiliki kendala terkait geografis, status ekonomi, kelas, dan gender. Dengan perkembangan teknologi, seorang ibu rumah tangga dimungkinkan untuk memiliki usaha *online* yang bisa dijalankan dari rumah sambil tetap dapat mengurus keluarga. Namun, peluang-peluang dari teknologi digital hanya mampu dinikmati oleh kelompok yang memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung kegiatan sehari-hari, yakni kelompok yang memiliki literasi digital yang baik. Sementara, salah satu hal yang mempengaruhi tingkat literasi digital yakni pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022

Provinsi	Tidak Punya	SD	SMP	SMA	D1-D3	S1 ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	11,56	14,17	21,01	38,86	2,04	12,35
Sulawesi Tengah	10,67	20,48	25,80	27,44	2,15	13,45
Sulawesi Selatan	14,17	18,13	20,73	31,51	2,41	13,06
Sulawesi Tenggara	12,45	16,36	24,85	27,96	2,54	15,84
Gorontalo	19,95	19,58	21,54	22,91	1,83	14,19
Sulawesi Barat	14,39	22,95	20,67	25,87	2,30	13,82

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik literasi digital, sehingga semakin besar juga peluang untuk mengakses internet. Namun jika dilihat dari persentase pengguna, proporsi yang terbesar justru oleh penduduk dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan berupa SMA, yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir (periode pencacahan) pada tahun 2022 di Pulau Sulawesi. Hal ini karena banyaknya jumlah penduduk yang jenjang Pendidikan terakhirnya SMA, sehingga peluang penggunaannya juga lebih besar. Selain itu juga terkait dengan tujuan penggunaan internet dalam lapangan usaha yang dijalani. Proporsi pengguna internet oleh penduduk dengan Pendidikan yang ditamatkan berupa perguruan tinggi, terbesar di Pulau Sulawesi ialah Sulawesi Tenggara (18,38 persen).

4. Daftar Isian yang Digunakan

Saat ini, tidak dapat dinafikan bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Gencarnya pembangunan TIK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Kallal et al., 2021). Di Singapura, investasi TIK memiliki kontribusi sebesar satu persen poin terhadap PDB Singapura tahun 1990-2008 (Vu, 2013). Selain itu, walaupun perekonomian negara maju dan negara miskin sama-sama dapat didongkrak oleh pembangunan TIK, namun negara miskin cenderung memperoleh dampak positif pembangunan TIK lebih tinggi daripada negara maju (Appiah-Otoo & Song, 2021). Menurut Richmond dan Triplett (2018), penelitian yang membuktikan pentingnya peran TIK terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara sudah banyak dilakukan, namun sayangnya, pengaruh pembangunan TIK terhadap ketimpangan pendapatan masih sangat jarang dan minim. Mengetahui dampak pembangunan TIK terhadap distribusi pendapatan menjadi penting untuk memastikan bahwa kue pembangunan dinikmati seluruh kalangan baik kelompok berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Di level individu, pembangunan TIK juga dapat meningkatkan pendapatan. Dalam *working paper*-nya yang berjudul "*The wage and inequality impacts of broadband internet*" yang menggunakan data level perusahaan di negara Brazil, Poliquin (2020) menemukan bukti empiris bahwa tingkat upah pekerja meningkat sebesar 2,2 persen karena adopsi internet. Poliquin (2020) juga menyimpulkan bahwa pekerja level atas cenderung mendapatkan bonus digital lebih tinggi daripada pekerja level bawah. Untuk menguji secara formal dan menganalisis hubungan antara pembangunan TIK dan ketimpangan pendapatan di Sulawesi Tenggara, dilakukan menggunakan analisis regresi.

Analisis Regresi

Sejumlah penelitian telah menguji pengaruh pembangunan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terhadap potensi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian terdahulu masih sangat beragam. Sebagian menemukan bahwa pembangunan TIK berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan yang ada (Afzal et al., 2022; Jaumotte et al., 2013). Namun penelitian lain menyimpulkan bahwa pembangunan TIK dapat dijadikan kendaraan untuk mengurangi rasio gini (Asongu, 2015; Asongu & Odhiambo, 2019; Canh et al., 2020). Menurut Bauer (2018), jarang sekali TIK menjadi penyebab tunggal penurunan atau peningkatan ketimpangan, namun TIK bersama-sama dengan teknologi lainnya, isu ekonomi, dan kekuatan politik akan memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Menurutnya, tergantung konstelasi faktor-faktor tersebut, ketimpangan pendapatan bisa naik atau turun. Menengok penelitian sebelumnya, masih sangat jarang penelitian terkait hubungan pembangunan TIK dan ketimpangan pendapatan yang berfokus pada suatu negara dan menggunakan data panel level kabupaten/kota karena keterbatasan data yang tersedia, terlebih di negara

berkembang. Kajian ini bermaksud untuk melengkapi celah tersebut.

Data dan Metodologi

Sebagian besar data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari data rilis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan bersifat panel level kabupaten/kota dari tahun 2018 hingga 2022 yang berasal Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pemilihan variabel diadopsi dari penelitian Canh et al. (2020) yang melakukan penelitian serupa dengan analisis lintas negara. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, kajian ini menggunakan data Rasio Gini yang bernilai dari nol hingga satu. Data Rasio Gini dikutip dari tabel dinamis yang disajikan *website* BPS Provinsi Sulawesi Tenggara yang penghitungannya diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk mempertajam analisis, dalam kajian ini, tingkat pembangunan TIK didekati dengan tiga indikator yaitu penetrasi internet, penetrasi telepon seluler (*mobile*), penetrasi komputer (*computer*). Seluruh variabel tersebut dikompilasi dari publikasi BPS berjudul Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tenggara. Penetrasi internet didekati dengan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir menurut kabupate/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penetrasi telepon seluler (*mobile*) diukur menggunakan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 bulan terakhir menurut kabupaten/kota. Sementara itu, penetrasi komputer (*computer*) dihitung dari persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer (PC/Desktop, laptop, tablet) dalam 3 bulan terakhir menurut kabupaten/kota.

Beberapa variabel kontrol diadopsi dari penelitian Canh et al. (2020). Variabel kontrol yang digunakan dalam kajian ini diantaranya pendapatan perkapita (*income*) dalam bentuk logaritma natural, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan industri (*industry*). Variabel industri didekatkan melalui data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menurut lapangan usaha dalam bentuk logaritma natural. Untuk menguji pengaruh pembangunan TIK terhadap ketimpangan pendapatan, analisis ini menggunakan analisis regresi panel statis.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel-Variabel yang Digunakan

Statistik Deskriptif					
Variabel	Observasi	Rata-rata	Standar Deviasi	Min	Max
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini Rasio	85	0,36	0,04	0,29	0,51
Internet	85	42,58	15,43	16,01	81,92
Seluler	85	62,72	7,68	47,54	83,95
Komputer	85	12,23	6,69	5,75	36,63
IPM	85	69,20	4,75	63,46	84,51
Pendapatan Perkapita	85	3,77	0,42	2,82	4,85
Industri	85	12,34	1,26	10,56	15,54

Sumber: ¹ Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2022

² Produksi Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Pengeluaran

³ Data Lain dari Tabel Dinamis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

Hasil dan Pembahasan

Untuk menguji pengaruh pembangunan TIK terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan analisis regresi panel statis yang hasilnya disajikan pada tiga tabel. Tabel 4.3 menggambarkan hasil uji regresi antara pembangunan TIK, didekati dengan tiga indikator pembangunan TIK, terhadap rasio gini sebagai representasi ketimpangan pendapatan dari seluruh sampel, yaitu sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Tabel menyajikan hasil estimasi uji regresi terhadap 9 provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi dan 8 provinsi dengan PDRB perkapita terendah.

Kemudian dalam menentukan model mana yang digunakan pada seluruh sampel kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, dilakukan pengujian yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa model *Random Effect Model* (REM) adalah model terbaik.

Tabel 4.2. Tahapan Pengujian Regresi Data Panel Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

Uji	Hasil Pengujian	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)
Chow	$P\text{-value } (0,0003) < \alpha (0,1)$	FEM
Hausman	$P\text{-value } (0,9969) < \alpha (0,1)$	REM
BPLM	$P\text{-value } (0,0007) < \alpha (0,1)$	REM

Sumber: diolah

Keterangan: *signifikan pada taraf uji 10%

Adapun hasil estimasi pada seluruh sampel kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan metode REM, sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Estimasi Regresi Panel Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

Variabel	Koefisien	Standard Error	t- statistik	P-Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penetrasi_Internet	0,0007	0,0006	1,0204	0,3107
Penetrasi_Komputer	0,0035	0,0011	3,0539	0,0031*
Penetrasi_Seluler	-0,0026	0,0017	-1,5183	0,1330
IPM	0,0008	0,0033	0,2426	0,8089
Pendapatan_perkapita	0,0035	0,0190	0,1822	0,8559
Industri	-0,0066	0,0076	-0,8745	0,3845
C	0,4672	0,1484	3,1481	0,0023*
<i>R-squared</i>		0,1963		
<i>Adjusted R-squared</i>		0,1344		
<i>Prob.Uji Wald</i>		0,0077		

Sumber: diolah

Keterangan: *signifikan pada taraf uji 10%

Dengan menggunakan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai sampel, hasil regresi yang disajikan pada Tabel 4.3 menunjukkan adj. R-Squared menunjukkan nilai sebesar 13,44 persen. Hal ini maksudnya adalah persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (HP)/Nirkabel, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer (PC/Desktop, laptop, tablet), IPM pendapatan perkapita dan industri mampu menjelaskan rasio gini di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 13,44 persen.

Apabila dilihat secara parsial, dari ketiga indikator pembangunan TIK yaitu penetrasi internet, penetrasi seluler dan penetrasi komputer, hanya penetrasi komputer yang berpengaruh positif dan signifikan pada (tingkat signifikansi 90%). Setiap peningkatan satu persen poin penetrasi komputer, akan cenderung meningkatkan rasio gini sekitar 0,0036 persen poin. Hal ini dikarenakan komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang masih terbilang mahal sehingga belum terjangkau di seluruh lapisan Masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Nasution, 2016; Dewi dkk, 2022), menunjukkan bahwa TIK yang berkaitan dengan komputer telah banyak digunakan di berbagai bidang. Namun, penggunaan komputer masih belum merata sehingga menimbulkan kesenjangan digital, terutama di antara wilayah perkotaan dengan perdesaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang tinggi antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Selain itu, penggunaan komputer mengubah berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat kelas bawah merasa tertinggal dengan adanya perkembangan teknologi (Setiawan, 2018). Sementara variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selain melakukan analisis terhadap seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, kajian ini mereplikasi terhadap sampel kabupaten/kota yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah 9 kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita tertinggi dan kelompok kedua adalah 8 kabupaten/kota yang nilai PDRB perkapitanya terendah. Tabel 4.4 dan 4.5 menunjukkan hasil pengujian pemilihan model terbaik kelompok pertama dan untuk kelompok kedua. Pada kelompok pertama model terbaik yang terpilih untuk daerah dengan pendapatan perkapita tinggi adalah FEM dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Sementara kelompok kedua model terbaik yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4.4. Tahapan Pengujian Regresi Data Panel Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Pendapatan Perkapita Tinggi, 2018-2022

Uji	Hasil Pengujian	
	Perikanan Tangkap	
(1)	(2)	(3)
Chow	$P\text{-value } (0,000) < \alpha (0,1)$	FEM
Hausman	$P\text{-value } (0,000) < \alpha (0,1)$	FEM
LM	$LM(5,2976) > X^2(32,67)$	Struktur varians kovarian bersifat Homoskedastisitas

Sumber: diolah

Keterangan: *signifikan pada taraf uji 10%

Tabel 4.5. Tahapan Pengujian Regresi Data Panel Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Pendapatan Perkapita Rendah, 2018-2022

Uji	Hasil Pengujian		Kesimpulan
	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	
(1)	(2)	(3)	(4)
Chow	P-value (0,000) < α (0,1)		CEM
BPLM	P-value (0,000) < α (0,1)		CEM

Sumber: diolah

Keterangan: *signifikan pada taraf uji 10%

Adapun hasil estimasi regresi data panel terbaik disajikan pada Tabel 4.6, dimana adj. R-squared untuk persamaan daerah pendapatan perkapita tinggi menunjukkan nilai sebesar 79,68 persen dan daerah pendapatan perkapita rendah sebesar 79,68 persen. Hal ini maksudnya adalah persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (HP)/Nirkabel, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer (PC/Desktop, laptop, tablet), IPM, pendapatan perkapita dan industri mampu menjelaskan rasio gini di daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi sebesar 79,68 persen, serta mampu menjelaskan rasio gini di daerah dengan pendapatan perkapita terendah sebesar 35,02 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model

Tabel 4.6. Hasil Estimasi Regresi Panel Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Daerah Pendapatan Perkapita Tertinggi dan Terendah, 2018-2022

Variabel	Daerah Pendapatan Perkapita Tertinggi		Daerah Pendapatan Perkapita Terendah	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penetrasi_Internet	0,0020	0,0229*	0,0011	0,2711
Penetrasi_Komputer	-0,0029	0,0503*	0,0060	0,0018*
Penetrasi_Seluler	-0,0019	0,3647	-0,0055	0,0318*
IPM	-0,0186	0,0647*	-0,0008	0,9337
Pendapatan_perkapita	-0,0624	0,2687	-0,0009	0,9618
Industri	-0,0143	0,4611	0,0202	0,5125
C	2,2246	0,0046*	0,5675	0,0912*
<i>R-Squared</i>	0,8646		0,4501	
<i>Adj.R-Squared</i>	0,7968		0,3501	
<i>Prob. Uji Wald</i>	0,0000		0,0033	

Sumber: diolah

Keterangan: *signifikan pada taraf uji 10%

Apabila dilihat secara parsial, hanya variabel penetrasi komputer satunya satunya indikator pembangunan TIK yang secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini ratio baik pada daerah dengan pendapatan perkapita rendah maupun tinggi. Hal ini dikarenakan komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang masih terbilang mahal sehingga belum terjangkau di seluruh lapisan Masyarakat. Ketimpangan terhadap penggunaan komputer tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa. Namun, ketimpangan teknologi, salah satunya penggunaan komputer, juga terjadi di lingkungan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BPS (KPPPA & BPS, 2019) menyatakan bahwa ketimpangan kesempatan penggunaan akses personal komputer (PC)/laptop/komputer lebih besar daripada akses internet.

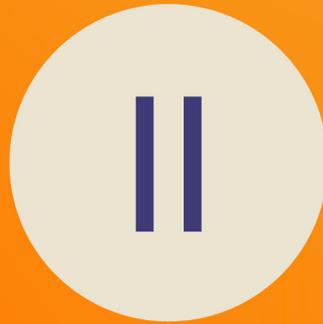
Berbeda halnya penetrasi komputer yang signifikan pada dua kelompok, penetrasi internet hanya berpengaruh pada kelompok pertama sedangkan penetrasi seluler signifikan pada kelompok kedua. Penetrasi internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gini di daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi. Setiap peningkatan satu persen poin penetrasi internet, akan cenderung meningkatkan rasio gini sekitar 0,0020 persen poin untuk daerah pendapatan perkapita tertinggi. Sedangkan penetrasi seluler berpengaruh negatif dan signifikan rasio gini pada daerah yang berpendapatan kapita rendah. Setiap peningkatan satu persen poin penetrasi seluler, akan cenderung menurunkan rasio gini sekitar 0,0055 persen poin untuk daerah pendapatan perkapita rendah.

Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio gini di daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi dan tidak signifikan pada daerah dengan pendapatan perkapita terendah. Setiap peningkatan satu persen poin IPM, akan cenderung menurunkan rasio gini sekitar 0,0020 persen poin untuk daerah pendapatan perkapita tertinggi. Hal itu sejalan penelitian yang dilakukan Syamsir & Rahman (2018) menjelaskan bahwa menurut UNDP, pembangunan manusia berpusat pada manusia yang membuat manusia menjadi tujuan akhir dari pembangunan nasional, sehingga manusia bukan merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Alvan (2007) menjelaskan bahwa apabila ingin mendapatkan tingkat PDB dan pendapatan per kapita yang tinggi serta tingkat ketimpangan yang rendah, maka sebaiknya indeks pembangunan manusia dijadikan hal utama dalam pembangunan suatu daerah maupun negara.

Sementara itu, variabel pendapatan perkapita dan industri tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini di daerah pendapatan perkapita tertinggi maupun daerah dengan pendapatan perkapita terendah. Berkaitan dengan pendapatan per kapita diketahui bahwa tidak selamanya peningkatan upah pekerja terampil menjadi masalah. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang lebih tinggi terhadap keterampilan merupakan indikator yang positif di dalam sebuah ekonomi negara. Namun, akibat adanya

peningkatan tersebut berpotensi menjadi masalah apabila tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan keterampilan tersebut. Selain itu, adanya rumah tangga yang memperoleh penghasilan yang tidak berasal dari upah kerja saja, misalnya memiliki modal seperti aset keuangan dan properti. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya ketimpangan (Bank Dunia, 2016).

<https://sultra.bps.go.id>



Perkembangan Kesejahteraan Rakyat

<https://sultrab.go.id>

1. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan di suatu wilayah, karena memiliki peranan yang vital dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut asalkan sumber daya manusianya berkualitas. Pengaruh penduduk ini lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam yang berlimpah yang tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP 2020) jumlah penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 sebesar 2.624.875 jiwa. Sementara berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim 2020-2023 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara bertambah menjadi 2.701.661 jiwa pada tahun 2022 (tabel 1). Laju pertumbuhan penduduk menurut SP 2020 (periode 2010-2020) sebesar 1,58 persen. Selanjutnya menurut Proyeksi Penduduk Interim laju pertumbuhan penduduk 2020-2022 meningkat menjadi 1,66 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan sekitar 76,78 ribu jiwa dalam dua tahun tersebut.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP 2020), pada tahun 2020 jumlah penduduk di pulau Sulawesi yang tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9.073,5 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,18 persen dan yang terendah yaitu Provinsi Gorontalo dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen. Sementara berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim 2020-2023, jumlah penduduk di pulau Sulawesi yang tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9.225,8 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 0,96 persen dan yang terendah yaitu Provinsi Gorontalo dengan laju pertumbuhan penduduk 1,02 persen.

Tabel 1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Sulawesi Tenggara, 2020 dan 2022

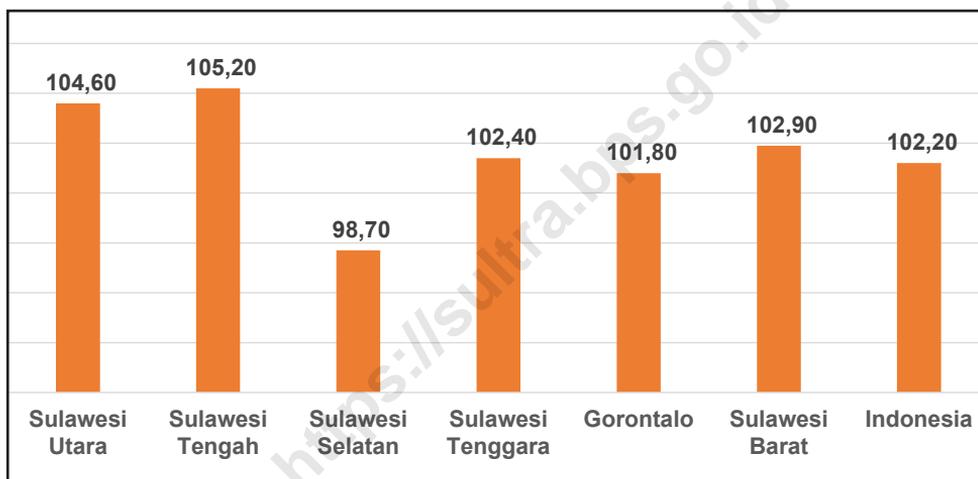
Tahun	Jumlah Penduduk (000 jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)		
2020 ¹	2.624,90	1,58	68,95	102,81
2022 ²	2.701,70	1,66	74,71	102,40

Catatan: ¹ Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)

² Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni)

Rasio jenis kelamin merupakan salah satu indikator demografi yang dapat digunakan untuk melihat perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Gambar 1 memperlihatkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2022 sebesar 102,2 yang berarti bahwa terdapat 102 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki di setiap 100 orang penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun yang sama, rasio jenis kelamin Sulawesi Tenggara 102,40. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, angka kepadatan penduduk di Sulawesi Tenggara terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, kepadatan penduduk di Sulawesi Tenggara tercatat pada tahun 2020 sebesar 68,95 jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 74,71 orang/km² di tahun 2022.

Gambar 1. Rasio Jenis Kelamin Indonesia dan Pulau-Pulau di Sulawesi, 2022



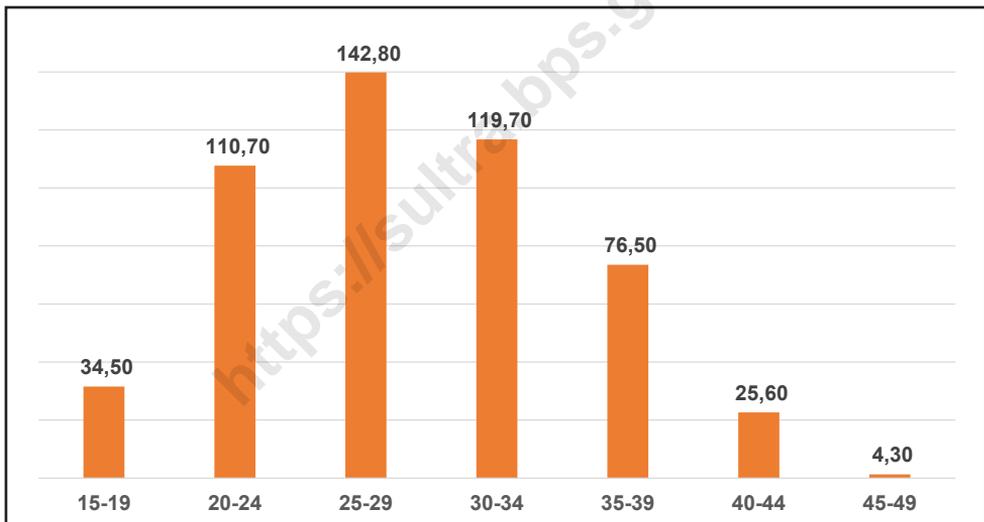
Sumber: Statistik Indonesia 2023

Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Selama tahun 2000-2022 baik dari hasil SP 2020 maupun Proyeksi Penduduk Interim, persentase penduduk usia produktif tersebut mencapai 67 persen dari total penduduk, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 66,90 persen. Pada tahun 2021 angka beban ketergantungan Sulawesi Tenggara sebesar 52,45 persen dan menurun sebesar 50,25 pada tahun 2022. Tingginya proporsi penduduk usia produktif berimbang pada rendahnya proporsi penduduk usia non produktif, sehingga beban ketergantungan penduduk usia produktif semakin ringan. Tantangan pemerintah dalam menghadapi dominasi penduduk usia produktif agar dapat mendukung pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara adalah dengan menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh angkatan kerja produktif, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada (tribun News.com, 26 Oktober 2021).

Sementara berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, untuk kondisi migran masuk seumur hidup di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 sebesar 443.602 jiwa dan meningkat sebesar 444.833 jiwa pada tahun 2022 (long form SP2020). Begitu pula halnya dengan migran keluar seumur hidup mengalami peningkatan dari 191.917 jiwa pada tahun 2015 meningkat menjadi 198.672 jiwa pada tahun 2022.

Indikator demografi lainnya yang dapat diukur adalah indikator fertilitas. Tinggi rendahnya angka fertilitas yang erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama bagi perempuan. Pada tahun 2022, banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun di Sulawesi Tenggara adalah 34-35 kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tersebut. ASFR tertinggi di Sulawesi Tenggara terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun, yakni sekitar 143 kelahiran per 1,000 perempuan.

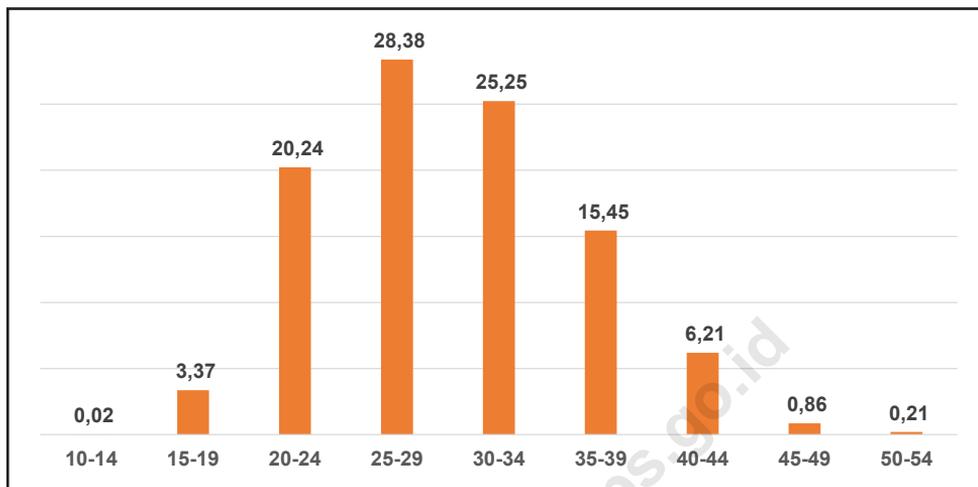
Gambar 2. Angka Kelahiran Hasil Long Form SP2020 Menurut Kelompok Umur Ibu, Tahun 2022



Sumber : Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Fenomena fertilitas juga dapat dilihat dari jumlah perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun di Sulawesi Tenggara yang melahirkan anak lahir hidup. Proporsi jumlah anak lahir hidup oleh perempuan pernah kawin di Sulawesi Tenggara untuk kelompok umur remaja relatif kecil, yakni 0,02 persen untuk remaja 10-14 tahun, dan 3,37 persen untuk remaja 15-19 tahun. Proporsi terbesar oleh kelompok umur 25-29 tahun, yaitu 28,38 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat semakin baik untuk tidak menikah di usia muda.

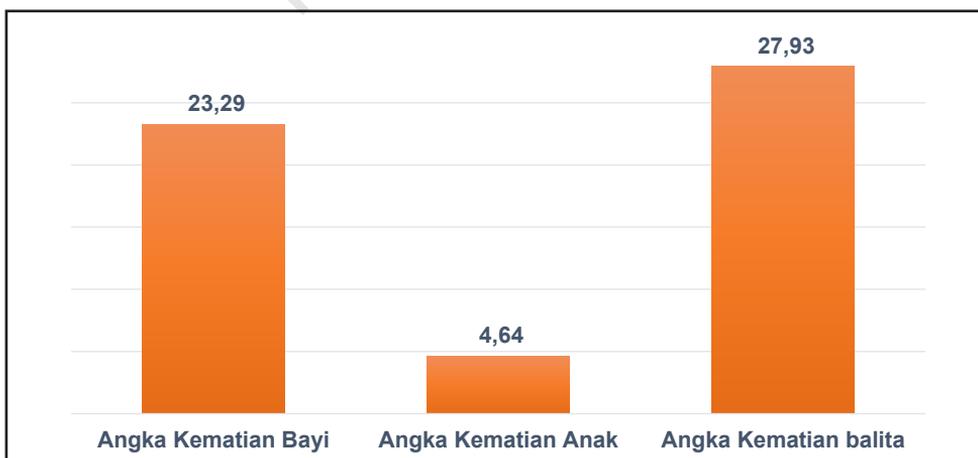
Gambar 3. Persentase Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup (sejak 1 Januari 2021) oleh Perempuan Pernah Kawin Berumur 10-54 Tahun (Persen) di Sulawesi Tenggara, 2022



Sumber : Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Dari sisi mortalitas bahwa secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2017-2022), menunjukkan bahwa dalam 1.000 kelahiran hidup terdapat 23 kematian bayi berusia dibawah 1 tahun, kemudian terdapat 4-5 kematian anak usia 0-4 tahun, serta terdapat 27-28 kematian balita usia 0-59 bulan di Sulawesi Tenggara.

Gambar 4. Angka Kematian bayi, Angka Kematian Anak, dan Angka Kematian Balita (2017-2022)



Sumber : Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

2. Kesehatan Gizi

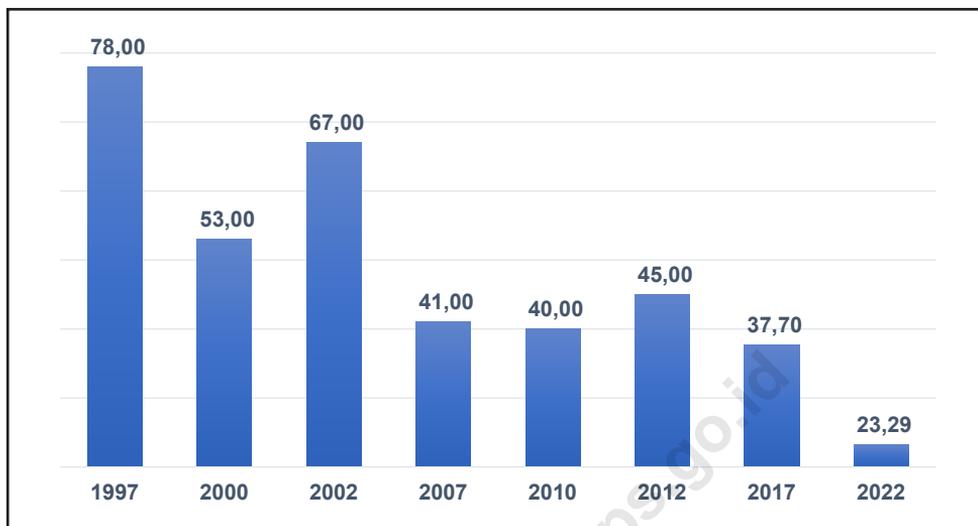
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam upaya tersebut adalah kesehatan masyarakat. Secara umum, derajat dan status kesehatan masyarakat ditentukan oleh lingkungan, perilaku, dan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Dalam mengukur derajat dan status kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah angka kematian. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian yang terjadi per 1.000 penduduk di suatu wilayah. Hingga saat ini, angka kematian masih digunakan sebagai indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dimana capaiannya masih menunjukkan tren penurunan sejak tahun 90-an. Namun, tren penurunan tersebut berubah akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal 2020.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Tenggara cukup menggembirakan dalam jangka waktu 21 tahun terakhir (1997-2017), AKB Sulawesi Tenggara mengalami penurunan secara berangsur-angsur, meski sempat meningkat di tahun 2002 dan 2012. Pada tahun 1997, AKB sebesar 78 kematian per 1.000 kelahiran hidup, AKB pada tahun 2017 sebesar 37-38 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan sampai pada tahun 2022 AKB sebesar 23-24 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi serupa juga terjadi pada Angka Kematian Balita (AKABA) di Sulawesi Tenggara yang terus mengalami penurunan. Hasil SDKI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa angka kematian balita di Sulawesi Tenggara sebesar 55 kematian per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 47-48 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), angka kematian balita sampai dengan tahun 2022 sebesar 27-28 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan angka kematian anak juga mengalami penurunan, dimana Angka Kematian Anak (AKN) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 ialah 10-11 anak per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2022 AKN di Sulawesi Tenggara sebesar 4-5 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 5. Angka Kematian Bayi, Tahun 1997, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012, 2017, 2022



Sumber : Sensus Penduduk 2010, LF SP2022 dan SDKI

Tabel 2. Perkembangan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Anak di Sulawesi Tenggara (per 1.000 Kelahiran), 1997-2022

Tahun	1997	2000	2002	2007	2010	2012	2017	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angka Kematian Bayi	78,00	53,00	67,00	41,00	40,00	45,00	37,70	23,29
Angka Kematian Balita	-	-	-	62,00	-	55,00	47,89	27,93
Angka Kematian Anak	-	-	-	-	-	-	10,58	4,64

Catatan : (-) = Angka tidak tersedia. Selain itu, SP dilaksanakan pada 2010 dan akan dilaksanakan pada 2020 dan SDKI pada 2017, sehingga data 2018 belum tersedia. Proxy Angka Kematian Anak sebelum 2017 masih Nasional.

Sumber : Sensus Penduduk (SP 2020), LF SP 2020 dan SDKI

Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk menurunkan AKB dan AKABA, salah satunya dengan memperluas cakupan imunisasi. Namun, kegiatan ini sempat terganggu akibat adanya pandemi covid-19. Kepanikan psikologis yang terjadi di masyarakat ternyata berdampak pada aktivitas di layanan kesehatan. Beberapa layanan kesehatan terhenti sementara dan mengalami penurunan kunjungan yang cukup drastis. Kendati demikian, berbagai upaya pun dilakukan agar aktivitas pada layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik, seperti penerapan protokol kesehatan pada puskesmas dan posyandu, serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan kesehatan mandiri, maupun melakukan janji temu dengan tenaga kesehatan posyandu.

Angka kesakitan menggambarkan banyaknya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan serta mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 16,68 persen. Artinya bahwa dalam 100 penduduk, terdapat sekitar 17 orang yang mengalami sakit/keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Angka ini relatif meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,82 persen. Angka Kesakitan penduduk tahun 2022 yang tinggal di daerah perkotaan lebih rendah dari penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, masing-masing sekitar 13,72 persen dan 18,36 persen. Hal ini bisa terjadi karena sarana dan prasarana kesehatan di daerah perkotaan relatif lebih lengkap dibanding di daerah pedesaan.

Gambar 6. Angka Kesakitan (dalam persen), 2021-2022



Sumber : Susenas Kor, 2021-2022

Selanjutnya indikator lain untuk melihat kondisi kesehatan adalah angka harapan hidup, tingkat kematian bayi, angka kematian kasar dan jumlah kematian. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara, telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (e0). Angka harapan hidup di Sulawesi Tenggara tercatat meningkat dari 69,65 tahun di 2010 menjadi 71,27 tahun pada tahun 2021, lalu meningkat lagi menjadi 71,37 tahun di 2022. Dilihat menurut jenis kelamin, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki, masing-masing

pada tahun 2022 sebesar 73,47 tahun untuk perempuan dan 69,44 tahun untuk laki-laki. Angka harapan hidup penduduk laki-laki dan penduduk perempuan relatif meningkat dibanding tahun 2021. Peningkatan angka harapan hidup ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Mengapa angka harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dari laki-laki? Faktor yang umum ialah dari segi genetika. Secara kromosom, laki-laki memiliki kromosom XY sementara perempuan XX. Artinya di laki-laki cenderung ada beberapa penyakit yang tidak ada pada perempuan. Dengan punya dua kromosom X, kaum wanita punya salinan ganda untuk setiap gen, yang berarti jika ada yang rusak, mereka masih punya satu cadangan. Adapun kaum pria tidak punya gen cadangan secara alamiah, yang berarti kemungkinan kaum pria untuk diserang penyakit lebih besar. Para ahli mengatakan pada paruh kedua siklus menstruasi bulanan, biasanya detak jantung wanita meningkat, yang berimplikasi menunda risiko penyakit jantung. Alasan lain yang mungkin ialah adalah hormon testosteron. David Gems dari University College London mengatakan hormon testosteron pada jangka pendek membuat badan secara fisik lebih kuat, tapi dalam jangka panjang memperbesar kemungkinan untuk terkena penyakit jantung, infeksi, dan kanker. Laki-laki juga banyak bekerja diluar sehingga lebih rentan terkena penyakit. Namun belum ada jawaban definitif mengapa kaum hawa relatif lebih panjang usia dibandingkan kaum adam.

Tabel 3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (E_0), 2018-2022

Tahun	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (E_0)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	68,83	72,71	70,72
2019	69,20	73,12	70,97
2020	69,31	73,37	71,22
2021	69,35	73,37	71,27
2022	69,44	73,47	71,37

Sumber : Susenas Maret 2022

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Di negara berkembang, kelompok usia balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk kelompok umur yang rentan gizi. Anak-anak biasanya menderita berbagai macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah. Oleh karena itu, asupan gizi yang diterima sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kesehatan balita. Imunitas dan gizi balita yang baik perlu diperhatikan bahkan sejak dalam masa kandungan, sehingga dapat mengurangi resiko kematian bayi dan balita. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan imunitas dan gizi balita, yaitu melalui program ASI eksklusif, program imunisasi dasar lengkap, program pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, serta program pemberian tablet zat besi (fe) pada ibu hamil.

Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, pemberian ASI eksklusif sangat disarankan karena memiliki banyak manfaat untuk bayi. Hal ini karena ASI eksklusif sudah memenuhi nutrisi penting untuk tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI eksklusif juga bermanfaat untuk mengurangi sindrom kematian mendadak (sudden infant death syndrome) pada bayi. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase anak usia dibawah 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 26,61 persen. Jika dilihat menurut wilayah, daerah perdesaan mengalami peningkatan persentase anak kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat untuk pemberian ASI eksklusif semakin baik.

Pada anak usia kurang dari 2 tahun, terdapat 73,39 persen yang pernah disusui pada tahun 2022. Jika dilihat menurut klasifikasi wilayahnya, wilayah perkotaan mengalami peningkatan persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui, yaitu sebesar 72,55 persen pada tahun 2021 menjadi 75,54 persen pada tahun 2022. Sedangkan wilayah perdesaan justru mengalami penurunan, yaitu sebesar 74,68 persen pada tahun 2021 menjadi 72,20 persen pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan, para ibu yang tinggal di perkotaan memiliki kesadaran lebih tinggi mengenai pentingnya asi eksklusif dengan tetap menyediakan ASI di rumah (stok) dalam bentuk ASI beku walaupun mereka bekerja.

Tabel 4. Balita yang mendapatkan ASI dan Imunisasi (persen), 2021 dan 2022

Indikator	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anak kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (%)	27,45	24,46	25,32	27,80	26,64	26,61
Anak Usia kurang dari 2 tahun	72,55	75,54	74,68	72,20	73,96	73,39
Rata-rata lama di susui (bulan)	9,98	10,14	10,81	10,04	10,53	10,07
Anak usia 0-59 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (%)	63,13	67,37	63,10	60,92	63,11	63,21
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi						
BCG	87,44	94,59	91,60	91,03	90,19	92,29
DPT	85,82	92,45	88,62	87,96	87,67	89,55
Polio	87,43	91,68	92,01	86,92	90,46	88,61
Campak	72,07	76,44	74,66	73,92	73,78	74,81
Hepatitis B	82,70	93,57	87,90	89,72	86,14	91,08

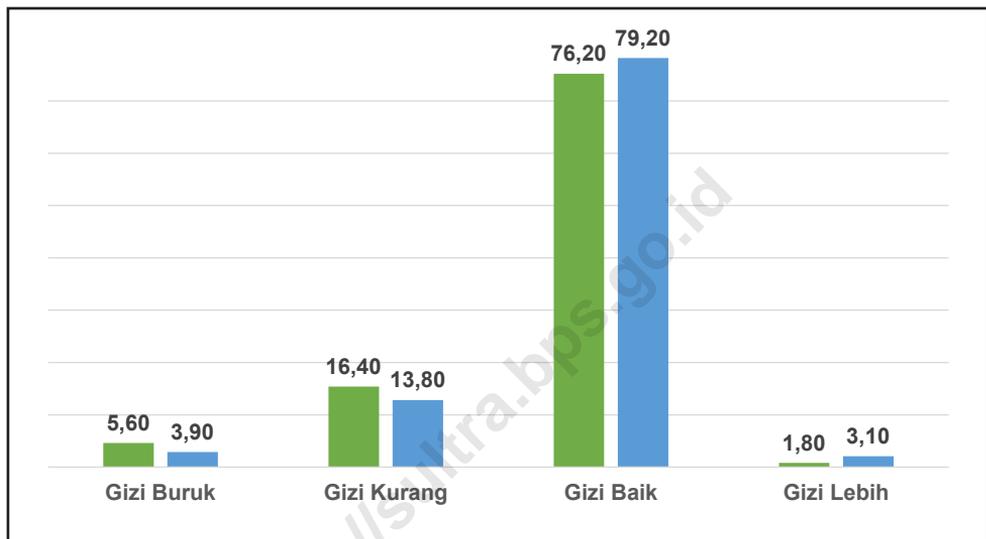
Sumber : Susenas Maret 2021-2022

Pemberian imunisasi pada anak merupakan hal yang sangat penting karena mampu melindungi anak dari penyakit serta mencegah menularkan penyakit ke anak lain. Selain itu, jika sudah terinfeksi, anak yang sudah diberikan imunisasi memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan anak yang belum diberikan imunisasi. Pada tahun 2021, tercatat anak usia 12-23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 63,11 persen dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 63,21 persen. Jika dilihat berdasarkan status wilayahnya, persentase anak usia 12-23 bulan yang tinggal di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan dalam hal mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pada perkotaan, sebesar 67,37 persen yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2022, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 60,92 persen. Hal ini berarti, kesadaran para ibu terhadap pentingnya imunisasi pada anak di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan.

Pada anak usia balita, pemberian gizi yang baik dapat memaksimalkan tumbuh kembangnya seorang anak. Selain itu, pemberian gizi juga dapat memengaruhi aspek kesehatan lainnya. Pada umumnya kasus gizi buruk yang terjadi pada balita berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sebesar 5,6 persen balita mengalami gizi buruk dan 16,8 persen balita mengalami gizi kurang. Baik kondisi gizi buruk dan gizi kurang keduanya berada lebih tinggi dari angka nasional. Hal ini menunjukkan program pemerintahan dalam menurunkan status gizi

buruk yang dilakukan pada tahun 2018 seperti program ibu hamil dan menyusui serta pemberian imunisasi MR rubela masih harus ditingkatkan lagi. Namun, pandemi yang terjadi pada awal 2020 dapat menjadi hambatan pemerintah dalam pengentasan gizi buruk.

Gambar 7. Persentase Balita Menurut status Gizi 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia



Sumber : Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan

Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Proses kelahiran merupakan masa yang sangat krusial bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam proses kelahiran. Terdapat beberapa hal mengapa proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi sangat penting, pertama karena tenaga kesehatan merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin, lalu apabila terdapat kelainan pada bayi maka dapat segera diambil tindakan oleh tenaga kesehatan, selanjutnya alat kesehatan yang digunakan merupakan alat yang aman dan steril. Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa persentase perempuan yang melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 93,29 dan meningkatkan menjadi 95,11 persen pada tahun 2022. Jika dilihat menurut wilayahnya, wilayah, wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal ini karena fasilitas kesehatan yang ada di perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

Tabel 5. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2021 dan 2022

Indikator	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan						
Dokter Kandungan	34,37	37,04	15,26	16,73	21,62	24,11
Dokter Umum	1,56	1,68	0,87	1,07	1,10	1,29
Bidan	59,19	58,39	74,96	75,50	69,71	69,28
Perawat	0,40	0,00	1,09	0,67	0,86	0,43
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi						
Dukun Beranak/Paraji	4,39	2,90	7,71	5,44	6,60	4,52
Lainnya	0,10	0,00	0,12	0,60	0,11	0,38
Tidak Ada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Susenas Maret 2021-2022

Kesadaran masyarakat untuk berobat ketika sakit semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 penduduk yang berobat jalan di fasilitas pemerintah seperti puskesmas sebesar 45,30 persen dan meningkat menjadi 69,49 persen pada tahun 2022 (Tabel 6) Keadaan ini mengindikasikan bahwa program pemerintah seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat dan program “Sultra Sehat” berhasil memberikan kemudahan berobat penduduk yang menderita sakit. Secara kewilayahan, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan persentase penduduk yang berobat jalan utamanya di fasilitas kesehatan pemerintah (puskesmas) mengalami peningkatan.

Tabel 6. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat, 2021 dan 2022

Indikator	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan						
Rumah Sakit Pemerintah	7,57	15,01	7,78	3,52	7,69	5,98
Rumah Sakit Swasta	4,02	3,16	0,56	0,55	2,08	1,11
Praktek Dokter/Bidan	13,19	26,55	18,69	13,10	16,27	15,98
Klinik/Praktek Dokter Bersama	52,06	9,02	6,39	3,50	26,44	4,68
Puskesmas	24,28	48,22	61,75	75,29	45,30	69,49
UKBM*	0,30	0,02	4,64	4,05	2,74	3,19
Praktek Pengobatan Tradisional	0,54	0,11	3,62	0,46	2,27	0,38
Lainnya	1,25	0,32	0,82	1,11	1,01	0,94

Catatan: *) terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Sumber: Susenas Maret 2021-2022

Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa.

Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 93,29 persen pada tahun 2021 menjadi 95,11 persen di tahun 2022. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri ada peran dokter di perkotaan maupun di perdesaan serta bidan, terutama di perdesaan sebagai penolong persalinan. Umumnya tenaga kesehatan penolong persalinan masyarakat Sulawesi Tenggara di tahun 2022 adalah bidan (69,28 persen). Sebuah progress yang baik bahkan peningkatan cukup signifikan terjadi pada penolong kelahiran oleh dokter kandungan, dimana pada tahun 2021 sebesar 21,62 persen, dan meningkat sebesar 24,11 persen di tahun 2022. Demikian pula untuk dokter umum menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2021 sebesar 1,10 persen dan meningkat sebesar 1,29 persen di tahun 2022.

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Namun, pandemi seakan memukul mundur segala capaian bidang kesehatan. Hampir seribu tenaga kesehatan telah gugur dalam menjalankan tugasnya.

<https://sultra.bps.go.id>

3. Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Tenggara menjadi salah satu misi presiden dalam dalam RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan salah satu strategi untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

Pendidikan merupakan modal pembangunan bagi negara karena pendidikan merupakan sarana bagi setiap individu untuk mengenali dan mengembangkan potensi akal, potensi spiritual, potensi jasmani, dan potensi sosial agar mampu secara maksimal berkontribusi di dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi aspek kunci untuk mendirikan bangsa yang maju, kuat, dan berkarakter.. Pemerataan pendidikan juga menjadi agenda global tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) pada tujuan ketiga yaitu untuk menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa memandang status sosial dan ekonominya.

Pendidikan memegang peran penting dalam mengembangkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini dan menjadi bagian dari arah pembangunan. Yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil serta berkarakter. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencanangkan Program Pendidikan untuk Semua (education for All) termasuk didalamnya Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Kemampuan membaca dan menulis atau yang diistilahkan dengan melek aksara atau melek huruf merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Lebih lanjut, kemampuan ini juga merupakan bekal seseorang untuk dapat menemukan dan mengembangkan potensi diri demi kualitas hidup yang lebih baik dan berkontribusi sosial ekonomi. Karena itu, pemberantasan buta aksara merupakan amanah pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara yang harus dituntaskan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Sulawesi

Tenggara menerapkan berbagai strategi yang inovatif seperti program Sultra Cerdas. Yaitu kebijakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil mengimplementasikan pengetahuannya serta mumpuni melakukan rekayasa teknologi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan dilandasi kualitas iman dan taqwa.

Selanjutnya, evaluasi terhadap berbagai program peningkatan kemampuan baca tulis masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah menjadi penting dan indikator utama yang lazim digunakan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai AMH Sulawesi Tenggara penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2022 sebesar 95,79 persen meningkat jika dibandingkan dengan AMH 2021 yaitu 94,94 persen.

Meskipun capaian AMH terbilang sudah relatif tinggi, upaya peningkatan melek huruf perlu terus diupayakan terutama untuk menghapus disparitas AMH antar berbagai kelompok seperti jenis kelamin, kelompok usia maupun antar wilayah di Sulawesi Tenggara. Sebagai contoh adanya ketimpangan AMH berdasarkan jenis kelamin, dimana AMH laki-laki lebih tinggi yaitu 96,69 persen dibandingkan dengan AMH perempuan sebesar 94,88 persen. Jika berdasarkan kewilayahan, AMH wilayah perkotaan lebih tinggi dari AMH wilayah perdesaan, mengingat fasilitas sekolah lebih banyak di wilayah perkotaan dibanding di perdesaan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata durasi (tahun) yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Indikator lama sekolah mampu merepresentasikan capaian-capaian pembangunan pendidikan pada jangka panjang. Artinya, nilai rata-rata lama sekolah saat ini merupakan capaian dari berbagai program untuk meningkatkan partisipasi sekolah di masa lampau. Selain itu, lama sekolah juga menggambarkan capaian (stok) sumber daya manusia yang berkualitas karena telah mengeyam pendidikan formal.

Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas tercatat sebesar 9,59 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat, meningkat 0,07 tahun dibanding tahun 2021 sebesar 9,52 tahun. Sama halnya dengan AMH, RLS laki-laki juga lebih tinggi daripada RLS perempuan yaitu 9,74 tahun dan 9,43 tahun. Sementara lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun ke atas mengalami peningkatan yakni sebesar 9,13 di tahun 2021 dan 9,25 di tahun 2022.

Tabel 7. Beberapa Indikator Pendidikan (persen), 2021-2022

Indikator	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Usia 15+ Tahun						
Angka Melek Huruf	96,77	96,69	93,12	94,88	94,94	95,79
Rata-Rata Lama Sekolah	9,78	9,74	9,26	9,43	9,52	9,59
Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
7-12 tahun	99,11	98,74	99,21	99,38	99,16	99,05
13-15 tahun	93,57	93,22	96,63	96,50	95,06	94,80
16-18 tahun	73,15	73,80	76,98	75,26	75,02	74,53
19-23 tahun	32,68	31,42	34,57	36,70	33,64	33,98
Angka Partisipasi Murni (APM)						
SD	98,51	97,95	97,76	98,60	98,15	98,27
SMP	77,69	76,88	78,05	78,74	77,86	77,77
SMA	62,55	64,07	64,90	64,16	63,70	64,11
PT	27,09	26,78	30,15	31,87	28,65	29,24

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021-2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang dapat mencerminkan kemampuan penduduk, terutama penduduk usia sekolah, dalam mengakses pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini, pemerintah diamanahkan oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan menengah. Peran pemerintah tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan pendidikan tetapi juga memastikan agar pelayanan pendidikan dapat diakses secara lebih luas oleh seluruh penduduk salah satunya dengan meningkatkan APS. Program pemerintah yang mendukung uya tersebut diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sekolah dan ruang kelas baru, serta pemberian beasiswa.

Pada tahun 2022, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,05 persen, artinya setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat satu anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (drop out). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,80 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 74,53 persen, dan kelompok umur 19-23 tahun sebesar 33,98 persen. Dari keempat kelompok umur tersebut, partisipasi sekolah tertinggi pada kelompok usia 7-12 tahun. Hal ini berarti semakin bertambah usia, semakin besar peluang penduduk Sulawesi Tenggara tidak bersekolah lagi.

Selain Angka Partisipasi Sekolah (APS), indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan terkait dengan aspek kepastian mendapatkan layanan pada berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Namun, APM merupakan indikator yang lebih spesifik karena tidak hanya menggambarkan partisipasi penduduk tetapi juga mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi pada jenjang pendidikan formal. APM merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Jika diperhatikan indikator APS dan APM memperlihatkan pola yang sama, dimana persentasenya semakin menurun seiring bertambahnya usia kelompok penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS dan APM antara murid laki-laki dan perempuan relatif setara di semua jenjang pendidikan. Selama tahun 2021-2022, baik APS maupun APM pada semua jenjang mengalami sedikit peningkatan. APS mengalami peningkatan pada usia sekolah 19-23 tahun (perguruan tinggi). APM SD/ sederajat mencatat nilai yang paling besar yaitu 98,27 persen. Sementara untuk APM jenjang SMP/ sederajat sebesar 77,77 persen, APM jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 64,11 persen dan APM tingkat Perguruan Tinggi hanya sekitar 29,24 persen.

Putus Sekolah, Angka Mengulang, dan Angka Kelulusan

Indikator angka putus sekolah merupakan indikator untuk melihat jumlah anak usia sekolah yang tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun ajaran 2021/2022 angka putus sekolah menurun dibanding tahun sebelumnya kecuali untuk tingkat pendidikan SMP. Semakin tinggi tingkat pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Angka putus sekolah tertinggi pada tingkat pendidikan SMP dan SMA, masing-masing sebesar 1,68 dan 1,03.

Angka putus sekolah paling berpengaruh pada kelompok masyarakat miskin. Pandemi covid-19 berpengaruh pada kondisi ekonomi, memaksa sebagian siswa untuk berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Berdasarkan temuan lapangan komisi perlindungan anak Sulawesi Tenggara (KPAI), penyebab anak tidak menamatkan sekolahnya antara lain menikah, bekerja karena menunggak iuran sekolah, kecanduan game online, hingga meninggal dunia (republika.co.id, 6 maret 2021).

Indikator angka mengulang menunjukkan banyaknya siswa tinggal kelas menurut tingkat pendidikannya. Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun ajaran 2021/2022 tidak terdapat siswa yang tidak naik kelas di semua tingkat pendidikan. Sementara itu, angka kelulusan tahun ajaran 2021/2022 mengalami peningkatan dibanding tahun ajaran sebelumnya, kecuali di tingkat pendidikan SMA. Angka kelulusan secara rata-rata sudah mencapai 94 persen kecuali tingkat pendidikan SMA yang hanya mencapai 65,19 persen. Merespon pandemi covid-19, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan

pengadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan melalui surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Dengan demikian UN dan ujian kesetaraan tidak lagi menjadi syarat kelulusan peserta didik. Syarat kelulusan ditentukan dengan rapor tiap semester, nilai sikap/perilaku minimal baik, serta mengikuti ujian sekolah.

Tabel 8. Perkembangan Angka Putus Sekolah, Mengulang, Angka Kelulusan, Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah, dan Murid-Rombel Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2019/2020- 2021/2022

Indikator	Tahun Ajaran		
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Putus Sekolah			
SD	0,04	n/a	0,16
SMP	1,97	1,95	1,68
SMA	0,83	0,97	1,03
Angka Mengulang			
SD	1,79	4,62	4,28
SMP	2,11	1,58	1,09
SMA	2,12	2,52	3,28
Angka Kelulusan			
SD	95,28	95,58	97,24
SMP	89,18	90,88	91,19
SMA	68,28	70,65	65,19
Rasio Murid-Guru			
SD	12	11	12
SMP	11	10	9
SMA	14	13	12
SMK	11	11	9
Rasio Guru-Sekolah			
SD	10	11	11
SMP	15	16	17
SMA	23	23	26
SMK	20	22	23
Rasio Murid-Rombel			
SD	19	18	17
SMP	26	26	24
SMA	29	28	28
SMK	22	22	20

Sumber: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- BPS, Susenas Maret 2019-2022

Rasio Murid Guru, Rasio Guru-Sekolah, dan Rasio Murid-Rombel

Proses pembangunan pendidikan identik dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti jumlah sekolah dan guru. Hal ini dapat dipahami karena berbagai fasilitas pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan proses mendidik putra putri bangsa. Selain itu, kenyamanan proses belajar yang ditimbulkan oleh ketersediaan sarana yang baik mampu menumbuhkan motivasi belajar yang kuat dari para peserta didik. Beberapa indikator dapat dijadikan acuan untuk menilai kecukupan dari sarana dan prasarana pendidikan yakni diantaranya rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, dan rasio murid-rombel (rombongan belajar).

Rasio murid-guru merupakan perbandingan antara jumlah murid dan guru sehingga mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin besar nilai rasio murid-guru dapat menjadi salah satu tanda berkurangnya efektifitas proses pembelajaran karena pengawasan dan perhatian guru terhadap murid semakin berkurang. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD,SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid dan 15 murid pada jenjang SMK.

Tabel 8 memperlihatkan bahwa rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru selama periode tahun ajaran 2019/2020 -2021/2022 menunjukkan tren menurun, kecuali jenjang pendidikan SD. Secara kuantitas, ketersediaan jumlah guru memang sudah sangat ideal di ketiga jenjang pendidikan. Namun, terdapat tantangan lain dibalik prestasi gemilang tersebut. Salah satunya yakni permasalahan distribusi jumlah guru yang cenderung surplus di kota-kota besar dan defisit di daerah-daerah tertentu.

Guru merupakan fasilitator utama pada proses belajar mengajar para siswa. Sehingga, keberadaannya perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru untuk penentuan guru layak mengajar. Sementara dari segi kuantitas, jumlah guru per sekolah dapat menjadi salah satu indikator untuk bahan evaluasi. Pada tahun ajaran 2021/2022 rasio guru-sekolah meningkat dibanding tahun ajaran 2020/2021 kecuali jenjang pendidikan SD relatif tetap. Pada tahun ajaran 2020/2021 rasio guru sekolah pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 16 guru dan meningkat menjadi 17 guru di tahun ajaran 2021/2022, begitu pula halnya dengan jenjang pendidikan SMA dimana dari 23 guru menjadi 26 guru pada tahun ajaran 2021/2022.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai apakah sarana dan prasarana pendidikan yang ada telah memadai dan melengkapi kebutuhan proses belajar mengajar yakni kecukupan antara ruang kelas yang tersedia dengan jumlah peserta didik. Kecukupan ruang kelas yang tersedia dapat dilihat dari ukuran rasio murid per

rombongan belajar (rombel). Pada tahun ajaran 2021/2022, rata-rata jumlah siswa yang diakomodir dalam satu kelas di empat jenjang pendidikan relatif meningkat menurun kecuali jenjang pendidikan SMA yang relatif tetap. Murid pada jenjang pendidikan SD diakomodir dalam satu kelas sebanyak 17 murid. Dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang menetapkan jumlah peserta didik dalam satu kelas paling banyak sejumlah 28 siswa untuk SD, 32 siswa untuk SMP, dan 36 siswa untuk SMA/SMK, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia dapat menampung semua jumlah siswa yang ada.

<https://sultra.bps.go.id>

4. Ketenagakerjaan

Pandemi covid-19 yang terjadi pada 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak pada pasar tenaga kerja. Regulasi pembatasan sosial dalam rangka menekan penyebaran covid-19 berimplikasi pada pengurangan jam kerja dan jumlah pekerjaan (fiskal.kemenkeu.go.id, 2021). Hal ini terjadi karena penurunan jam operasional perusahaan/usaha dan pembatasan atau penutupan aktivitas usaha yang berpotensi menjadi sarana penularan. Perusahaan /usaha melakukan penyesuaian dengan mengurangi input produksi, salah satunya tenaga kerja. Pengurangan jam kerja, penurunan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sebagian pekerja dirumahkan adalah beberapa langkah yang diambil perusahaan/usaha dalam menyikapi situasi sulit ditengah kelesuan ekonomi yang terjadi. Perusahaan/usaha yang tak mampu bertahan akhirnya gulung tikar dan menutup usahanya sehingga pengangguran meningkat.

Guna menahan perlambatan ekonomi, pemerintah berupaya menanggulangi dampak pandemi terhadap tenaga kerja melalui pemberian stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, dan jaring pengaman sosial berupa bantuan kepada pekerja (fiskal. Kemenkeu.go.id, 2021).

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat dan Pengangguran Menurun

Pemulihan ekonomi pada tahun 2021-2022 menjadi prasyarat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Geliat ekonomi yang menunjukkan tren positif menjadi sinyal kuat perbaikan indikator ketenagakerjaan, seperti kenaikan TPAK, penurunan TPT, dan peningkatan rata-rata upah pekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, secara umum, TPAK pada Agustus 2023 sebesar 70,07 persen, naik 1,25 persen poin dibandingkan capaian TPAK Agustus 2022. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 70 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Penduduk 15 tahun ke atas dikategorikan sebagai angkatan kerja jika bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau pengangguran. Sementara itu pada Februari 2023, TPAK tercatat sebesar 67,55 persen, naik 1,24 persen poin dibandingkan Februari 2022. Kenaikan persentase angkatan kerja ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang semakin bertambah untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dipertanian. Pada Februari 2023, TPAK di perdesaan sebesar 68,56 persen, sementara TPAK di perkotaan sebesar 65,66 persen. Baik di perdesaan maupun perkotaan mengalami kenaikan TPAK dibandingkan Februari 2023. TPAK di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan karena pasokan angkatan kerja usia muda dan lansia di perdesaan lebih tinggi. Keterbatasan ekonomi yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di perdesaan mendorong penduduk usia muda untuk masuk ke pasar

kerja meskipun masih masuk dalam usia sekolah. Begitu pula lansia di perdesaan yang cenderung masih aktif dalam perekonomian (setiawan, 2008).

Pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pelonggaran mobilitas mendorong perbaikan pasar kerja. Lapangan pekerjaan semakin bertambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun. Secara keseluruhan pada Agustus 2023, TPT tercatat sebesar 3,15 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Sementara itu, TPT Februari 2023 tercatat sebesar 3,66 persen atau turun 0,20 persen poin dibanding TPT Februari 2022 sebesar 3,86 persen. TPT yang semakin menurun menunjukkan semakin berkurangnya pasokan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada Februari 2023, TPT di perkotaan sebesar 5,20 persen atau dua kali lebih tinggi dibandingkan TPT diperdesaan sebesar 2,86 persen. Pasar kerja di perkotaan cenderung menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi lebih tinggi dibanding di perdesaan, seperti kualifikasi tingkat pendidikan, sehingga banyak pencari kerja yang tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Kondisi sebaliknya terjadi di perdesaan dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Ketersediaan lahan pertanian yang lebih luas dibanding di perkotaan dan tidak di perlakannya kualifikasi pendidikan tinggi memudahkan angkatan kerja di perdesaan untuk terhindar dari risiko menganggur. Disamping itu, kondisi sosial ekonomi yang lemah diperdesaan mendorong angkatan kerja di perdesaan untuk menerima lapangan pekerjaan yang tersedia meskipun tidak sesuai dengan keterampilan dan upah rendah.

Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2020-2023

Indikator	2020 (Agt)	2021 (Feb)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2022 (Agt)	2023 (Feb)	2023 (Agt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja							
Perkotaan	66,73	67,38	67,26	62,48	66,18	65,66	69,18
Perdesaan	71,59	72,71	71,72	68,34	70,41	68,56	70,65
Perkotaan+Perdesaan	69,83	70,76	70,09	66,31	68,82	67,55	70,07
Tingkat Pengangguran Terbuka							
Perkotaan	6,74	7,82	5,75	5,73	4,73	5,2	4,01
Perdesaan	3,44	2,29	2,93	2,95	2,59	2,86	2,59
Perkotaan+Perdesaan	4,58	4,22	3,92	3,86	3,36	3,66	3,15

Sumber : BPS, Sakernas 2020-2023

Penurunan tingkat pengangguran pada Agustus 2023 tidak terlepas dari aktivitas di berbagai sektor perekonomian yang mulai bangkit sejak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Sulawesi Tenggara. Pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Kondisi lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan maupun keahlian tertentu, sehingga banyak angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan tenaga kerja di perkotaan. Sementara itu, angkatan kerja di perdesaan lebih banyak terserap di sektor pertanian yang tidak memerlukan keahlian khusus. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh pada sektor pertanian yang tumbuh positif selama pandemi. Sebaliknya di perkotaan dampak pandemi Covid-19 lebih terasa. Pembatasan sosial pada sektor ekonomi di perkotaan cukup menghambat aktivitas ekonomi sehingga angka pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan.

Pengangguran Tamatan SMK Tertinggi

Karakteristik penganggur menurut tingkat pendidikan mencerminkan kualitas Angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Penurunan tingkat pengangguran pada Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022 terjadi pada tamatan SMP, Diploma I/II/III dan Universitas, sementara peningkatan tingkat pengangguran terjadi pada tamatan SD/ sederajat, SMA Umum, dan SMK. Secara keseluruhan, pengangguran terbuka masih banyak dialami penduduk dengan pendidikan tertinggi sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan persentase sebesar 5,73 persen. Artinya 6 dari setiap 100 angkatan kerja lulusan SMK menganggur. Padahal, lulusan SMK diharapkan siap masuk dalam dunia kerja berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Hal ini menjadi perhatian sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi ketidaksesuaian keahlian yang dihasilkan dari lulusan SMK dengan kebutuhan industri yang dibutuhkan saat ini. Penguatan kerjasama antara pemerintah, akademisi dan pelaku usaha dalam mendorong pengembangan kurikulum pendidikan SMK dan program sertifikasi untuk lulusan SMK menjadi modal penting untuk menciptakan lulusan SMK yang handal dan siap diterima dalam pasar kerja (cnbcsulawesitenggara.com,2019.).

Menurut daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan struktur tingkat pendidikan antara penganggur di perkotaan dan perdesaan. Tingkat pengangguran pada mereka yang berpendidikan rendah (SMA ke bawah) di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan. Hal ini menunjukkan lapangan pekerjaan di perkotaan cenderung membutuhkan kualifikasi pendidikan lebih tinggi sehingga mereka yang berpendidikan rendah tidak terserap dan menjadi pengangguran. Di perdesaan, angkatan kerja dengan pendidikan rendah masih dapat memperoleh kesempatan kerja seperti di sektor pertanian. Dengan kata lain, kualitas modal manusia dalam pasar tenaga kerja di perdesaan relatif lebih rendah yang dicerminkan dari struktur pendidikan yang lebih rendah dibandingkan di perkotaan.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2021-2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2021 (Feb)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2022 (Agt)	2023 (Feb)	2023 (Agt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	1,3	1,67	n/a	1,38	1,75	1,48
SMP	2,26	2,79	n/a	2,32	2,39	2,17
SMA Umum	6,9	6,54	n/a	4,88	5,06	4,69
SMA Kejuruan	7,66	5,12	n/a	5,27	6,01	5,73
Diploma I/II/III	5,73	4,52	n/a	4,28	8,02	1,75
Universitas	5,61	4,69	n/a	5,11	5,73	3,80
Total	4,22	3,92	3,86	3,36	3,66	3,15

Sumber : BPS, Sakernas 2021-2023

Struktur tenaga kerja dipasar kerja dapat digambarkan melalui komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha. Secara keseluruhan sebagian besar penduduk bekerja terserap di sektor jasa dengan persentase sebesar 49,32 persen pada Agustus 2023. Angka ini naik 0,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Persentase penduduk bekerja di sektor industri juga mengalami peningkatan, dari 18,71 persen pada Agustus 2022 menjadi 19,87 persen pada Agustus 2023. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi, yaitu 30,81 persen pada Agustus 2023. Angka ini turun 2,01 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Peningkatan persentase penduduk bekerja di sektor industri dan jasa yang disertai penurunan di sektor pertanian menjadi indikasi adanya transformasi struktur lapangan usaha tenaga kerja yang bergerak menuju sektor industri dan jasa.

Angkatan kerja dengan pendidikan tinggi lebih sulit untuk masuk ke dunia kerja akibat kurangnya lapangan kerja dengan kualifikasi pendidikan SMA/SMK ke atas. Selain itu, pencari kerja terdidik cenderung memiliki reservation wage (upah harapan pencari kerja) yang lebih tinggi dibandingkan pencari kerja berpendidikan rendah (Handayani, 2015). Untuk menurunkan angka pengangguran terdidik diperlukan perluasan kesempatan kerja dengan kualifikasi yang sesuai serta peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih berdaya saing di pasar tenaga kerja global.

Sekitar setengah dari penduduk perempuan yang bekerja adalah di sektor jasa-jasa. Serapannya mencapai 62,88 persen di Agustus 2023 dan 62,78 persen di Agustus 2022. Sedangkan pekerja Laki-laki sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, dimana di Agustus 2023 sebesar 34,57 persen dan 37,23 persen di Agustus 2022. Kelompok sektor industri mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling dalam dibanding kedua sektor lainnya. Penyerapannya pada Agustus 2023 sebesar 19,87 persen dan pada Agustus 2022 sebesar 18,71 persen, turun sebesar 1,16 persen poin.

Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (Persen), 2021-2023

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	2021 (Feb)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2022 (Agt)	2023 (Feb)	2023 (Agt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki						
Pertanian	40,23	36,86	33,82	37,23	35,44	34,57
Industri Pengolahan	22,56	24,38	24,28	23,93	26,17	24,74
Jasa-Jasa	37,20	38,77	41,90	38,84	38,40	40,68
Perempuan						
Pertanian	29,62	28,16	26,26	26,27	26,32	24,92
Industri Pengolahan	12,46	12,28	13,24	10,94	15,53	12,21
Jasa-Jasa	57,93	59,56	60,50	62,78	58,15	62,88
Laki-Laki + Perempuan						
Pertanian	35,91	33,34	31,01	32,82	31,92	30,81
Industri Pengolahan	18,44	19,48	20,18	18,71	22,06	19,87
Jasa-Jasa	45,65	47,18	48,81	48,47	46,02	49,32

Sumber : BPS, Sakernas 2021-2023

Pekerja Formal Meningkat

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja ke-17 tahun 2013, pekerja sektor formal didefinisikan sebagai berikut: "Pekerja sektor formal adalah pekerja dengan hubungan kerja yang tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)." Orang yang melakukan pekerjaan formal biasanya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki keahlian khusus di bidangnya, sehingga disebut dengan tenaga kerja terlatih dan terdidik (skilled and trained labour).

Berbeda dengan pekerjaan formal, pekerjaan informal adalah pekerjaan yang pekerjaannya bertanggungjawab atas perseorangan, bekerja pada perusahaan yang kurang terorganisasi, serta modal kerjanya berasal dari biaya sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2013, pekerja sektor informal didefinisikan seperti berikut: "Pekerja sektor formal adalah pekerja dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)." Selain itu, orang-orang yang melakukan pekerjaan

informal umumnya berasal dari tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengenyam pendidikan sama sekali. Mereka juga tidak terlalu memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu, dan seringkali hanya menggunakan tenaganya sebagai modal kerja. Karena itu, pekerja informal disebut juga dengan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik (*untrained and unskilled labour*).

Meski orang yang melakukan pekerjaan informal seringkali disebut dengan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, namun kenyataannya tidak semua orang yang melakukan pekerjaan informal merupakan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini disebabkan karena ada beberapa orang terdidik dan terlatih yang mungkin saja bekerja di sektor informal. Alasannya bisa beragam, salah satunya adalah faktor keberuntungan, kesempatan kerja yang berbeda, serta motivasi diri pekerja tersebut.

International Labour Organization (ILO) pada 2010 menyebut pekerja informal sebagai pekerja rentan. Mereka tidak mendapatkan hak dasar layaknya pekerja formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jam kerja serta tunjangan lainnya. Jika dilihat dari status pekerjaan, persentase penduduk berumur 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Agustus 2023 di dominasi oleh pekerja informal yaitu sebesar 61,84 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,55 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022 yakni sebesar 62,39 persen. Sebaliknya pekerja formal pada Agustus 2023 sebesar 38,61 persen, meningkat 0,55 persen poin jika dibandingkan pada Agustus 2022 sebesar 37,61 persen. Hal ini mengindikasikan tingkat pendidikan pekerja di Sulawesi Tenggara sudah ke jenjang pendidikan tinggi. Di samping itu dilihat dari kisaran upah yang diberikan, para pekerja formal sudah dijamin untuk mendapatkan kisaran gaji yang sama nominalnya dan sudah teratur (biasanya diberikan setiap satu bulan sekali pada awal atau akhir bulan tergantung pada kesepakatan tiap perusahaan. Bahkan orang yang melakukan pekerjaan formal bisa mendapat uang insentif atau uang lembur jika bekerja di luar jam kerja. Dengan dasar pertimbangan ini, sehingga banyak penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan formal.

Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Formal dan Informal dan Jenis Kelamin (Persen), 2021-2023

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	2021 (Feb)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2022 (Agt)	2023 (Feb)	2023 (Agt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki						
Formal	40,32	40,63	43,63	40,77	39,37	40,86
Informal	59,68	59,37	56,37	59,23	60,63	59,14
Perempuan						
Formal	34,00	32,12	36,57	32,91	33,56	33,93
Informal	66,00	67,88	63,43	67,09	66,44	66,07
Laki-Laki + Perempuan						
Formal	37,75	37,19	41,01	37,61	37,13	38,16
Informal	62,25	62,81	58,99	62,39	62,87	61,84

Sumber : BPS, Sakernas 2021-2023

Hingga saat ini, perempuan sebagian besar memilih pekerjaan informal, persentase pada Agustus 2023 sebesar 66,07 persen, menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 67,09 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja memiliki ketertarikan pada pekerjaan sektor formal, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Upah Buruh/Pekerja Turun

Rata-rata upah buruh/pekerja pada Februari 2023 sebesar 2,65 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dibandingkan Februari 2022. Penurunan rata-rata upah juga merupakan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa pelaku ekonomi untuk mengurangi kapasitas produksinya. Sedangkan rata-rata upah buruh/karyawan di Agustus 2022 sebesar 2,83 juta rupiah, naik dari Agustus 2021 sebesar 10,05 persen. Masih terdapat kesenjangan rata-rata upah pekerja antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2023, rata-rata upah pekerja laki-laki tercatat 2,95 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan upah buruh/karyawan perempuan yang hanya mencapai 2,15 juta rupiah.

Tabel 13. Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan /Pegawai Menurut Jenis Kelamin (rupiah), 2020-2023

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Februari 2022	Agustus 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-Laki	3.161.533	2.820.196	2.753.022	2.822.865	2.937.441	3.174.156	2.952.965
Perempuan	2.165.227	2.146.617	2.212.907	2.152.322	2.166.187	2.252.973	2.150.828
Laki-Laki+Perempuan	2.755.928	2.574.589	2.544.107	2.573.453	2.673.405	2.831.991	2.653.241

Sumber : BPS, Sakernas 2020-2023

Sementara itu upah buruh/karyawan meningkat seiring dengan daerah tempat tinggalnya. Buruh/karyawan yang tinggal di daerah perkotaan mendapatkan upah rata-rata 3,11 juta rupiah per bulan pada Februari 2023. Upah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan buruh/karyawan di daerah perdesaan yaitu sebesar 2,23 juta rupiah per bulan.

Tabel 14. Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Daerah Tempat Tinggal (rupiah), 2020-2023

Daerah Tempat Tinggal	Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Februari 2022	Agustus 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	3.035.486	2.890.529	2.721.879	2.901.409	2.985.822	3.153.520	3.111.709
Perdesaan	2.443.839	2.242.813	2.337.045	2.222.269	2.409.746	2.492.116	2.230.396
Perkotaan+Perdesaan	2.755.928	2.574.589	2.544.107	2.573.453	2.673.405	2.831.991	2.653.241

Sumber : BPS, Sakernas 2020-2023

Status Pekerjaan Utama Masih di Dominasi oleh Buruh/karyawan/Pegawai

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, selama paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Status pekerjaan didefinisikan sebagai jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Adapun status pekerjaan dikategorikan menjadi tujuh kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel 15. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021-2023

Status Pekerjaan Utama	2021 (Feb)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2022 (Agt)	2023 (Feb)	2023 (Agt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	18,19	20,94	19,08	25,17	23,64	25,30
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	19,96	18,20	19,75	16,33	17,84	16,06
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4,72	3,64	4,72	3,11	3,54	3,28
Buruh/Karyawan	33,03	33,55	36,28	34,51	33,59	34,88
Pekerja Bebas	3,83	5,35	5,23	4,66	4,45	4,32
Pekerja tak dibayar	20,28	18,31	14,93	16,23	16,94	16,16

Sumber : BPS, Sakernas 2020-2023

Pada tabel 13 tercatat bahwa status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2023 34,88 persen meningkat dibandingkan Agustus 2022 sebesar 34,51 persen. Adanya pandemi Covid-19, yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2020, membuat sebahagian masyarakat membuat usaha sendiri, hal ini dapat dilihat pada status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri di Agustus 2023 sebesar 25,30 persen meningkat sebesar 0,13 persen dari Agustus 2022. Peningkatan pekerja buruh tetap juga terjadi sebagai akibat kegiatan pada sektor perekonomian sudah bangkit kembali., dimana tercatat di Agustus 2022 sebesar 3,11 persen dan meningkat di Agustus 2023 sebesar 3,28 persen.

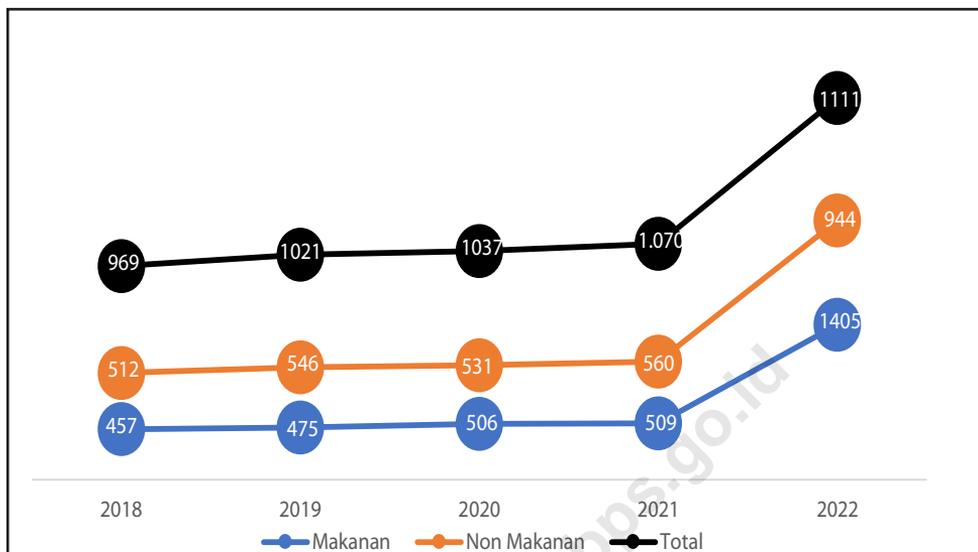
5. Taraf dan Pola Konsumsi

Salah satu penopang utama ekonomi Indonesia adalah konsumsi masyarakat, Hal ini dikarenakan daya beli dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga, Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah, Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga, Artinya rumah tangga yang sejahtera adalah jika persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan, Taraf dan pola konsumsi penduduk menggambarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar atau dengan istilah lain memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, Hal ini tentunya menjadi isu yang penting karena tercantum dalam tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu mengeliminasi kemiskinan dalam berbagai bentuk di wilayah manapun.

Pengeluaran rumah tangga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi Pengeluaran untuk Makanan dan Pengeluaran Bukan Makanan, Dalam perkembangannya, pengeluaran rumah tangga dari tahun ke tahun tampaknya telah menunjukkan pergeseran pola pengeluaran dari pengeluaran makanan ke pengeluaran bukan makanan, Pengeluaran bukan makanan cenderung memiliki porsi yang lebih besar dibanding makanan, Pada umumnya, pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan yang rendah, dan sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan yang tinggi, Keadaan ini biasanya terjadi pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung, Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022), tingkat pengeluaran per kapita cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, Pada tahun 2018, tingkat pengeluaran per kapita tercatat sebesar 0,969 juta rupiah, Selanjutnya, tingkat pengeluaran per kapita mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya, masing-masing tercatat di tahun 2019 sebesar 1,021 juta rupiah, tahun 2020 sebesar 1,037 juta rupiah, tahun 2021 sebesar 1,070 juta rupiah dan tahun 2022 sebesar 1,135 juta rupiah, Meskipun di tahun 2021 yang merupakan masa ketika pandemi Covid-19 sudah berlansung selama setahun, tingkat pengeluaran per kapita mengalami penurunan hingga sebesar 1,47 juta rupiah.

Gambar 8. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran (000 Rp), 2018-2022



Sumber : Susenas 2018-2022

Rata-rata pengeluaran Kelompok makanan dan bukan makanan per kapita sebulan penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,111,595,-, Angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,83 persen jika dibandingkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan tahun 2021 yaitu sebesar Rp, 1,070,493,-, Persentase pengeluaran bukan makanan memperlihatkan adanya penurunan dari 52,38 persen di tahun 2021 menjadi 51,87 persen di tahun 2022, sedangkan pengeluaran untuk makanan meningkat dari 47,62 di tahun 2021 persen menjadi 48,13 persen di tahun 2022, Penurunan terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran bukan makanan kecuali perumahan dan fasilitas rumah tangga terjadi peningkatan sebesar 0,73 persen serta pakaian alas kaki dan tutup kepala sebesar 0,10 persen.

Tabel 16. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Sulawesi Tenggara, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	509.723	535.048	47,62	48,13
Bukan Makanan	560.770	576.547	52,38	51,87
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	285.125	304.149	26,63	27,36
Aneka Barang dan Jasa	106.046	107.463	9,91	9,67
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	30.166	32.434	2,82	2,92
Barang Tahan Lama	75.305	72.969	7,03	6,56
Lainnya	64.128	59.533	5,99	5,36
Jumlah	1.070.493	1.111.595	100,00	100,00

Sumber: Publikasi Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi (Susenas Maret 2021, Maret 2022)

Dilihat dari tempat tinggal, pada tahun 2022 menunjukkan proporsi konsumsi makanan di perdesaan sebesar 52,41 persen, sedangkan untuk konsumsi bukan makanan hanya sebesar 47,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengeluaran penduduk perdesaan digunakan untuk kebutuhan makanan lebih tinggi dari kebutuhan konsumsi bukan makanan. Berbeda dengan proporsi konsumsi perdesaan, penduduk perkotaan lebih banyak mengonsumsi barang bukan makanan daripada konsumsi makanan. Pada tahun 2022 sebesar 56,91 persen pengeluaran per kapita di daerah perkotaan dihabiskan untuk konsumsi bukan makanan.

Tabel 17. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2021-2022

Klasifikasi Daerah	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	42,92	43,09	57,08	56,91
Perdesaan	51,67	52,41	48,33	47,59
Perkotaan + Perdesaan	47,62	48,13	52,38	51,87

Sumber: Publikasi Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi (Susenas Maret 2021, Maret 2022)

Tabel 18. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini di Sulawesi Tenggara, 2020-2022

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	16,63	37,5	45,87	0,389
2021	16,97	37,36	45,67	0,390
2022	17,38	36,74	45,88	0,387

Sumber: Berita Resmi Statistik

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, Menurut Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, Disamping kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Indeks Gini selama 2020-2022 cenderung fluktuatif dari 0,389 di tahun 2020 naik menjadi 0,390 di tahun 2021 kemudian turun menjadi 0,387 di tahun 2022, Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok terus diupayakan untuk turun.

Tabel 18 menunjukkan bahwa selama periode 2020-2022 pengeluaran yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah mengalami peningkatan, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah mengalami penurunan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi cenderung meningkat.

Konsumsi Energi dan Protein

Mengacu kepada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI (WNPG XI) tahun 2018, angka kecukupan gizi dengan rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing adalah sebesar 2,100 kkal dan 57 gram per kapita per hari, Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein dapat dijadikan acuan.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita Sulawesi Tenggara sejak 2020 hingga 2022 berfluktuatif, Pada tahun 2020 rata-rata konsumsi kalori penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 2,027,62 kkal, naik di tahun 2021 menjadi 2,046,29 kkal dan turun di tahun 2022 menjadi 1,948,63 kkal, Kecenderungan menurunnya konsumsi kalori salah satu penyebabnya saat pandemi kondisi perekonomian masyarakat menurun sehingga membatasi pengeluaran.

Jika dicermati rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk Sulawesi Tenggara belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI yaitu sebesar 2,100 kkal.

Tabel 19. Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, 2020-2022

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalori (kcal/kapita/hari)			
2020	2.016,16	2.035,04	2.027,62
2021	2.021,49	2.060,13	2.046,29
2022	1.889,21	1.982,45	1.948,63
Protein (gram/kapita/hari)			
2020	64,14	58,89	60,95
2021	64,91	58,70	60,92
2022	62,29	59,31	60,39

Sumber: Publikasi Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi (Susenas Maret 2020 - Maret 2022)

Untuk rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Sulawesi Tenggara sejak 2020 hingga 2022 menunjukkan tren menurun, dari 60,95 gram di tahun 2020 menjadi 60,39 gram di tahun 2022, Rata-rata konsumsi protein penduduk sudah memenuhi ketentuan atau batasan kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI yaitu sebesar 57 gram protein, Ini merupakan pencapaian yang baik dari sisi asupan protein untuk penduduk Sulawesi Tenggara.

Konsumsi kalori per kapita penduduk di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan akses masyarakat dengan sumber pangan dimana rata-rata penduduk perdesaan lebih banyak berkecimpung di sektor pertanian, Sementara konsumsi protein per kapita per hari penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

6. Perumahan

Tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia. Dalam teori kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, atau yang biasa dikenal dengan *Maslow's Hierarchy of Needs*, kebutuhan manusia terdiri dari lima tingkatan, dimulai dari yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan keamanan dan keselamatan (*safety or security needs*), kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan penghargaan (*esteem needs*), dan kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*). Kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling dasar mencakup kecukupan kebutuhanmakanan, pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal untuk berlindung dan beristirahat.

Tempat tinggal masih menjadi isu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, karena sangat memegang peranan penting dalam kelangsungan dan keberlanjutan hidup manusia dalam bermasyarakat. Pertambahan penduduk di Indonesia setiap tahun kurang diimbangi dengan pembangunan dan penyediaan rumah yang terjangkau menjadi sumber masalah dalam tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari, dan berkelanjutan (Kepmen No.9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk terpenuhi.

Perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah tinggal yang dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Karakteristik kualitas rumah tinggal selain mencakup aspek fisik rumah juga mencakup fasilitas rumah tinggal berupa fasilitas dasar yang dibutuhkan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi perumahan, meliputi: sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak, akses terhadap air minum

yang layak, fasilitas buang air besar dan tempat penampungan akhir tinja serta status kepemilikan rumah tinggal.

Selain ketersediaan tempat tinggal, kondisi dan kualitas tempat tinggal itu sendiri menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Tempat tinggal yang memiliki kondisi fisik yang baik dan layak dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Secara umum, dari tahun 2021 ke tahun 2022, kualitas tempat tinggal penduduk di Sulawesi Tenggara terus membaik. Untuk kondisi lantai, rumah tangga yang bertempat tinggal dengan lantai bukan tanah ada sedikit peningkatan 98,22 persen pada tahun 2021 menjadi 98,61 persen pada tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada rumah tangga yang memiliki atap layak yaitu atap beton, genteng, sirap seng dan asbes (97,55 persen pada tahun 2021 menjadi 98,58 persen pada tahun 2022). Akan tetapi rumah tangga menempati tempat tinggal dengan dinding layak mengalami penurunan dari 99,40 persen pada tahun 2021 menjadi 98,68 persen pada tahun 2022. Selain itu, masih ada sedikit kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan untuk kondisi tempat tinggal yang berkualitas, khususnya dalam hal jenis atap tempat tinggal.

Tabel 20. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Sulawesi Tenggara, 2021 dan 2022

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai Bukan Tanah (%) ¹	98,66	98,93	97,97	98,43	98,22	98,61
Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, dan Asbes (%) ²	99,13	99,48	97,47	98,06	97,55	98,58
Dinding Terluas Memenuhi Syarat Layak Huni (%) ²	99,42	99,03	99,39	98,48	99,40	98,68
Rata-Rata Luas Lantai per Kapita	24,81	24,73	22,91	21,23	23,59	22,51

Catatan: ¹ Bahan bangunan lantai terluas dari marmer/granit, keramik, parket/vinil karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bamboo.

² Bahan bangunan dinding yang memenuhi syarat layak huni yaitu bahan bangunan utama dinding terluasnya adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, dan kayu/papan.

Sumber: Susenas Kor 2020-2021, BPS (diolah)

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menghuni rumah yang berlantai bukan tanah baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Jika dicermati lebih jauh terjadi disparitas yang kecil antara perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang menghuni rumah yang berlantai bukan tanah di daerah perkotaan 0,69 persen lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Meskipun demikian, disparitasnya makin mengecil

terlihat pada tahun 2022 perbedaannya menjadi 0,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tempat tinggal di daerah perdesaan jauh semakin membaik. Bukan hal yang mustahil beberapa tahun ke depan akan menyamai daerah perkotaan.

Tidak hanya kondisi fisik bangunan, tempat tinggal yang layak juga dilihat dari kriteria lainnya, seperti sarana air minum, fasilitas buang air, tempat pembuangan sampah, dan yang lainnya. Sebagai tempat berlindung, rumah harus memiliki struktur fisik, sarana yang baik, dan lingkungan yang sehat sehingga rumah dapat memberikan fungsi yang optimal dalam mencapai derajat kesehatan penghuninya. Dengan demikian, masyarakat yang terbentuk memiliki kualitas dan produktivitas yang baik.

Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Sulawesi Tenggara (persen), 2021 dan 2022

Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber Air Minum yang Terdiri dari Air Kemasan, Air Isi Ulang & Ledeng	71,50	71,57	34,19	39,09	47,53	50,93
Sumber Air Minum Bersih ¹	92,52	88,40	79,49	80,57	84,15	83,42
Akses Air Layak ²	97,16	95,55	89,03	94,11	91,94	94,64
Jamban Sendiri	90,29	92,22	83,04	83,33	85,64	86,57
Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	86,66	88,68	74,33	75,27	78,74	80,16
Sumber Penerangan Listrik	99,89	99,81	99,17	99,64	99,43	99,70

Catatan: ¹ Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m].

² Terdiri dari ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung serta jika sumber air minum dari air kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan ledeng, air hujan, sumur bor pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung.

Sumber: Susenas Kor 2021-2022, BPS (diolah)

Tabel 21 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang dapat mengakses sumber air minum bersih terjadi penurunan. Berdasarkan data Susenas, persentase rumah tangga yang mengakses sumber air minum bersih menurun dari 84,15 persen pada tahun 2021 menjadi 83,42 persen pada tahun 2022, sedangkan akses air layak mengalami peningkatan 94,64 persen rumah tangga sudah mengakses air layak pada tahun 2022. Akses air minum bersih dan layak antara daerah perkotaan dan perdesaan sudah meunjukkan kecilnya kesenjangan yang terjadi. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga di perkotaan yang mengakses air layak ada sebesar 95,55 persen, sedangkan di perdesaan hanya sebesar 94,11 persen.

Selain akses air, fasilitas sanitasi juga menjadi kriteria tempat tinggal yang sehat. Rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik pada tahun 2022 mencapai 80,16 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 78,74 persen. Ditinjau dari daerah tempat tinggal, rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik di perkotaan mencapai 88,68 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 75,27 persen. Rendahnya persentase tersebut menandakan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses sanitasi yang layak, terutama untuk daerah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan dalam upaya penyediaan sanitasi yang layak seharusnya dapat menjangkau semua daerah, tetapi angka ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2021.

Selanjutnya, energi listrik juga merupakan kebutuhan yang vital dalam kehidupan bermasyarakat di zaman yang serba modern ini. Ketersediaan listrik sebagai sumber energi akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Energi listrik berperan sebagai penopang kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu faktor dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keberadaan tenaga listrik tidak hanya sebagai sumber penerangan tetapi juga sebagai jendela masuknya kehidupan bermasyarakat yang lebih modern.

Dari tahun 2021 ke tahun 2022, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik baik di perkotaan dan perdesaan mencapai sekitar 99 persen. Tingginya persentase ini menyatakan bahwa sudah hampir semua rumah tangga di Sulawesi Tenggara dapat mengakses listrik sebagai sumber penerangan. Energi listrik juga sudah menjangkau wilayah perdesaan di Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2022 sudah sebesar 99,64 persen rumah tangga di perdesaan yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utamanya.

Tabel 22. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Sulawesi Tenggara (persen), 2021 dan 2022

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri	75,02	82,88	92,62	93,68	86,33	89,74
Kontrak, Sewa	10,50	6,29	0,83	0,61	4,29	2,68
Bebas Sewa	13,24	10,02	6,03	5,45	8,60	7,12
Rumah Dinas	1,24	0,81	0,52	0,27	0,78	0,47

Sumber : Susenas Kor 2021-2022, BPS (diolah)

Indikator perumahan berikutnya yang dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk adalah status kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah dapat menunjukkan keterjangkauan tempat tinggal bagi masyarakat dan juga dapat digunakan untuk mengukur isu backlog yang terjadi di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara khususnya. Berdasarkan data Susenas tahun 2021 dan 2022, sebagian besar rumah tangga di Sulawesi Tenggara tinggal di rumah dengan status milik sendiri, yaitu sekitar 89 persen. Ditinjau dari daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga di perdesaan yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 93,68 persen pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di perkotaan sebesar 82,88 persen. Lebih rendahnya persentase di perkotaan tersebut dapat disebabkan oleh ketersediaan tanah yang terbatas sehingga berdampak pada tingginya harga tanah dan tempat tinggal. Sulit dan tidak terjangkau harga tempat tinggal di perkotaan mendorong 10,02 persen masyarakatnya untuk tinggal di rumah bebas sewa dan 6,29 persen masyarakatnya menempati rumah kontrak/sewa.

7. Kemiskinan

Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 11,43 persen atau sekitar 321,53 ribu orang. Jika dibandingkan tahun 2022, persentase penduduk miskin naik 0,16 persen atau sekitar 6,79 ribu penduduk. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah perdesaan menjadi yang paling banyak dihuni oleh penduduk miskin. Pada tahun 2023, penduduk miskin di perdesaan mencapai 13,94 persen atau sekitar 241,64 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perdesaan bertambah sekitar 0,37 persen poin atau sekitar 2,75 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,40 persen atau sekitar 79,89 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perkotaan bertambah sekitar 0,45 persen poin atau sekitar 9,95 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 23. Perkembangan Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023

Daerah Tempat Tinggal	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	75,05	69,94	79,89	7,66	6,95	7,40
Perdesaan	243,65	239,85	241,64	13,89	13,57	13,94
Perkotaan + Perdesaan	318,70	309,79	321,53	11,66	11,17	11,43

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Perkembangan Garis Kemiskinan

Konsep penduduk miskin yang digunakan BPS adalah semua penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2021-2023, garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan harga komoditas makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 443.980 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,86 persen dibandingkan tahun 2022. Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, garis kemiskinan di wilayah perkotaan (Rp 463.387 per kapita per bulan) lebih besar dibandingkan dengan garis kemiskinan di wilayah perdesaan (Rp 431.962 per kapita per bulan).

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 75,18 persen.

Tabel 24. Garis Kemiskinan di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023

Daerah Tempat Tinggal	Garis Kemiskinan (Rupiah per Bulan per Kapita)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	394.183	420.442	463.387
Perdesaan	369.824	394.734	431.962
Perkotaan + Perdesaan	378.589	404.137	443.980

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 24,71 persen di perkotaan dan 27,17 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (9,60 persen di perkotaan dan 11,57 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah tongkol/tuna/cakalang (5,04 persen di perkotaan dan 4,01 persen di perdesaan), Roti (3,08 di perkotaan dan 3,58 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,33 persen di perkotaan dan 2,57 persen di perdesaan), gula pasir (2,28 persen di perkotaan dan 2,70 persen di perdesaan), kue basah (2,47 persen di perkotaan dan 3,35 di perdesaan), mie instan (2,26 persen di perkotaan dan 2,13 persen di perdesaan), kembung (2,75 persen di perkotaan dan 2,19 di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, angkutan dan perawatan kulit, muka, kuku, rambut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. (BRS BPS Sulawesi Tenggara No. 50/07/74/Th.XIX, 17 Juli 2023).

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat perkembangan kemiskinan yaitu indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin besar P2 menunjukkan semakin lebarnya variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin. Artinya, semakin parah kemiskinan yang terjadi.

Tabel 25. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023

Daerah Tempat Tinggal	Indeks Kedalaman Kemiskinan		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	1,328	1,031	1,079
Perdesaan	2,620	2,269	2,509
Perkotaan + Perdesaan	2,157	1,820	1,961

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Selama tiga tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tenggara cukup berfluktuatif. Dimana pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tenggara sebesar 2,157, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,337 poin menjadi 1,820 di tahun 2022. Sementara pada tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan tersebut naik 0,141 poin hingga mencapai 1,961. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal, nilai indeks kedalaman kemiskinan wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan sebesar 2,509, sedangkan di daerah perkotaan nilai indeksnya lebih kecil sebesar 1,079.

Tabel 26. Indeks Keparahhan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023

Daerah Tempat Tinggal	Indeks Keparahhan Kemiskinan		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	0,321	0,217	0,228
Perdesaan	0,687	0,533	0,635
Perkotaan + Perdesaan	0,556	0,419	0,479

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Sejalan dengan indeks kedalam kemiskinan, nilai indeks keparahan kemiskian di Sulawesi Tenggara juga berfluktuatif. Pada tahun 2021 nilai indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tenggara sebesar 0,556. Angka indeks tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,137 poin hingga mencapai 0,419. Kemudian pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan tersebut naik 0,060 poin hingga mencapai 0,479.

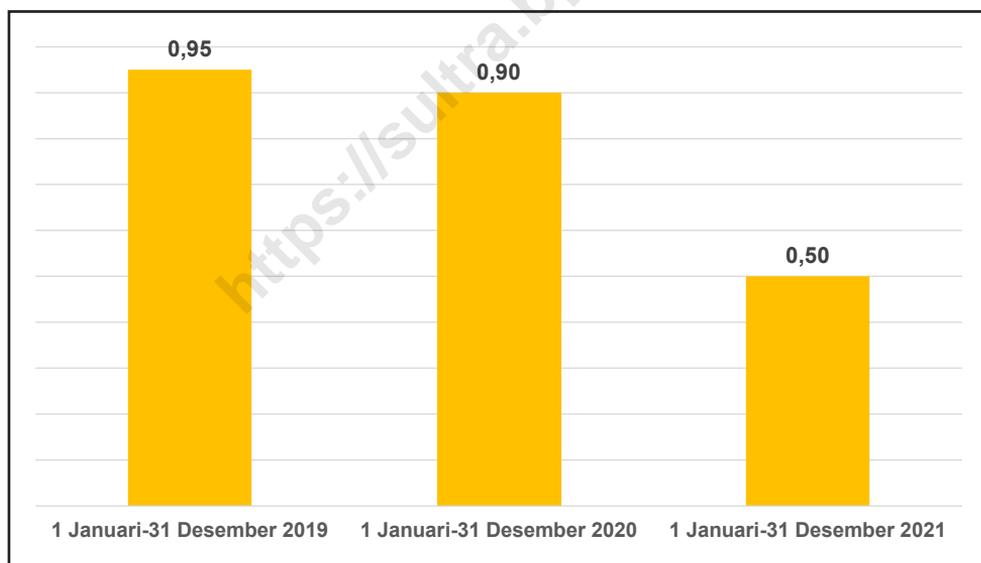
Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tenggara lebih besar di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan sebesar 0,635, sedangkan di daerah perkotaan nilai indeks keparahan kemiskinannya sebesar 0,228.

<https://sultra.bps.go.id>

8. Sosial Lainnya

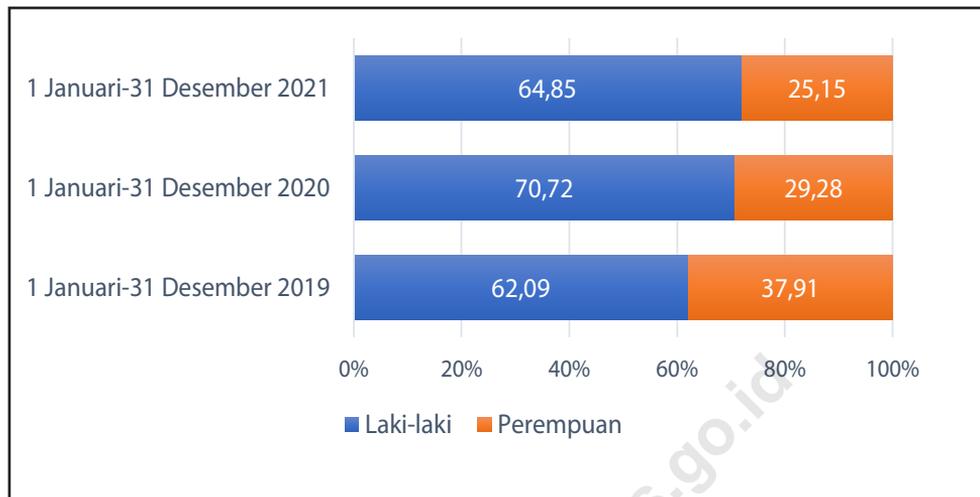
Dalam bidang sosial lainnya ini mencakup beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang memberikan gambaran tentang perubahan taraf kesejahteraan rakyat tetapi belum tercakup pada penjelasan indikator sebelumnya. Perkembangan indikator sosial lainnya menangkap adanya perubahan gaya hidup, dimana terjadi pergeseran menuju gaya hidup berbasis teknologi serta pola pikir masyarakat yang semakin maju seiring dengan terbukanya akses terhadap teknologi yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Sekat-sekat informasi mulai hilang karena inisiatif masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan apa yang terjadi. Masyarakat bisa mengakses informasi kapanpun dan di manapun mereka berada, sehingga masyarakat menjadi semakin kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Pergeseran gaya hidup ini juga berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap kebutuhan akan leisure time, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang mengalami peningkatan.

Gambar 9. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018, 2019, dan 2020



Sumber: Statistik Kriminal, 2022

Gambar 10. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2019, 2020, dan 2021



Sumber: Statistik Kriminal, 2022

Untuk mengukur fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat salah satunya dapat dilihat dari indikator tentang persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Cakupan kejahatan dari indikator tersebut antara lain pencurian, penganiayaan, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lainnya (Gambar 5). Indikator persentase penduduk di Sulawesi Tenggara yang pernah menjadi korban kejahatan terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Dari hasil Susenas tahun 2020 tercatat sebanyak 0,95 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara pernah menjadi korban kekerasan selama 1 Januari - 31 Desember 2019. Angka tersebut mengalami penurunan selama 1 Januari - 31 Desember 2021 menjadi 0,90 persen dan 0,50 persen selama 1 Januari - 31 Desember 2022. Korban kejahatan tersebut umumnya terjadi pada penduduk laki-laki, bahkan relatif meningkat dibanding persentase korban kejahatan pada penduduk perempuan (Gambar 6). Penurunan persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan tersebut tidak lepas dari andilnya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat. Penurunan angka tersebut juga menjadi indikasi keberhasilan upaya preventif yang terus digalakkan aparat keamanan serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik yang telah dilengkapi keamanan seperti CCTV (Closed-Circuit Television).

Tabel 27. Indikator Sosial lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2021-2022

Indikator	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP)	14,65	15,18
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	24,54	21,64
Persentase Rumah Tangga Menerima Bantuan Pangan	20,91	24,13
Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	19,29	23,21
Persentase Rumah Tangga Penerima Jaminan Pensiun/Veteran	10,63	9,58
Persentase Rumah Tangga Penerima Jaminan Hari Tua	9,47	8,61

Catatan: ¹ Diolah dari Survei Wisatawan Nusantara, Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September) dan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Wisatawan Nusantara 2021-2022

Salah satu prioritas pembangunan pemerintah adalah pendidikan. Dengan memberikan pendidikan yang baik pada anak dapat menjadi pondasi bagi masa depan anak, dapat membangun karakter, bisa memaksimalkan potensi, bisa meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kejahatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan bantuan berupa tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah, dan anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga Sulawesi Tenggara yang menerima PIP telah mencapai 14,65 persen. Namun pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang menerima PIP mengalami peningkatan, yakni 15,18 persen. Salah satu penyebab kenaikan ini karena adanya peraturan baru yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) Kemdikbudristek No.14 tahun 2022 yang menggantikan Pesesjen No.20 tahun 2021 terkait PIP. Dalam peraturan baru tersebut tertuang aturan jadwal pencairan dana PIP menjadi 3 kali dalam setahun yang berdasarkan kategori sumber data siswa. Pencairan PIP pertama diberikan bagi yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pencairan PIP kedua sumber datanya berasal dari usulan Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, dan sesuai rincian lainnya dan pencairan dana PIP yang ketiga berasal dari bersumber dari DTKS, usulan dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang akan dan baru melakukan aktivasi rekening. Pencairan dana PIP ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana dana PIP dicairkan setahun sekali secara serentak.

Untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan, program raskin atau rastra merupakan salah satu program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah, berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin. Tetapi bantuan raskin/rastra ini kurang efektif sehingga pada tahun 2019 pemerintah mengalihkan bantuan rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT tersebut dapat ditukarkan dengan bahan pangan di pedagang yang bekerjasama dengan bank penyalur. Tetapi mulai awal tahun 2020 pemerintah mengubah BPNT ditransformasikan menjadi program Sembako. Tujuan dari transformasi ini untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Melalui transformasi ini diharapkan prinsip 6T dapat terwujud, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dari hasil Susenas KOR, tercatat rumah tangga penerima BPNT di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 tercatat sebesar 20,91 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar 24,13 persen.

Disamping bantuan sosial pangan, usaha pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yaitu dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan PKH ini keluarga miskin bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan gizi dan perawatan. Bantuan PKH terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen (misalkan terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat atau lanjut usia). Jumlah rumah tangga penerima PKH pada dua tahun terakhir (2021-2022) relatif meningkat. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 19,29 persen rumah tangga yang menerima PKH, lalu meningkat menjadi 23,21 persen pada tahun 2022.

Pada tahun 2021, persentase rumah tangga penerima jaminan pensiun/veteran mencapai 10,63 persen dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 9,68 persen. Adapun persentase rumah tangga penerima jaminan hari tua juga relatif menurun dari 9,47 persen pada tahun 2021, menjadi 8,61 persen pada tahun 2022. Jaminan pensiun/veteran dan jaminan hari tua menjadi kebutuhan penting bagi rumah tangga, khususnya lansia.

Teknologi merupakan suatu hal yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kehidupannya. Teknologi tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Kemajuan teknologi saat ini semakin pesat sejalan dengan perubahan alat komunikasi. Segala temuan dan inovasi di bidang teknologi, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah membawa kita pada era digital. Perkembangan bidang TIK di era revolusi industri 4.0 begitu pesat, seolah menghilangkan jarak untuk penyebaran informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, penggunaan telepon kabel tetap di kalangan rumah tangga terus menurun. Penggunaan telepon kabel tetap selama periode 2021 - 2022 di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan pada setiap tahunnya dan posisinya

digantikan dengan telepon selular yang mengalami peningkatan cukup pesat. Alasan pengguna telepon kabel tetap meninggalkan alat komunikasi tersebut karena dianggap kurang praktis, telepon rumah diatur standar teknis termasuk nomor teleponnya dan tidak dapat digunakan secara mobile. Meskipun demikian, penggunaannya masih cukup populer di kalangan perkantoran. Rumah tangga pengguna telepon kabel tetap pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,50 persen dan mengalami penurunan menjadi 0,07 persen (2021).

Tabel 28. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Selama 3 Bulan Terakhir, 2021-2022

Alat Komunikasi dan Informasi	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Telepon	0,07	0,01
Telepon Selular	94,30	96,44
Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	19,12	17,84
Akses internet	81,83	87,60

Sumber : Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023

Kondisi turunnya penggunaan telepon kabel tetap tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan penggunaan telepon seluler. Mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat menjadi alasan berpindahnya penggunaan alat komunikasi tersebut. Pergeseran tersebut dirasa perlu karena telepon seluler dapat digunakan secara mobile dan dapat terhubung dengan internet. Jika dilihat perkembangannya, persentase rumah tangga yang menggunakan telepon seluler mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 94,30 persen rumah tangga yang menggunakan telepon seluler, lalu meningkat menjadi 96,44 persen pada tahun 2022.

Dampak dari pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat menyelesaikan masalah melalui sektor digital secara otomatis mengantarkan masyarakat memasuki era transformasi digital. Meningkatnya pengguna internet memungkinkan masyarakat memanfaatkan produk inovasi dan distruksi digital. Peningkatan jumlah pengguna internet yang semakin pesat tidak lepas dari keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga. Kebutuhan internet masyarakat juga terus meningkat sejalan dengan perkembangan dunia digital. Pemanfaatan internet pada hampir semua sektor termasuk sektor ekonomi yang mengalami pergeseran menjadi perekonomian digital (e-commerce), kebutuhan pada media sosial, serta transportasi online. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase rumah tangga Sulawesi Tenggara yang mengakses internet selama dua tahun terakhir (2021-2022), dari 81,83 persen pada tahun 2021 menjadi 87,60 persen pada tahun 2022.

III. Daftar Pustaka

- Afzal, A., Firdousi, S. F., Waqar, A., & Awais, M. (2022). The Influence of Internet Penetration on Poverty and Income Inequality. *SAGE Open*, 12(3). Diakses pada 09 November 2022, dari <https://doi.org/10.1177/21582440221116104>.
- Agustin, Puspa. (2022). Digital Literacy: Pengertian, Peran Penting, dan Prinsipnya. Diakses pada 09 November 2022, dari <https://vocasia.id/blog/digital-literacy/>.
- Antonio, Amy., & David Tuffley. (2014). The Gender Digital Divide in Developing Countries. *Future internet* 2014, 6, 673-687; doi:10.3390/fi6040673. Diakses pada 07 November 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/267626150_The_Gender_Digital_Divide_in_Developing_Countries.
- Appiah-Otoo, I., & Song, N. (2021). The impact of ICT on economic growth-Comparing rich and poor countries. *Telecommunications Policy*, 45(2), 102082. Diakses pada 09 November 2022, dari <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102082>.
- Arrofi, Muhammad Ken Arief. (2020). Analisis Perbedaan Tingkat Upah Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Asongu, S. A. (2015). The impact of mobile phone penetration on African inequality. *International Journal of Social Economics*, 42(8), 706-716. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2012-0228>.
- Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). How enhancing information and communication technology has affected inequality in Africa for sustainable development: An empirical investigation. *Sustainable Development*, 27(4), 647-656. dari <https://doi.org/10.1002/sd.1929>.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IP-TIK) Tahun 2015-2016 No. 114/12/Th. XX, 15 Desember 2017. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2017. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019. Jakarta: BPS.

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2021. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2022. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Bauer, J. M. (2018). The Internet and income inequality: Socio-economic challenges in a hyperconnected society. *Telecommunications Policy*, 42(4), 333–343. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.05.009>.
- BPS. 2023. BRS Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara edisi Februari 2023
- BPS. 2023. BRS Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara edisi Agustus 2023
- BPS. 2022, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021
- BPS. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022
- BPS. 2022. Statistik Indonesia, 2022
- BPS. 2023. Statistik Indonesia, 2023
- Burhan, Ahmad Badari. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Pengembangan Ekonomi Pertanian Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Juli 2018, Volume 16, No. 2. Diakses pada 16 November 2022, <https://doi.org/10.46937/16201826338>.
- Canh, N. P., Schinckus, C., Thanh, S. D., & Hui Ling, F. C. (2020). Effects of the internet, mobile, and land phones on income inequality and The Kuznets curve: Cross country analysis. *Telecommunications Policy*, 44(10), 102041. Diakses pada 03 November 2022, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102041>.
- Daniel, A.J. (2005). An exploration of middle and high school students' perceptions of deviant behavior when using computers and the internet. *The Journal of Technology Studies*, Vol. xxxi No. 2, hal. 70-80. Diakses pada 14 November 2022, dari <https://eric.ed.gov/?id=EJ848440>.
- Dewanto, Fadjar. (2021). Penggunaan Telepon Genggam 78,8%, Pengguna Fixed Line 1,65%. <https://www.blj.co.id/2021/10/26/penggunatelepon-genggam-788-pengguna-fixed-line-165/>.
- Dihni, V.A. (2022). Gambaran Kesenjangan Akses INternet di Kota-Desa Skala Global. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/gambaran-kesenjangan-akses-internet-di-kota-desa-skala-global>.
- Fajar, Ismail. (2021). Kesenjangan Digital Tingkat Ketiga pada Pemuda Pedesaan di

Kabupaten

- Cianjur, Indonesia. *Jurnal Komunika*, Volume 10 Nomor 1 /Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/354651908_Kesenjangan_Digital_Tingkat_Ketiga_pada_Pemuda_Pedesaan_di_Kabupaten_Cianjur_Indonesia.
- Hadiyat, Yayat D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2014: 81-90. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2014.1170203>.
- Handayani, E., Sari P. P. & Islami. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh UMKM pada Masa Pandemi COVID-19, Vol.10 No.2 /November 2021. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i2.4622>.
- Hilbert, Martin. (2011). Digital Gender Divide or Technologically Empowered Women in Developing Countries? A Typical Case of Lies, Damned Lies, and Statistics. *Women's Studies International Forum*, Volume 34 Issue 6 Pages 479-489, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277539511001099>.
- Jaumotte, F., Lall, S., & Papageorgiou, C. (2013). Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization? *IMF Economic Review*, 61(2), 271–309. <https://doi.org/10.1057/imfer.2013.7>.
- Kallal, R., Haddaji, A., & Ftiti, Z. (2021). ICT diffusion and economic growth: Evidence from the sectorial analysis of a periphery country. *Technological Forecasting and Social Change*, 162(May 2020), 120403. Diakses pada 12 November 2022, dari <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120403>.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika. (2019). Lompatan Katak untuk Pemerataan Infrastruktur TIK Indonesia. Diakses pada 7 November 2022, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/21767/lompatan-katak-untuk-pemerataan-infrastruktur-tikindonesia/0/artikel>.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jakarta. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Lampiran%20%20Rancangan%20Rencana%20Strategis%20Kemenkominfo%202020-2024.pdf>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia 2022.
- Khan, N., Ismail, S., Kazim, R., & Azam, T. (2020). The Influence of Information Communication Technology Development on Income Inequality Artech. *Journal of Current Business and Financial Affairs (AJCBFA)*.
- Kharlamova, G., Stavtysky, A., & Zarotiadis, G. (2018). The impact of technological changes on income inequality: The EU states case study. *Journal of International Studies*, 11(2), 76–94. Diakses pada 21 September 2022, dari <https://doi.org/10.30818/jpkm.2014.1170203>.

org/10.14254/2071-8330.2018/11-2/6.

- Krueger, Dianna., Lukaszewski, Kimberly., dan Stone, Dianna. (2018). Age and the Digital Divide. Diakses pada 09 November 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/325437066_Age_and_the_Digital_Divide Diak.
- Koltay, T., (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. *Journal Media, Culture & Society*. 33(2). 211221.
- Mading ID. (2022). Indikator Keberhasilan Penerapan Literasi Digital. <https://mading.id/perspektif/indikator-keberhasilan-penerapanliterasi-digital/>
- Mahardhika, L.A. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat Percepat Pencapaian SDGs. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191230/9/1185538/pemanfaatan-teknologi-informasi-dapat-percepatpencapaian-sdgs>.
- McDonough, CC. (2016). The Effect of Ageism on the Digital Divide Among Older Adults. *Journal Gerontology and Geriatric Medicine* 2:008. <https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/the-effect-of-ageism-on-the-digital-divide-among-older-adults#:~:text=The%20term%20E2%80%9Cdigital%20divide%20E2%80%9D%20refers,internet%20to%20do%20so%20less>.
- n.n. Pengertian Literasi Digital: Komponen, Manfaat, dan Upaya Peningkatan. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-literasi-digital/>.
- Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Corporate Communication/Postgraduate Programme, London School of Public Relations Jakarta. Jurnal Kehumasan* ISSN-2655-1551.
- Sidratul Munti, N. Y. ., & Syaifuddin, D. A. . (2020). Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*,4(2), 1975–1805. Diakses pada 18 November 2022, dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/655>.
- NTIA, US Department of Commerce. (1999). Falling Through the Net: Defining the Digital Divide. <https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/fttn99/contents.html> pada tanggal.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). Bridging The Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate. <https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). Understanding the Digital Divide. Paris: OECD. Online. Diakses pada 11 November 2022, dari <http://www.oecd.org/dataoecd/38/57/1888451.pdf>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2014). Skills and Jobs in the Internet. *OECD Digital Economy Papers*, No. 242.
- Poliquin, C. W. (2020). The Wage and Inequality Impacts of Broadband Internet. https://www.poliquin.xyz/files/poliquin_jmp.pdf.

- Rath, B.N & Hermawan, D. (2019). Do Information And Communication Technologies Foster Economic Growth In Indonesia? *Bulletin of Monetary Economics and Banking* Vol. 22, No. 1 (2019) pp. 103 – 122. Diakses pada 17 November 2022, dari <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/1041>
- Richmond, K., & Triplett, R. E. (2018). ICT and income inequality: a cross-national perspective. *International Review of Applied Economics*, 32(2), 195–214. <https://doi.org/10.1080/02692171.2017.1338677>.
- Riskinaswara, L. Literasi Digital Kurangi Kesenjangan Akses Digital Perempuan. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/literasi-digital-kurangikesenjangan-akses-digital-perempuan/> diakses 7-11-2022.
- Sein, Maung K. & Harindranath, G., (2004), *Conceptualizing the ICT Artifact: Toward Understanding the Role of ICT in National Development. The Information Society: An International Journal*, 20:1, 15-24. Diakses pada 17 November 2022, dari <https://doi.org/10.1080/01972240490269942>.
- Srinuan, Chalita & Bohlin, Erik. (2011). *Understanding the Digital Divide: A Literature Survey and Ways Forward*. Diakses pada 9 November 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/254460217_Understanding_the_digital_divide_A_literature_survey_and_ways_forward.
- Susanti, S. O. & Juwono, V. (2019). Collaborative Governance : Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia Tahun 2016-2019. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* Vol 8 (1), Juni 2019. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/collaborative-governance-proyek-penyelenggaraanjaringan-tulang-p>.
- Ulya, F. N. (2021). Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet. <https://money.kompas.com/read/2021/07/29/120100226/bank-dunia--kesenjangan-digital-indonesia-lebar-49-persen-penduduk-belum-akses?page=all>.
- Unesco Institute for Statistics. (2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.Vu*, K. M. (2013). Information and communication technology (ICT) and singapore's economic growth. *Information Economics and Policy*, 25(4), 284–300. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2013.08.002>.

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3135363; Fax. 0401-3122355;
E-mail: bps7400@bps.go.id; Website: <http://sultra.bps.go.id>

ISSN 2614-0721

